

**EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT DI  
KECAMATAN JATIUWUNG  
KOTA TANGERANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**Oleh:**

**ASTRI DWI ASTUTI**

**NIM. 6661091651**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SERANG, AGUSTUS 2016**

## ABSTRAK

Astri Dwi Astuti.66661091651. “Evaluasi Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang”. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2016. Dosen Pembimbing I: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II: Juliannes Cadith., M.Si

Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Dengan rumusan masalahnya yaitu Bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Jatake dan Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan dari model teori Dunn. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan optimal. adanya keterbatasan kuota masing-masing kelurahan tidak sesuai dengan hasil kebijakan yang terlaksana, tidak adanya kejelasan sosialisasi dan kriteria dalam penetapan masyarakat penerima bantuan, tidak maksimalnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kurangnya sosialisasi mengenai manfaat, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Saran dalam penelitian yaitu Melakukan upaya penurunan secara signifikan kawasan kumuh dengan memaksimalkan peran dari lembaga dan dinas terkait secara bersinergi, Melakukan survei secara menyeluruh di setiap wilayah Kota Tangerang dalam menentukan kawasan dan masyarakat penerima manfaat, Melakukan sosialisasi secara bertahap sehingga tepat sasaran, Menambah jumlah anggaran APBD, pendataan masyarakat dengan memaksimalkan peran rukun warga.

**Kata Kunci :** Evaluasi, Pembangunan, Rumah Sederhana Sehat

## ABSTRACT

*Astri Dwi Astuti. 6661091651. Evaluation of Development Activities Simple Healthy House in Sub-District Jatiuwung Tangerang City. Departement of Public Adminstration. Faculty of Social and Political Science, Sultan Ageng Tirtayasa University. 2016. The 1<sup>st</sup> advisor: Listyaningsih, S.Sos., M.Si. 2<sup>nd</sup> advisor : Juliannes Cadith., M.Si.*

*The focus of this study is the evaluation of Simple Healthy House Building. With the formulation of the problem, namely How will the results of the implementation of infrastructure development healthy simple house conducted by the Department of Public Works Tangerang City, located in the Village Jatake and Village Alam Jaya, Tangerang City Sub-district Jatiuwung. The purpose of this study to evaluate the implementation of the infrastructure development healthy simple house conducted. The theory used in this study is the policy evaluation criteria developed from a theoretical model Dunn. Based on the results of research in the field that the evaluation of infrastructure development for healthy simple house in the district of Tangerang City in implementation Jatiuwung not run optimally. This is due to the limitations of the quota of each village is not in accordance with the results of the policies implemented, the lack of clarity of socialization and criteria in the determination of beneficiaries, not maximum budget provided by the government to finance development activities and lack of socialization regarding,. Suggestions in the study of Conduct efforts to reduce significantly the slum area by maximizing the role of institutions and related agencies synergistically, Perform a full survey in every region of the city of Tangerang in select areas and beneficiaries, Socializing gradually so on target in socializing intent, Increase the number of local budget, takes measures to maximize the role of the community inventory citizens Association*

*Keywords : Evaluation, Development Activities Simple Healthy House*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Astri Dwi Astuti  
NIM : 6661091651  
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Mei 1990  
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatirwang Kota Tangerang" ini merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Serang, Agustus 2016



METERAI PRAPES  
6000

Astri Dwi Astuti

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ASTRI DWI ASTUTI  
NIM : 6661091651  
Judul Skripsi : "EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA  
DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT DI  
KECAMATAN JATHU/WUNG KOTA TANGERANG".

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 15  
Agustus 2016 dan dinyatakan LULUS

Serang, Agustus 2016

Ketua Penguji:

Riswanda, Ph.D  
NIP. 198101122008121001

Anggota:

Drs. Hamri Waseh, M.Si  
NIP. 196202032000121002

Anggota:

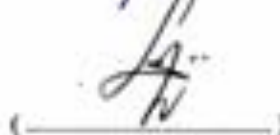
Listyaminingsih, S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001



(\_\_\_\_\_)



(\_\_\_\_\_)



(\_\_\_\_\_)

Mengetahui,



Dip. Agus Simari, M.Si  
NIP. 197108242005011002



Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara  
Listyaminingsih, S.Sos., M.Si  
NIP. 197603292003122001

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : ASTRI DWI ASTUTI  
NIM : 6661091651  
Judul : EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA  
DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT DI  
KECAMATAN JATIUWUNG KOTA TANGERANG

Serang, Juli 2016

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Pembimbing I



Listyaningsih, S.Sos., M.Si.  
NIP.197603292003122001

Menyetujui,

Pembimbing II



Julianes Cadith, M.Si  
NIP. 197207132009121001

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA



Dr. Agus Siafari, M.Si.  
NIP. 197108242008011002

*Jika mimpi ingin menjadi nyata,  
maka bangun dan bertindaklah*

**Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua,  
keluarga dan sahabat-sahabat ku**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tuaku yang telah mencurahkan waktu, tenaga serta doa yang tak pernah terputus untuk penulis.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul: "Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang".

Penulis menyadari bahwa tugas penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



3. Rahmawati, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Dr. Rahmi Winangsih, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus pembimbing I skripsi, bagi peneliti beliau yang senantiasa memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Riswanda, Ph.D., Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Juliannes Cadith, S.Sos, M.Si., Pembimbing II skripsi bagi peneliti yang senantiasa memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi penelitian ini.
9. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama perkuliahan.
10. Abang dan mba Ikhsan Fauzi dan Ika Septiani, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang tiada henti-hentinya.
11. Kedua keponakan ku, Dima Virendra Zikri dan Divana Ayu Jenar Pramusita, yang selalu menghibur dikala kejenuhan melanda penulis.

12. Monika Aprilianingsih, Hijriatul Mabruk, Radhi Tjantoro, Septian Gestiardi, yang merupakan teman, sahabat, dan saudara bagi penulis. Karena mereka selalu memberikan waktu, masukan, dan dukungan, agar penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 ANE Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kerja samanya kepada penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, begitu pula dalam penyusunan skripsi penelitian ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi penelitian ini bermanfaat bagi peneliti ke depannya dalam melaksanakan penelitian hingga selesai maupun siapapun yang membaca.

Serang, Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
LEMBAR ORISINALITAS	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	11
1.3. Batasan dan Rumusan Masalah .....	12
1.4. Tujuan Penelitian .....	12
1.5. Kegunaan Penelitian .....	12
1.6. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II    KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	
2.1. Kajian Teori .....	17

2.1.1.	Pengertian Kebijakan Publik .....	18
2.1.2.	Sifat Kebijakan Publik .....	25
2.1.3.	Karakteristik Kebijakan Publik .....	26
2.1.4.	Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	27
2.1.5.	Implementasi Kebijakan .....	30
2.1.6.	Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik .....	32
2.1.7.	Evaluasi Kebijakan .....	34
2.1.8.	Tujuan Evaluasi Kebijakan .....	36
2.1.9.	Metode Evaluasi Kebijakan .....	37
2.1.10.	Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn .....	39
2.1.11.	Pengertian Pembangunan .....	41
2.1.12.	Pengertian Pembangunan Daerah .....	45
2.1.13.	Pengertian Kemiskinan .....	47
2.1.14.	Rumah Sederhana Sehat .....	52
2.1.14.1.	Pengertian Rumah Sederhana Sehat ...	52
2.1.14.2.	Gambaran Umum Konsep Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) .....	53
2.1.14.3.	Aspek-Aspek Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) .....	54
2.1.14.4.	Tipologi Rumah Sederhana Sehat .....	60
2.1.15.	Kampung Kumuh .....	60
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	64
2.3.	Kerangka Berfikir .....	66

2.4. Asumsi Dasar .....	69
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Penelitian .....	71
3.2. Fokus Penelitian .....	72
3.3. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian .....	72
3.4. Fenomena Yang Diamati .....	73
3.4.1. Definisi Konsep .....	73
3.4.2. Definisi Operasional .....	74
3.5. Instrumen Penelitian .....	75
3.6. Informan Penelitian .....	76
3.7. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data .....	77
3.7.1. Teknik Pengumpulan Data .....	78
3.7.2. Teknik Analisa Data .....	84
3.8. Pengujian Keabsahan Data .....	87
3.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	89
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	90
4.1.1. Gambaran Umum Kota Tangerang .....	90
4.1.2. Visi dan Misi Kota Tangerang .....	93
4.1.3. Gambaran Kondisi Ekonomi di Kota Tangerang ....	96
4.1.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang .....	101
4.1.5. Potret Kampung Kumuh di Kecamatan Jatiuwung..	104

4.2. Deskripsi Data Penelitian .....	108
4.2.1. Daftar Informan Penelitian .....	108
4.2.2. Deskripsi Data .....	110
4.3. Deskripsi Hasil Penelitian .....	112
4.3.1. Efektivitas .....	112
4.3.2. Efisiensi .....	118
4.3.3. Kecukupan .....	125
4.3.4. Perataan .....	130
4.3.5. Responsivitas .....	136
4.3.6. Ketepatan .....	141
4.4. Pembahasan .....	154

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	167
5.2. Saran .....	168

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Kriteria Rumah Tangga Miskin .....	50
Tabel 3.1. Sumber Data Informan .....	77
Tabel 3.2. Pedoman Wawancara .....	81
Tabel 3.3. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian .....	89
Tabel 4.1. Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kota Tangerang .....	91
Tabel 4.2. Jumlah dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tangerang yang Dirinci Menurut Kecamatan .....	91
Tabel 4.3. Kesejahteraan Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2013 .....	98
Tabel 4.4. Tingkat Kemiskinan di Kota Tangerang .....	100
Tabel 4.5. Informan Penelitian .....	109
Tabel 4.6. Matriks Hasil Wawancara .....	149

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1. Potret Kemiskinan Yang Menjadi Target Program Penanganan Kampung Kumuh di Kota Tangerang .....	1
Gambar 2.1. Tahap-Tahap Kebijakan .....	30
Gambar 2.2. Kesenjangan antara Harapan dengan Kenyataan Kebijakan .	35
Gambar 2.3. Bagan Kerangka Berfikir .....	68
Gambar 3.1. Analisis Data Menurut Miles & Huberman .....	85
Gambar 3.2. Komponen Teknik Triangulasi .....	88
Gambar 4.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang .....	93
Gambar 4.2. Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang	103
Gambar 4.3. Kondisi Bangunan Kampung Kumuh di Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang .....	106
Gambar 4.4. Kondisi Bangunan di Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang .....	108
Gambar 4.5. Hasil dari Kebijakan Pemerintah atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya .....	121
Gambar 4.6. Masyarakat dapat menikmati rumah sederhana sehat yang layak huni dibandingkan kondisi sebelumnya .....	126



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam pendataan kependudukan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhitung tanggal 31 Desember 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 259.940.857 jiwa, jumlah tersebut terdiri dari 132.420.055 laki-laki dan 127.700.802 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 29,13 juta orang menurut BPS (Badan Pusat Statistik, Tahun 2010), melihat potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat besar, namun potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, hal ini salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia.

**Gambar 1.1**  
**Potret Kemiskinan Yang Menjadi Target Program Penanganan**  
**Kampung Kumuh di Kota Tangerang**



Kemisikinan merupakan fenomena global yang pada umumnya hampir ditemui di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat

penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan dimana baik secara individu, keluarga, maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan pendidikan. Indonesia salah satu negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang juga terkena fenomena global ini.

Tingkat kemiskinan di Indonesia hingga saat ini memang terus menurun, namun cenderung melambat, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) dalam kurun waktu 2008-2009 sebanyak 2,5 penduduk miskin terentaskan kemiskinan, tetapi sejak tahun 2009-2012 1-1,5 juta /tahun penduduk miskin yang dapat keluar dari kemiskinan. Pemerintah saat ini memiliki berbagai macam program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis sosial, program penanggulan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10% pada akhir tahun 2014. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, seperti, menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif.

Terkait dengan strategi tersebut di atas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga *cluster*.

*Cluster* I program sosial terpadu berbasis kekeluargaan, *cluster* II program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, *cluster* III penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (<http://tnp2k.go.id/program/sekilas/>). (Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2010). Program penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah juga melakukan hal tersebut untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di perkotaan.

Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Tangerang tidak terlepas dari fenomena global yaitu kemiskinan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk Kota Tangerang tidak seimbang dengan akselerasi daya dukung kota dalam mengantisipasi ketersediaan lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas pelayanan masyarakat umum lainnya. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang disetiap wilayah kecamatan maupun kelurahan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2000-2010) cukup tinggi, yaitu 2%. (Sumber : Hasil Sensus Penduduk BPS, 2010). Di sisi lain, luas wilayah tidak bertambah yang mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk dari tahun ke tahun.

Kota Tangerang merupakan kota yang strategis karena berdekatan dengan Ibukota Negara Republik Indonesia, yaitu DKI Jakarta, ini membuat Kota Tangerang tumbuh pesat menjadi sebuah kota besar di wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan intruksi Presiden No. 13/1976, wilayah Tangerang dinyatakan sebagai daerah *hinterland* Ibukota. Terjadi peningkatan arus tenaga kerja dari wilayah Jakarta, berdirinya pusat-pusat perbelanjaan dan perkembangan

pemukiman baru sehingga membuat Kota Tangerang menjadi padat, itu merupakan imbas atau dampak dari pembangunan di wilayah Jakarta.

Peningkatan kepadatan penduduk di Kota Tangerang juga disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti penyebaran penduduk yang tidak merata, tingginya komposisi usia muda yang membutuhkan lapangan kerja, arus urbanisasi tinggi, dan penyebaran sumberdaya yang tidak merata. Kondisi seperti ini jelas membutuhkan penanganan yang komprehensif dari Pemerintah daerah, karena faktor-faktor seperti itulah yang memacu tingginya angka kemiskinan di Kota Tangerang. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tangerang tahun 2008, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 28.982 KK (Kartu Keluarga) yang tersebar di 13 kecamatan.

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang bersifat multi sektoral Pemerintah Pusat, melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pada semua tingkatan (Pemerintah, Swasta, LSM, dan kelompok masyarakat) di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota yang menjalankan fungsinya sebagai forum koordinasi, mediasi, dan fasilitas agar lebih berjalan terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Tangerang memberikan perhatian yang lebih terhadap keluarga miskin. Terlihat dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dengan sasaran keluarga miskin. Pada tahun 2008, dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2008) telah memproyeksikan sejumlah 28,894 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Data dari hasil PPLS memberikan gambaran bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk menyusun program pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan status sosial masyarakat miskin. Metodenya adalah dengan cara mengidentifikasi masyarakat miskin dan menggolongkannya menjadi tiga kelompok *cluster*, yakni masyarakat sangat miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat di bawah garis kemiskinan.

Pengelompokan ini dilakukan karena cara penganggulannya yang berbeda. Pertama untuk kelompok masyarakat sangat miskin, diterapkan program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, dimana program yang disediakan bersifat bantuan langsung agar mereka mampu untuk sekedar bertahan hidup, seperti Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan program lokal berupa program Kartu Multi Guna yaitu pemberian bantuan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin yang memiliki kartu ini.

Kedua untuk kelompok masyarakat miskin, diterapkan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bersifat memberdayakan masyarakat, yakni dengan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM). Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memprogramkan penanganan kampung kumuh untuk meningkatkan kualitas jalan lingkungan dengan pavingblok dan bedah rumah.

Ketiga untuk kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan, diterapkan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang secara khusus program ini sebagai pemberdayaan Usaha Menengah dan Kecil (UMK). Langkah ini diambil agar kelompok masyarakat di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang masih memiliki sumberdaya ekonomi namun tidak mampu mendayagunakan secara maksimal. (Sumber dari Laporan Kemiskinan Kota Tangerang 2011).

Salah satu dari ketiga kelompok *cluster* tersebut terdapat program penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang yang bersifat fisik, yaitu program penanganan kampung kumuh. Timbulnya program ini karena adanya krisis sosial dan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat Kota Tangerang telah menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan masyarakat Kota Tangerang untuk mendapatkan pemukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur, sebagai akibat dari turunya daya beli masyarakat.

Selain itu, ketersediaan lahan di Kota Tangerang mulai tidak dapat mengimbangi pesatnya pertumbuhan kebutuhan sarana pemukiman yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk yang umumnya diakibatkan karena urbanisasi. Hal ini menyebabkan berdirinya pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali pada lokasi-lokasi yang diperuntukkannya bukan untuk pemukiman bahkan dengan kepemilikan yang

tidak sah. Menjamurnya pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali tersebut menyebabkan struktur ruang kota menjadi tidak tertata rapih dan pada akhirnya menimbulkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan ruang kota dan penyediaan infrastruktur.

Meluasnya kawasan pemukiman kumuh akan menimbulkan dampak pada tingginya angka bencana seperti kebakaran dan banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya dan kualitas sarana dan prasarana pemukiman. Program kampung kumuh Kota Tangerang ini memiliki dasar hukum, dasar hukum yang dimaksud adalah peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pelaksanaannya, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 3469), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012, dan yang terakhir Peraturan Daerah Kota Tangerang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013. (Sumber : kegiatan Review Strategi Penataan Kampung Kumuh Kota Tangerang).

Pelaksanaan Program Kampung Kumuh atau Program Pengembangan Perumahan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Bidang Perumahan dan Permukiman, tahun 2012 telah dilaksanakan di Kecamatan Jatiuwung yang terdiri dari dua Kelurahan yaitu Kelurahan Alam Jaya dan Kelurahan Jatake. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat atau bedah rumah Kota Tangerang mendapat bantuan berupa rehab total/sebagian bangunan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sebagai penunjang Program Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Berdasarkan SK Walikota Nomor 640/KEP.472-BPMKM/2012 tentang Penetapan Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 2012-2016. Adapun yang menjadi keluarga binaan dilokasi P2WKSS adalah 100 Kepala Keluarga yang tergolong Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1. Sasaran tersebut diberikan pengetahuan, informasi, keterampilan, dan pelatihan dari berbagai program SKPD yang terlibat dalam kegiatan tersebut. SKPD yang terlibat dalam kegiatan ini antar lain : Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, PDAM, KANDEPAG, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, TP PPK, kecamatan dan kelurahan. SKPD yang terlibat dalam Program P2WKSS merupakan Tim



Pokja P2WKSS tingkat Kota Tangerang, melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan jadwal sesuai rencana SKPD tersebut. (Sumber : Bab IV Profil Pelayanan Kinerja BPMKB Kota Tangrang Tahun 2012).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap salah satu Program Pengembangan Perumahan, yaitu kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kelurahan Jatake dan Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, peneliti menemukan beberapa masalah. Pertama masih ditemukannya nepotisme karena rekomendasi yang datang dari *stakeholder* setempat, beberapa diantaranya kurang tepat sasaran. Ketika peneliti mencari rumah yang menjadi target dalam kegiatan ini yang beralamat di RT 04 RW 05 Kelurahan Jatake, lebih tepatnya rumah dari Bapak Emong dan Bapak Saepi, kedua rumah tersebut sangat berdekatan selain itu mereka masih ada hubungan persaudaraan atau kekerabatan dengan Bapak Nana Supriana yang menjabat sebagai Bapak ketua RT 04.

Kedua, rumah yang menjadi target dalam kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat tidak memiliki sertifikat karena rumah tersebut bukanlah rumah pribadi, rumah hanya dikontrakan kepada keluarga pendatang, bukanlah masyarakat Kota Tangerang karena mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Persyaratan untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini adalah dengan menunjukkan foto copy sertifikat rumah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala rumah tangga.

Ketiga dan keempat yaitu, masih banyaknya rumah tidak layak huni dan belum tertangani yang tercantum dalam Review Strategi Penataan Kampung Kumuh di Kota Tangerang tahun 2010 yang didapat peneliti dari BAPPEDA Kota Tangerang berisikan untuk menyusun strategi untuk menata kampung kumuh di Kota Tangerang dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman di Kota Tangerang yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur, melalui efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penanganan serta sinergi tindak antara Pemerintah Kota Tangerang, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya. Ada 57 rumah tidak layak huni yang berlokasi di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang sesuai dengan review ini, tetapi karena keterbatasan dana APBD maka rumah yang dapat direhab hanya sebanyak 14 rumah saja, ini diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Linda Donarika Marbun, ST, MT pada saat itu sebagai Kasi bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang.

“Berdasarkan review kampung kumuh yang disusun oleh BAPPEDA Kota Tangerang ada 57 rumah tidak layak huni, inilah yang menjadi salah satu kendala kami selaku pelaksana dalam menjalankan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, karena keterbatasan dana APBD Kota Tangerang sehingga tahun 2012 kemarin kami hanya bisa merehab 14 rumah”. (Wawancara Tanggal 23 Maret 2013)

Dari masalah di atas seharusnya Pemerintah menyiapkan dana khusus untuk menjalankan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang agar pembangunan dapat dilaksanakan secara merata dan tidak ada kesenjangan di

masyarakat Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Melihat dari latar belakang masalah diatas, peneliti menganggap perlu diadakannya suatu penelitian dengan judul analisis pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Jatake dan Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang guna mengetahui bagaimana proses dan seberapa bermanfaatnya kegiatan tersebut untuk masyarakat miskin Kota Tangerang. Oleh karena itu, fenomena atas kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud yang telah diselenggarakan pemerintah Kota Tangerang perlu dikaji dan dievaluasi ulang secara serius, agar kebijakan pemerintah dalam memberikan program kesejahteraan bagi masyarakat dapat terealisasi dengan baik.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sebagian rumah yang menjadi target kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang kurang tepat sasaran.
2. Rumah yang menjadi target dalam kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang tidak memiliki sertifikat karena rumah tersebut bukanlah rumah pribadi sehingga rumah tersebut tidak dapat di bedah.
3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum tertangani sesuai dengan Review Strategi Penataan Kampung Kumuh di Kota Tangerang tahun 2010.

4. Keterbatasan dana APBD Kota Tangerang.

### **1.3. Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1. Batasan Masalah**

Dengan adanya fokus penelitian maka akan memberikan batasan studi yang dilakukan, oleh karena itu fokus penelitian sangat penting dalam proses penelitian, maka fokus penelitian ini adalah Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang yang berlokasi di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

#### **1.3.2. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengevaluasi kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1. Manfaat Teoritis**

Kegunaan Manfaat Teoritis / akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis.

1. Memperbanyak khasanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis.
2. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai implementasi kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan khususnya perilaku dan teori organisasi yang didalamnya terdapat suatu strategi organisasi, pembangunan masyarakat dan studi kesejahteraan sosial.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis/fragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi.

1. Dapat memberikan informasi, masukan serta pertimbangan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sebagai rasa tanggung jawab Pemerintah terhadap masyarakat Kota Tangerang.
2. Dapat tercipta masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Tangerang.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah berisi deskripsi secara umum tentang ruang lingkup permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari ruang lingkup yang paling

umum hingga kepada masalah yang spesifik, yang relevan dengan judul skripsi serta sebab peneliti mengangkat masalah tersebut. Identifikasi masalah berisi beberapa uraian masalah yang ada dan berkaitan dengan obyek penelitian. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Batasan masalah akan lebih mempersempit masalah yang akan diteliti, sehingga objek penelitian, subjek penelitian, lokus penelitian, hingga periode penelitian secara jelas termuat. Rumusan masalah yaitu mengidentifikasi masalah secara implisit secara tepat atas aspek yang akan diteliti seperti terdapat dalam latar belakang masalah dan pembatasan masalah. Tujuan Penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 ( dua ) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berguna memberikan kontribusi tertentu terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis. Manfaat praktis memberikan kontribusi tertentu terhadap obyek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dan sistematika penelitian, yaitu uraian mengenai isi bab per bab secara keseluruhan.

## **BAB II    DESKRIPSI TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

Bab ini terdiri dari deskripsi teori yaitu uraian dari beberapa teori yang terkait dengan masalah dan objek penelitian. Kerangka berfikir, yaitu menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi

teori. Asumsi dasar penelitian yaitu merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini peneliti memaparkan teori-teori dari beberapa ahli yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Setelah memaparkan teori, lalu membuat kerangka berpikir yang menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori terhadap permasalahan yang diteliti.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, yaitu menjelaskan obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas. Deskripsi data, yaitu menjelaskan data yang telah didapatkan dari observasi di lapangan dan menjelaskan informan yang ditentukan dalam penelitian ini yang senantiasa berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Penyajian data, yaitu menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan. Pembahasan hasil penelitian, yaitu menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar teori yang telah ditetapkan sejak awal.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdairi dari kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami; dan saran, yaitu pada sub ini memberikan rekomendasi kepada instansi terkait

khususnya pada pemerintahan Kota Tangerang, sebagai tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti secara teoritis maupun praktis.



**BAB II**  
**KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN ASUMSI DASAR**  
**PENELITIAN**

**2.1. Kajian Teori**

Teori dalam administrasi mempunyai peranan yang sama dengan teori yang ada didalam Ilmu Fisika, Kimia maupun Biologi yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan panduan dalam penelitian yang akan dilaksanakan seperti yang dikemukakan bahwa: Hoy dan Miskel mengemukakan: *“Theory is a set of interrelated concepts, assumptions, and generalizations that systematically describes and explains regularities in behavior in organizations”* (Sugiyono, 2007: 55).

Berdasarkan hal diatas teori didefinisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi baik organisasi formal maupun organisasi informal. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan ada empat kegunaan teori didalam penelitian yaitu (Sugiyono, 2007: 55-56) :

1. Teori berkenaan dengan konsep, asumsi dan generalisasi yang logis.
2. Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan.
3. Teori sebagai stimulant dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan.
4. Teori sebagai pisau bedah untuk suatu penelitian.

Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti, berapa jumlah kelompok teori yang perlu

dikemukakan atau dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah (Sugiyono, 2011: 60).

Oleh karena itu pada bab II ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah penelitian diantaranya teori implementasi kebijakan publik dan mengenai implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Jatake dan Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang.

### **2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* (hanya menyangkut aparatur negara), melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, dunia usaha, maupun masyarakat umum (*civil society*). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial dan manusia demi kepentingan publik, yakni masyarakat banyak, atau warga negara. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan

dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi (Dunn, 2003: 51).

Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari kebijakan. Menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *—a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern—* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Hampir sama dengan James E Anderson, Carl Friedrich dalam Agustino (2006: 7) yang menyatakan bahwa:

*—Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.”*

Menurut Marlowe dalam Wicaksono (2006: 56), kebijakan adalah sebuah upaya untuk menciptakan atau merencanakan sebuah cerita dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perencana. Pengertian kebijakan mengandung arti yang sama dengan pengertian kebijaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli James dalam Wahab (2005: 2), merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Sedangkan menurut Carl Friedrich dalam Wahab (2005: 3) yang menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah:

–Suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan-tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah atau pengertian kebijakan masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Oleh karena itu untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Sedangkan yang dimaksud dengan publik antar lain: Umum Masyarakat, dan Negara. Jadi publik disini diartikan sebagai khalayak banyak yang berada di suatu wilayah (Negara), yang mempunyai hak dan kewajiban. Frederickson dalam Wicaksono (2006: 33), terdapat lima perspektif administrasi publik modern yakni Perspektif legislatif (*the legislative perspective*), Perspektif Pluralis (*the pluralist perspective*), Perspektif Pilihan Publik (*the public choice perspective*), Perspektif Penyedia Layanan (*the service-providing perspective*), Perspektif Kewarganegaraan (*the legislative perspective*). Berikut penjelasannya:

1. Perspektif Legislatif (*the legislative perspective*).

Dalam kenyataan kebijakan pemerintahan yang bersifat demokratis menggunakan perwakilan tidak langsung (*representative democracy*). Asumsi dasar yang dianut adalah bahwa setiap pejabat diangkat untuk mewakili kepentingan, kebutuhan dan tuntutan warga negara atau publik. Dengan adanya pengangkatan tersebut mereka memiliki legitimasi untuk mewujudkan perspektif publik didalam proses kebijakan publik.

Dengan demikian, pejabat-pejabat tersebut diangkat dan dianggap sebagai manifestasi tunggal dari perspektif publik. Meskipun pandangan ini merupakan pandangan yang dianggap logis dan realistis dalam pelaksanaan demokrasi modern, namun pada akhirnya disadari bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam publik seringkali tidak terwakili secara efektif oleh orang-orang yang telah mereka pilih secara langsung. Jadi pada intinya, *representational representative on the public* dianggap tidak mencukupi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori maupun dalam praktek kebijakan publik di lapangan.

2. Perspektif Pluralis (*the Pluralist perspective*).

Perspektif ini memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (*interest group*). Menurut pendukung perspektif ini, setiap orang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lainnya dan membentuk suatu kelompok. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok yang berkepentingan tersebut berinteraksi dan

kompetisi untuk memperjuangkan kepentingan individu-individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan.

3. Perspektif Pilihan Publik (*the public choice perspective*).

Secara umum perspektif ini berakar pada tradisi pemikiran utilitarian yang sangat menekankan pada awal kebahagiaan dan kepentingan individu. Pandangan ini memandang publik seolah-olah sebagai konsumen dalam pasar. Dengan kata lain pandangan ini mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi pasar ke dalam sektor publik.

4. Perspektif Penyedia Layanan (*the service – providing perspective*).

Menurut pandangan ini *street level bureaucrats* mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri dari individu-individu dan kelompok. Oleh karena itu, pandangan ini agar para pejabat yang berada paling dekat dengan publik dan diharapkan menjadi penyokong utama publik mereka.

5. Perspektif Kewarganegaraan (*the legislative perspective*).

Sumber dari kekuatan pendekatan kewarganegaraan ini terutama terletak pada potensinya untuk meningkatkan dan memuliakan publik yang termotivasi oleh adanya perhatian bersama bagi kebaikan bersama.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan publik sering diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan studi yang penting dalam program administrasi negara, karena sangat dibutuhkan untuk membuat suatu rancangan perundang-undangan atau kebijakan dalam suatu pemerintahan. Menurut *Dye* dalam *Parson, Public Policy*, (2005: xi), kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”.

Beragam pengertian mengenai kebijakan publik ini tidak bisa dihindarkan, karena kata “kebijakan” merupakan penjelasan ringkas yang berupaya untuk menerangkan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan dan evaluasinya. Beberapa definisi tentang kebijakan publik yang dikutip dari beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut:

*Eyestone* dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) dalam *Agustino* (2006: 40), mendefinisikan kebijakan Publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut *Anderson* bukunya *Public Policy Making* dalam *Agustino* (2006: 40), mengatakan bahwa::

–Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang harus diperhatikan”.

Pendapat lain diutarakan oleh *Heclo* dalam *S. Tangkalisan, & Nogi* (2003: 3) menyatakan bahwa; Kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Sedangkan *Dye* dalam *Subarsono AG* (2006: 2) menyatakan bahwa; Kebijakan Publik meliputi apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (2003: 54), mengatakan bahwa hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Untuk itu Kebijakan Publik tidak harus selalu berupa perundang-undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati sebelumnya. Maksud dan tujuan dari dibuatnya Kebijakan Publik menurut Widodo (2007: 14) adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah yang dihadapi tentu saja beraneka ragam bentuk dan intensitasnya serta keharusan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada, agar dapat merubah keadaan atau kondisi menjadi lebih baik. Terdapat beberapa pendapat lain dari para ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah public, begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa:

–Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.”

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengambil sebuah kebijakan dan Nugroho (2003: 73), mengatakan bahwa terdapat 3 tahap dari Kebijakan Publik yaitu :

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan



### 3. Evaluasi Kebijakan

Dengan demikian dari beberapa pengertian kebijakan publik di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebuah pemerintah berhak memutuskan untuk memilih dan bertindak secara sengaja dalam menyelesaikan masalah dan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam upaya mengurus kepentingan masyarakatnya.

#### 2.1.2. Sifat Kebijakan Publik

Sifat kebijakan publik menurut Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2003: 46, 57).

Sebagai bagian dari suatu kebijakan dapat dimengerti secara baik bila dibagi-bagi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. *Policy demans* atau pemerintahan kebijakan. *Policy demans* merupakan pemerintahan atau kebutuhan atau klaim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan permintaan tersebut dapat berupa desakan secara umum kepada pemerintah dimana pemerintah harus melakukan sesuatu atau berupa usulan untuk bertindak dalam masalah tertentu.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah

keputusan untuk mengeluarkan ketetapan mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif, atau membuat interpretasi hukum yang penting.

3. *Policy statements* atau pernyataan kebijakan merupakan ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan termasuk didalamnya adalah ketetapan legislative, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan dan sebagainya.
4. *Policy out put* atau hasil kebijakan merupakan perwujudan nyata dari kebijakan publik atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa out put kebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah.”

### **2.1.3. Karakteristik Kebijakan Publik**

Menurut Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2003: 45).terdapat beberapa karakteristik utama dalam kebijakan publik diantaranya :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah secara acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif. Kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan ; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.”

#### **2.1.4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Dalam proses pembuatan kebijakan publik ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh para ahli untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan public. Proses pembuatan kebijakan public merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus benar-benar dikaji. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

#### 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Secara singkat, tahap-tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:

**Gambar 2.1****Tahap-Tahap Kebijakan**

Penyusunan kebijakan



Formulasi kebijakan



Adopsi kebijakan



Implementasi kebijakan



Evaluasi kebijakan

*Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34).*

**2.1.5. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses dari kebijakan yang telah di buat oleh Pemerintah yang dimana kebijakan tersebut sudah dirumuskan dan disetujui untuk dapat dilaksanakan dan sejauhmana kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Pada hakekatnya implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Seperti yang

diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1983 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

–Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Agustino, 2006:153).

Sedangkan Grindle mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

–Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” (Agustino, 2006: 153).

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

–*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*”  
(Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan) (Agustino, 2006: 153).

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahap atau proses yang sangat penting dari keseluruhan tahapan kebijakan, karena dari tahap inilah sebuah kebijakan dapat diketahui tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

### 2.1.6. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik adalah pendekatan secara *top-down*, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain. Yang kedua adalah pendekatan secara *bottom-up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat.

Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan publik memerlukan model implementasi yang berlainan, karena ada kebijakan publik yang perlu diimplementasikan secara *top-down* atau secara *bottom-up*. Kebijakan-kebijakan yang bersifat *top-down* adalah kebijakan yang bersifat secara strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan mengenai



antiterorisme, berbeda dengan kebijakan yang lebih efektif jika diimplementasikan secara *bottom-up*, yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung berkenaan dengan *national security*, seperti kebijakan alat kontrasepsi, padi varietas unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan sejenisnya.

Dalam implementasi sebuah kebijakan pilihan yang paling efektif adalah jika kita bisa membuat kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif, artinya bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Model ini biasanya lebih dapat berjalan secara efektif, berkesinambungan dan murah, bahkan dapat juga dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat *national security*.

Dalam penelitian ini pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan secara partisipatif dimana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat direspon dengan baik oleh masyarakat. Satu hal yang paling penting adalah implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Nugroho (2011), pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat? Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Ketepatan pelaksana. Aktor implementasi tidaklah hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
3. Ketepatan target implementasi. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu: a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain; b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak, kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi

target ada dalam kondisi mendukung atau menolak; c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

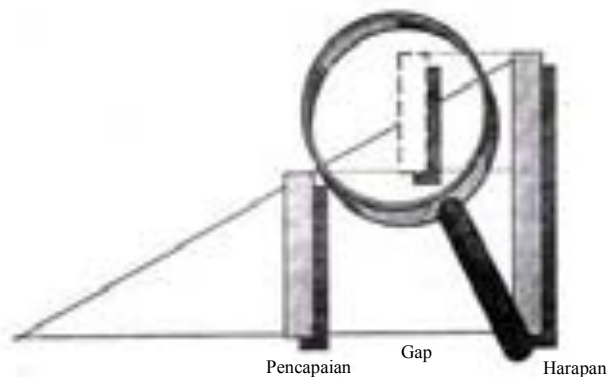
4. Apakah lingkungan implementasi sudah tepat? Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu a) lingkungan kebijakan, merupakan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait; b) lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.
5. Tepat proses. Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu: a) *policy acceptance*, di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; b) *policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan; c) *strategic readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Di kutip dari Nugroho, Riant. 2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan). Edisi Ketiga, Revisi 2011. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

### 2.1.7. Evaluasi Kebijakan

Nugroho (2010:183) menjelaskan sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "evaluasi kebijakan". Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauhmana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan" dengan "kenyataan" seperti yang digambarkan berikut ini :

**Gambar 2.2**  
**Kesenjangan antara Harapan dengan Kenyataan Kebijakan**



Sumber : Nugroho (2010:183)

Dari gambar tersebut tampak bahwa tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Winarno (2012:84) sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasilguna atau tidak. Namun demikian, konsep di dalam konsep evaluasi sendiri selalu terikat konsep kinerja, sehingga evaluasi kebijakan publik pada ketiga wilayah bermakna kegiatan pasca.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik. Menurut William N. Dunn (1999) dalam Nugroho (2010:185) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Jadi, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meski berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dan kebijakan, khususnya implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada perumusan dilakukan pada sisi tindakan, yaitu lebih kepada proses perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya hanya menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

#### **2.1.8. Tujuan Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik

tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2012:132) menyatakan evaluasi kebijakan setidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu : (1) untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya; (2) untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; (3) untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh Pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan.

#### **2.1.9. Metode Evaluasi Kebijakan**

Dalam rangka implementasi kebijakan secara rinci Casley dan Kumar dalam Ekowati (2011:17) menunjukkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah, yaitu membatasi masalah yang akan dipecahkan dan memisahkan dari gejala yang mendukungnya, yaitu dengan merumuskan sebuah hipotesis.
2. Menentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah, dengan mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
3. Mengkaji hambatan dalam pembuatan keputusan dengan menganalisis situasi politik dan organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen.
4. Mengembangkan solusi-solusi alternatif.
5. Memperkirakan/mempertimbangkan solusi yang paling layak, dengan menentukan kriteria yang jelas dan aplikatif untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternative.
6. Memantau secara terus menerus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan selanjutnya.

Jadi berdasarkan definisi tersebut, maka suatu metode evaluasi setidaknya dapat memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat di kritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju, karena sebagaimana telah diketahui bahwa

evaluasi kebijakan merupakan langkah awal untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya.

#### **2.1.10. Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn**

Evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauhmana tujuan telah terealisasikan. Dunn menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai atau efektivitas suatu kegiatan untuk tujuan pembuatan keputusan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Shinkfield dalam Dunn menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan membandingkan tujuan dengan hasil dan juga merupakan kegiatan membandingkan penampilan dengan suatu nilai tertentu. Evaluasi berkenaan dengan suatu kegiatan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Oleh karena itu, evaluasi adalah pernyataan bahwa sesuatu itu mempunyai nilai atau tidak sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan dengan tujuan-tujuan.

Dalam hal ini Dunn dalam Nugroho (2004 : 473) menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kinerja yang berbeda untuk mengevaluasi sejauhmana penilaian terhadap hasil kebijakan yang dilaksanakan. Adapun kriteria-kriteria evaluasi kebijakan tersebut antara lain :

1. Efektifitas, dalam hal ini efektifitas menanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Ini berkenaan dengan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diinginkan, atau mencapai tujuan dari tindakannya. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan. Misal

kebijakan yang efektif adalah kebijakan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan adalah yang bernilai.

2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, efisiensi yang merupakan hubungan antara efektifitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antar efektifitas dan usaha yang terakhir.
3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antar alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.
5. Responsifitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Dimana ini berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.



6. Ketepatan, apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Secara dekat perhubungan dengan rasionalitas, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai dan tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti memilih model evaluasi kebijakan Dunn berdasarkan kriteria yang ada dalam teori tersebut, kriteria ini setidaknya mampu menjawab permasalahan yang terjadi terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

#### **2.1.11. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bersifat partisipator secara luas untuk memajukan keadaan sosial dan kebendaan bagi mayoritas masyarakat melalui perolehan melalui perolehan akan meraka control yang lebih besar terhadap lingkungannya (Nasution, 2004: 84). Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2008: 45) dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pembangunan, mendefinisikan Pembangunan sebagai Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation-building*).

Lebih lanjut menurut Sondang P. Siagian (2002: 42) mengemukakan bahwa dalam hal ini terdapat beberapa ide pokok yang menjadi dasar pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan sebagai suatu perubahan yang mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Pengertian perubahan kearah kondisi yang lebih baik tidak hanya dalam arti yang sempit seperti peningkatan taraf hidup, tetapi juga dalam hal segala aspek kehidupan yang lainnya.
2. Pembangunan diartikan sebagai suatu pertumbuhan. Hal ini menunjukkan kemampuan sekelompok masyarakat untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertumbuhan ini diartikan sebagai suatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Yang meliputi semua aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik yang berjalan seirama dengan keadaan yang saling menunjang.
3. Pembangunan sebagai suatu rangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang bernaung dalam suatu system kemasyarakatan guna mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dalam hal ini diharapkan suatu kesadaran yang tidak hanya terbatas pada suatu kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, melainkan seluruh warga pada semua lapisan dan tindakan serta tumbuh dari dalam diri sendiri, sehingga tercapai keadaan yang lebih baik dengan pertumbuhan yang berlangsung terus menerus.

4. Pembangunan harus didasarkan suatu rencana. Artinya pembangunan itu harus dengan sengaja dan ditentukan secara jelas, tujuan, arah dan bagaimana pelaksanaannya.
5. Pembangunan diharapkan bermuara pada suatu titik akhir tertentu seperti masalah keadilan sosial, kemakmuran yang merata, kesejahteraan material, mental spiritual, dan sebagainya. Namun demikian titik akhir ini mempunyai sifat relative dan sukar untuk dibayangkan pemcapaian titik akhir yang jernih dan absolut sehingga tidak mungkin ditingkatkan lagi. Kenyataannya adalah, selama masih terdapat suatu masyarakat, selama itu pulalah kegiatan-kegiatan pembangunan akan terus dilaksanakan.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2004: 9) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Menurut Todoro dan Smith (2003: 28) proses pembangunan dalam masyarakat paling tidak memiliki tiga tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi sebagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup, yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian

atas nilai-nilai cultural dan kemanusiaan, yang semuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbukan harga diri pada pribadi dan bangsa bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi seluruh individu bangsa secara keseluruhan, yaitu dengan membebaskan mereka dari belitan sikap penghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Sedangkan pengertian lain dari pembangunan, Pembangunan adalah proses mengubah masyarakat di negara-negara berkembang secara terencana, transformatif (menjadi lebih baik), sesuai dengan program-program yang sudah ditentukan secara politik oleh para pengambil kebijakan (<http://www.pustakabersama.net/buku.php>). Beda halnya menurut Gunawan Sumodiningrat (2007: 18) Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera secara adil dan merata. Masyarakat sejahtera ditandai adanya dengan kemakmuran berupa meningkatnya konsumsi masyarakat karena meningkatnya pendapatan.

Dari beberapa definisi dari para ahli mengenai pembangunan, maka dapat disimpulkan pembangunan adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk memenuhi cita-cita yang telah dirangkai secara terencana untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya, dengan kata lain pembangunan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perubahan-perubahan dengan perencanaan-perencanaan yang diawali dengan

perubahan yang mendasar terhadap sikap, mental, struktur, sosial dan lembaga masyarakat yang terlibat.

#### **2.1.12. Pengertian Pembangunan Daerah**

Menurut Abi dan Sektiaji (2003: 24) Pembangunan daerah merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerah. Sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pembangunan nasional, yang didukung oleh berbagai sumber pembiayaan, ketatalaksanaan dan tanggungjawab. Berdasarkan tipologinya pembangunan di daerah dibedakan menjadi :

1. Atas dasar tingkat kepentingan (pembangunan nasional, pembangunan regional dan pembangunan lokal).
2. Atas dasar penyelenggaraannya (pembangunan dalam rangka asasnya desentralisasi, pembangunan dalam rangka asas desentralisasi dan pembangunan dalam rangka asas pembantuan).
3. Atas dasar ciri-cirinya (pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan).
4. Atas dasar pengelolanya (pembangunan oleh pemerintah pusat, pembangunan oleh Dati I, pembangunan oleh Dati II, dan pembangunan oleh masyarakat atau swasta).

Tujuan pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan keadaan ekonomi daerah.
2. Meningkatkan keadaan sosial untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil bagi masyarakat di daerah tersebut.

3. Mengembangkan ragam budaya daerah tersebut.
4. Meningkatkan dan memelihara keamanan masyarakat.
5. Membantu masyarakat pusat mempertahankan, memelihara dan meningkatkan kesatuan bangsa.

Menurut Wiroatmojo (2003: 52) memuat prinsip-prinsip pembangunan daerah yang merupakan bagian rambu-rambu yang telah ditentukan bagi pelaksana pembangunan daerah. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan daerah secara umum sebagai berikut:

1. Tetap berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Tetap menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
3. Demokrasi di semua segi kehidupan bernegara
4. Pemerataan dan keadilan dalam berperan serta pada pembangunan daerah serta dalam memperoleh manfaat yang dihasilkannya
5. Masyarakat kelompok usaha kecil dan kelompok usaha menengah lebih di pacu untuk berperan serta secara aktif pada setiap kegiatan pembangunan
6. Memanfaatkan secara bijaksana semua potensi sumberdaya nasional yang berada di daerah sesuai fungsi dan keadaan masing-masing sumberdaya
7. Sesuai keseragaman keadaan daerah
8. Sesuai kewenangan yang di berikan oleh pemerintah pusat, baik secara desentralisasi, dekonsentrasi maupun dalam rangka perbantuan.

9. Bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang kegiatan yang lain dengan semua daerah lainnya
10. Pemerintah yang baik berarti pemerintah daerah otonom harus dilaksanakan secara tepat guna, efisien dan memiliki produktivitas yang tinggi serta lepas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
11. Investasi disertai ketentuan meningkatkan penggunaan sumberdaya yang dihasilkan dan yang berada di daerah masing-masing agar nilai tambah yang dihasilkan dan adanya investasi tersebut lebih banyak dinikmati masyarakat setempat dan membantu pembangunan daerah.
12. Pelaku pembangunan daerah adalah :
  - a. Pemerintah Daerah
  - b. Masyarakat
  - c. Badan Hukum Swasta
  - d. Pemerintah Provinsi
  - e. Pemerintah pusat dengan dana sendiri atau dana lain, Organisasi Internasional dan negara lain

### **2.1.13. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat dikarenakan kemiskinan bisa terjadi baik di Negara-negara berkembang maupun di Negara-negara yang sudah maju. Kemiskinan di kaitan dengan sebuah permasalahan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Adapun beberapa definisi mengenai kemiskinan dari beberapa tokoh. Kemiskinan menurut Suparlan dalam Umajah, Siti. (2008: 45) bahwa kemiskinan

Suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Dalam arti bahwa Kemiskinan sebagai suatu kondisi hidup serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup yang sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak.

Berbagai teori telah dikembangkan dalam upaya untuk memahami aspek-aspek yang menentukan terjadinya kemiskinan secara lebih mendalam. Keanekaragaman teori yang telah berbasis pada pendekatan sosio-antropologi, khususnya tentang budaya masyarakat. Teori yang berbasis pada teori ekonomi, antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias ke perkotaan, perbedaan kualitas sumberdaya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat atau rendahnya perangsang untuk penanaman modal, namun di sisi lain, pendekatan sosio-antropologis menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural).

Sementara itu, menurut Umajah (2008: 45) menggolongkan kemiskinan ke dalam tiga macam kemiskinan, yaitu :

- a. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena perkembangan tingkat teknologi yang sangat rendah. Termasuk di dalamnya adalah



kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumber daya alam yang tetap.

- b. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan perkataan lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.
- c. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi atau adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta-pesta adat lainnya, termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi kemasa depan.

Banyak terminologi mengenai kemiskinan, tetapi secara umum dapat dinyatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan. Kondisi serba kekurangan tersebut bisa diukur secara bersama dalam suatu anggota masyarakat, dirasakan secara individu, atau secara relatif didasarkan pada perbandingan dengan orang lain, sehingga melahirkan pandangan secara umum, individu maupun relatif tentang kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menyederhanakan bahwa kemiskinan dapat digolongkan ke dalam tiga macam kemiskinan, yaitu Kemiskinan Alamiah, Kemiskinan Struktural dan Kemiskinan kultural.

Dalam buku Ilmu Sosial Dasar karangan Hartomo Dkk(2001:329) bahwa timbulnya kemiskinan adalah:

1. Pendidikan yang terlampau rendah yaitu dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas bekerja yaitu sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena masalah ini menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang.
3. Keterbatasan sumber alam yaitu kemiskinan akan melanda masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakatnya.
4. Keterbatasan lapangan pekerjaan yaitu akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara faktual karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik berupa skill maupun modal.
5. Beban keluarga yaitu semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak atau meningkat pula tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Menurut badan Pusat Statistik (BPS) dan BKKBN Tahun 2015 bahwa kriteria masyarakat miskin terdiri atas 14 kriteria. Adapun kriteria tersebut dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Rumah Tangga Miskin**

No	Rumah Tangga Sangat Miskin
1	Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m <sup>2</sup> perorang
2	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3	Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari terbuat bambu
4	Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lainnya
5	Tidak menggunakan aliran listrik Tidak menggunakan aliran listrik
7	Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
8	Hanya sanggup makan sebanyak 1 /2 x dalam sehari
9	Mengonsumsi daging/susu/ayam 1x dalam seminggu
10	Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
11	Tidak sanggup membayar pengobatan dipuskesmas atau poliklinik
12	Sumber penghasilan rumah tangga adalah dibawah Rp 600.000 perbulan
13	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual
15	Masih memiliki balita, ada ibu hamil atau menyusui serta memiliki anggota keluarga yang harus/belum sekolah sampai SLTP

Sumber : Badan Pusat Statistik dan BKKBN (Secara Umum), Tahun 2012.

Sedangkan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 adalah merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkat :

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran; dan/atau penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman sebagaimana fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Tangerang.

## **2.1.14. Rumah Sederhana Sehat**

### **2.1.14.1. Pengertian Rumah Sederhana Sehat**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang sapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan (Kamus Besar BI, 2002: 999). Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya (Kamus Besar BI, 2002: 893). Sedangkan pengertian rumah adalah sebagai tempat untuk berlindung atau bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya (matahari, hujan, dll). Serta merupakan tempat beristirahat setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pengertian rumah juga dapat ditinjau lebih jauh secara fisik dan psikologis.

#### **1. Secara Fisik**

Dari segi fisik rumah berarti suatu bangunan tempat kembali dari berpergian, bekerja, tempat tidur, dan beristirahat memulihkan kondisi fisik dan mental yang letih dari melaksanakan tugas sehari-hari.

#### **2. Secara Psikologis**

Ditinjau dari segi psikologis rumah berarti suatu tempat untuk tempat tinggal dan untuk melakukan hal-hal tersebut diatas, yang tentram, damai, menyenangkan bagi penghuninya. rumah dalam pengertian psikologis ini lebih mengutamakan situasi dan suasana daripada kondisi dan keadaan fisik rumah itu sendiri.

Rumah tinggal sederhana adalah tempat tinggal berlantai satu untuk berlindung dan bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya yang secara fisik tidak mengandung unsur-unsur kemewahan, namun tidak juga menyampingkan keindahan atau estetika (rizkikharudinakbar.blogspot.com).

#### **2.1.14.2. Gambaran Umum Konsep Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat)**

Dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia melalui penyediaan perumahan secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sangat rendah dan kelompok berpenghasilan informal, maka diperlukan upaya penyediaan perumahan murah yang layak dan terjangkau akan tetapi tetap memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, dan Kenyamanan.

Di dalam Pedoman Penyusunan Standard Rumah Layak Huni (2012 : 16) dijelaskan bahwa :

1. Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) yaitu rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal, dan cara hidup.
2. Sasaran penyediaan Rumah Sederhana Sehat yaitu bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya pemenuhan penyediaan Rumah Sederhana Sehat masih menghadapi kendala, berupa rendahnya tingkat kemampuan masyarakat, mengingat harga Rumah Sederhana Sehat masih belum memenuhi keterjangkauan secara menyeluruh.

Untuk itu perlu disediakan disain rumah antara yang pertumbuhannya diarahkan menjadi Rs Sehat. Rumah antara yang dimaksud adalah Rumah Inti

Tumbuh (RIT), yaitu rumah yang hanya memenuhi standar kebutuhan minimal rumah. Adapun kriteria Rumah Inti Tumbuh (RIT) di Pedoman Penyusunan Standard Rumah Layak Huni (2012 : 17), yaitu :

1. RIT memiliki ruang paling sederhana yaitu sebuah ruang tertutup dan sebuah ruang terbuka beratap dan fasilitas MCK.
2. RIT memiliki bentuk atap dengan mengantisipasi adanya perubahan yang bakal dilakukan yaitu dengan memberi atap pada ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang serba guna.
3. Bentuk generik atap pada RIT selain pelana, dapat berbentuk lain (limasan, kerucut, dip sesuai dengan tuntutan daerah bila itu ada.
4. Penghawaan dan pencahayaan alami pada RIT menggunakan bukaan yang memungkinkan sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari.

Oleh karena itu, dalam proses pengembangan RIT menjadi Rs Sehat memberi peluang peran calon penghuni/penghuni dalam mengekspresikan kebutuhan pengungkapan jati diri. Sehingga akan mengurangi peluang terhadap pembongkaran bagian-bagian bangunan secara besar-besaran.

#### **2.1.14.3. Aspek-Aspek Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat)**

Rumah sederhana sehat memungkinkan penghuni untuk dapat hidup sehat dan menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara layak. Kebutuhan ruangan minimum pada rumah sederhana sehat sebagai tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan yang dipengaruhi oleh 3( aspek), yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu udara dan kelembaban dalam ruangan.

Aspek-aspek tersebut merupakan dasar atau kaidah perencanaan rumah sehat dan nyaman. Menurut keterangan yang dijelaskan dalam Pedoman Penyusunan Standard Rumah Layak Huni (2012 : 12) bahwa aspek-aspek tersebut adalah :

## 1. Pencahayaan

Matahari sebagai potensi terbesar yang dapat digunakan sebagai pencahayaan alami pada siang hari. Pencahayaan yang dimaksud adalah penggunaan terang langit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- d. Cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan;
- e. Ruang kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya;
- f. Ruang kegiatan mendapatkan distribusi cahaya secara merata.

Kualitas pencahayaan alami siang hari yang masuk ke dalam ruangan ditentukan oleh:

- a. kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata);
- b. Lamanya waktu kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata);
- c. Tingkat atau gradasi kekasaran dan kehalusan jenis pekerjaan;
- d. Lubang cahaya minimum sepersepuluh dari luas lantai ruangan,
- e. Sinar matahari langsung dapat masuk ke ruangan minimum 1 (satu) jam setiap hari; dan
- f. Cahaya efektif dapat diperoleh dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00.

Nilai faktor langit tersebut akan sangat ditentukan oleh kedudukan lubang cahaya dan luas lubang cahaya pada bidang atau dinding ruangan. Semakin lebar bidang cahaya ( $L$ ), maka akan semakin besar nilai faktor langitnya. Tinggi ambang bawah bidang bukaan (jendela) efektif antara 70 — 80 cm dari permukaan lantai ruangan. Nilai faktor langit minimum dalam ruangan pada Siang hari tanpa bantuan penerangan buatan, akan sangat dipengaruhi oleh:

- a. Tata letak perabotan rumah tangga, seperti lemari, meja tulis atau meja makan; dan
- b. Bidang pembatas ruangan, seperti partisi, tirai masif

## 2. Penghawaan

Udara merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bernafas sepanjang hidupnya. Udara akan sangat berpengaruh dalam menentukan kenyamanan pada bangunan rumah. Kenyamanan akan memberikan kesegaran terhadap penghuni dan terciptanya rumah yang sehat, apabila terjadi pengaliran atau pergantian udara secara kontinyu melalui ruanganruangan, serta lubang-lubang pada bidang pembatas dinding atau partisi sebagai ventilasi.

Agar diperoleh kesegaran udara dalam ruangan dengan cara penghawaan alami, maka dapat dilakukan dengan memberikan atau mengadakan peranginan silang (ventilasi silang) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lubang penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan.
- b. Udara yang mengalir masuk sama dengan volume udara yang mengalir keluar ruangan.
- c. Udara yang masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi/WC.

Khususnya untuk penghawaan ruangan dapur dan kamar mandi/WC, yang memerlukan peralatan bantu elektrik-mekanikal seperti blower atau exhaust fan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan bangunan



disekitarnya.

- b. Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan ruangan kegiatan dalam bangunan seperti: ruangan keluarga, tidur, tamu dan kerja.

### **3. Suhu udara dan kelembaban**

Rumah dinyatakan sehat dan nyaman, apabila suhu udara dan kelembaban udara ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia normal. Suhu udara dan kelembaban ruangan sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan pencahayaan. Penghawaan yang kurang atau tidak lancar akan menjadikan ruangan terasa pengap atau sumpek dan akan menimbulkan kelembaban tinggi dalam ruangan.

Untuk mengatur suhu udara dan kelembaban normal untuk ruangan dan penghuni dalam melakukan kegiatannya, perlu memperhatikan:

- a. Keseimbangan penghawaan antara volume udara yang masuk dan keluar.
- b. Pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak bergerak.
- c. Menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai ruangan.

### **4. Kebutuhan Minimal Keamanan dan Keselamatan**

Pada dasarnya bagian-bagian struktur pokok untuk bangunan rumah tinggal sederhana adalah: pondasi, dinding (dan kerangka bangunan), atap serta lantai. Sedangkan bagian-bagian lain seperti langit-langit, talang dan sebagainya merupakan estetika struktur bangunan saja.

a. Pondasi

Secara umum sistem pondasi yang memikul beban kurang dari dua ton (beban kecil), yang biasa digunakan untuk rumah sederhana dapat dikelompokkan kedalam tiga sistem pondasi, yaitu: pondasi langsung; pondasi setempat; dan pondasi tidak langsung.

Sistem pondasi yang digunakan pada Rumah Inn Tumbuh (RIT) dan pengembangannya dalam hat ini Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) ini adalah sistem pondasi setempat dari bahan pasangan batu kali atau pasangan beton tanpa tulangan dan sistem pondasi tidak langsung dari bahan kayu ulin atau alam.

b. Dinding

Bahan dinding yang digunakan untuk RIT dan pertumbuhannya adalah conblock, papan, setengah conblock dan setengah papan atau bahan lain seperti bambu tergantung pada potensi bahan yang dominan pada daerah dimana rumah ini akan dibangun. Ukuran conblock yang digunakan harus memenuhi SNI PKKI NI-05

Untuk dinding papan harus dipasang pada kerangka yang kokoh, untuk kerangka dinding, digunakan kayu berukuran 5/7 dengan jarak maksimum 100 cm. Kayu yang digunakan baik untuk papan dan balok adalah kayu kelas kuat dan awet II. Apabila untuk kerangka digunakan kayu balok berukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Jarak tiang rangka kurang lebih 150 cm. Papan yang digunakan dengan ketebalan minimal 2 cm setelah diserut dan

sambungan dibuat alur lidah atau sambungan lainnya yang menjamin kerapatan.

Ring-balok dan kolom dari kayu balok berukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Hubungan antara kolom dengan ringbalok dilengkapi dengan sekur-sekur dari kayu 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Panjang sekur maksimum 50 cm menggunakan kayu, baik untuk rangka bangunan maupun untuk dinding dan pondasinya.

c. Kuda-kuda

Rumah sederhana sehat ini menggunakan atap pelana dengan kudakuda kerangka kayu dengan kelas kuat dan awet 11 berukuran 5/10 atau yang banyak beredar dipasaran dengan ukuran sepadan. Disamping sistem sambungan kuda-kuda tradisional yang selama ini sudah digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemasangan kerangka kuda-kuda disarankan menggunakan sistem kuda-kuda papan paku yaitu pada setiap titik simpul menggunakan klem dari papan 2/10 dan kayu dengan kelas yang sama dengan rangka kuda-kudanya.

Khusus untuk rumah tembok dengan konstruksi pasangan, dapat menggunakan kuda-kuda dengan memanfaatkan ampig tembok yang disekelilingnya dilengkapi dengan ring-balok konstruksi beton bertulang. Kerniringan sudut atap harus mengikuti ketentuan sudut berdasarkan jenis penutup atap yang digunakan, sesuai dengan spesifikasi yang dikeluarkan

oleh pabrik atau minimal 200 untuk pertimbangan kenyamanan ruang didalamnya.

#### **2.1.14.4. Tipologi Rumah Sederhana Sehat**

Rumah Sederhana adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Luas kapling ideal, dalam arti memenuhi kebutuhan luas lahan untuk bangunan sederhana sehat baik sebelum maupun setelah dikembangkan.

Secara garis besar perhitungan luas bangunan tempat tinggal dan luas kapling ideal yang memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan kenyamanan bangunan seperti berikut; Kebutuhan ruang minimal menurut perhitungan dengan ukuran Standar Minimal adalah 9 m<sup>2</sup>, atau standar ambang dengan angka 7,2 m<sup>2</sup> per orang.

Sebagai konsepsi dasar kedua perhitungan tersebut masih digunakan dengan tetap mempertimbangkan bentuk akhir rumah pasca pengembangan. Sehingga dari hasil perhitungan di atas didapat luas bangunan awal (RIT) adalah 21 m<sup>2</sup> dengan pertimbangan dapat dikembangkan menjadi 36 m<sup>2</sup> bahkan pada kondisi tertentu dimungkinkan memenuhi standar ruang Internasional.

#### **2.1.15. Kampung Kumuh**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan mengenai terminologi yang berkaitan dengan kampung kumuh secara singkat. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pengertian tentang kampung kumuh

mengingat kebijakan pemerintah Kota Tangerang terkait dengan pembangunan rumah sederhana sehat erat kaitannya dengan kondisi dan keadaan kampung kumuh.

Untuk memahami tentang pengertian kampung kumuh, bagian ini diawali dengan uraian mengenai pengertian kampung dan pengertian kumuh. Selanjutnya diuraikan mengenai pengertian kampung kumuh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1990) dalam Review Strategi Penataan Penataan Kampung Kumuh (2010 : 1) pengertian kampung adalah desa, dusun atau kelompok rumah-rumah yang merupakan bagian kota dan biasanya rumah-rumahnya kurang bagus. Dalam Kamus Tata Ruang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia tahun 1997, pengertian kampung adalah kelompok rumah yang menempati wilayah tertentu dan merupakan bagian dari kecamatan.

Kampung-kampung di daerah perkotaan Indonesia sering dianggap identik dengan istilah *slum* (perkampungan yang miskin dan kotor) atau *squatter settlement* (perkampungan Liar), padahal tidak selamanya benar. Krausse (1975) yang dikutip dalam Review Strategi Penataan Penataan Kampung Kumuh (2010 : 1) secara spesifik menyatakan: "*The Kampung is a residential segmen of the city that is characterized by substandard living space of the population*". Kampung merupakan suatu kesatuan masyarakat tradisional dengan kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan umumnya berlokasi disekitar pusat kota.

Kumuh diartikan sebagai kesan atau gambaran keadaan yang kotor (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990). Dalam Kamus Tata Ruang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia tahun 1997, pengertian kumuh adalah mengandung sifat-sifat keusangan yang banyak ditujukan kepada keadaan guna lahan atau zona atau kawasan yang sudah sulit diperbaiki lagi sehingga lebih baik dibongkar; atau dapat juga ditujukan kepada keadaan yang secara fisik masih cukup baik, belum tua, tapi sudah tidak lagi memenuhi berbagai standar kelayakan.

Herbert J. Gans (dalam Clinard, 1968: hal 6) dalam Review Strategi Penataan Penataan Kampung Kumuh menggambarkan tentang kumuh dengan kalimat: *"Obsolescence per se is not harmful and designation of an area as a slum for the reason alone is merely a reflection of middle class standards and middle class incomes"*. Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup baik dilihat dari aspek fisik maupun aspek sosial masyarakat. Kumuh juga dapat merupakan akibat dari suatu perkembangan yang dicirikan oleh gejala-gejala seperti: kondisi perumahan yang buruk, penduduk yang terlalu padat, fasilitas lingkungan yang kurang memadai, tingkah laku menyimpang, dan budaya apatis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pengertian rumah kumuh dapat dilihat dari kriteria rumah tidak layak huni,

yaitu: bentuk dinding yang terbuat dari bilik dan tidak memiliki jendela, tiang yang miring, atap yang tidak bisa diperbaiki karena kemampuan ekonomi, lantai yang masih berupa tanah, kamar mandi tidak layak, dan penghuni melebihi kapasitas. Sedangkan rumah tidak layak huni menurut BPS mempunyai kriteria: luas lantai atau rumah kurang dari delapan meter persegi ( $<8 \text{ m}^2$ ), lantai masih berupa tanah, berdinding bambu, belum mempunyai jamban, dan belum menggunakan penerangan listrik.

Jadi, dari uraian definisi konsep di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kampung kumuh dapat diartikan sebagai kelompok rumah yang menempati wilayah tertentu di mana rumah dan kondisi hunian masyarakatnya sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah layak huni, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Kampung kumuh sebagaimana dimaksud, yaitu suatu kawasan pemukiman ataupun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kampung kumuh dapat berupa kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman yang oleh penduduk miskin berpenghasilan rendah diambil untuk dijadikan tempat tinggal, seperti bantaran sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong dan ataupun di bawah kolong jembatan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana di Kota Tangerang. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis baca, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moch. .Fatir, Universitas Diponegoro Semarang, 2010 dengan judul *Evaluasi Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama se- Kecamatan Petir*. Dalam penelitiannya peneliti tersebut menjelaskan bahwa masyarakat kurang berperan dalam pengembangan pendidikan melalui komite sekolah yang seharusnya dibentuk karena adanya komitmen yang tinggi dari para tokoh masyarakat terhadap pengembangan dunia pendidikan bukan hanya sekedar formalitas, yakni untuk memperoleh persyaratan dana *Block Grant*, sehingga mengikuti apa yang diminta oleh sekolah. Dalam hal ini pun komite sekolah kurang menjalankan perannya sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak sekolah. Padahal peningkatan mutu pendidikan sangat bergantung pada kondisi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dukungan fasilitas pembangunan pendidikan merupakan prasyarat utama keberhasilan suatu pendidikan.



Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulandari, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2013, yang berjudul Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunah (BLT) Dalam Rangka Menurunkan Angka Kemiskinan di Kecamatan Haur Geulis Kabupaten Kuningan. Dalam penetiannya peneliti menjelaskan bahwa hasil penelitian ini Sebagai suatu program dan kebijakan pembangunan nasional, program BLT mempunyai latar belakang pelaksanaan yang sistematis, baik secara deskriptif, operasional perundang-undangan. Dari sudut deskriptif analisis kondisional dapat dikatakan bahwa program BLT adalah wujud dari masalah di seluruh pemerintah negara-negara seperti di Indonesia. Dimana kemiskinan adalah suatu masalah yang sangat penting dan genting untuk diperhatikan dan ditangani secara serius.

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Miftahus Surur, STKIP Jombang, 2011, yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Rejoagung Ploso Jombang). Dalam penelitian tersebut disimpulkan oleh peneliti bahwa pemerintah desa seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Karena masyarakat merupakan bagian dari suksesnya program kegiatan yang ada didesa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar yang menjadi cita-cita yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan.

### 2.3. Kerangka Berfikir

Menurut Sugiyono (2007: 60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar-variable yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Raan berpendapat bahwa berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variable yang diteliti. Sedangkan, Uma Sekaran (Sugiyono, 2007: 65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berfikir juga merupakan alur berpikir dalam penelitian, untuk mendeskripsikan dengan apa adanya sesuai temuan yang peneliti dapatkan di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

Pada saat melakukan pengamatan dan observasi langsung di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang peneliti mendapatkan informasi mengenai masih adanya hambatan dan kesulitan dalam pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

Oleh karena itu, metode pendekatan evaluasi kebijakan yang dikemukakan Dunn diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan,

analisis menggunakan tipe kinerja ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauhmana dampak yang dirasakan dari hasil kebijakan tersebut.

Adapun kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan dari model teori Dunn (Nugroho, 2008:473) meliputi :

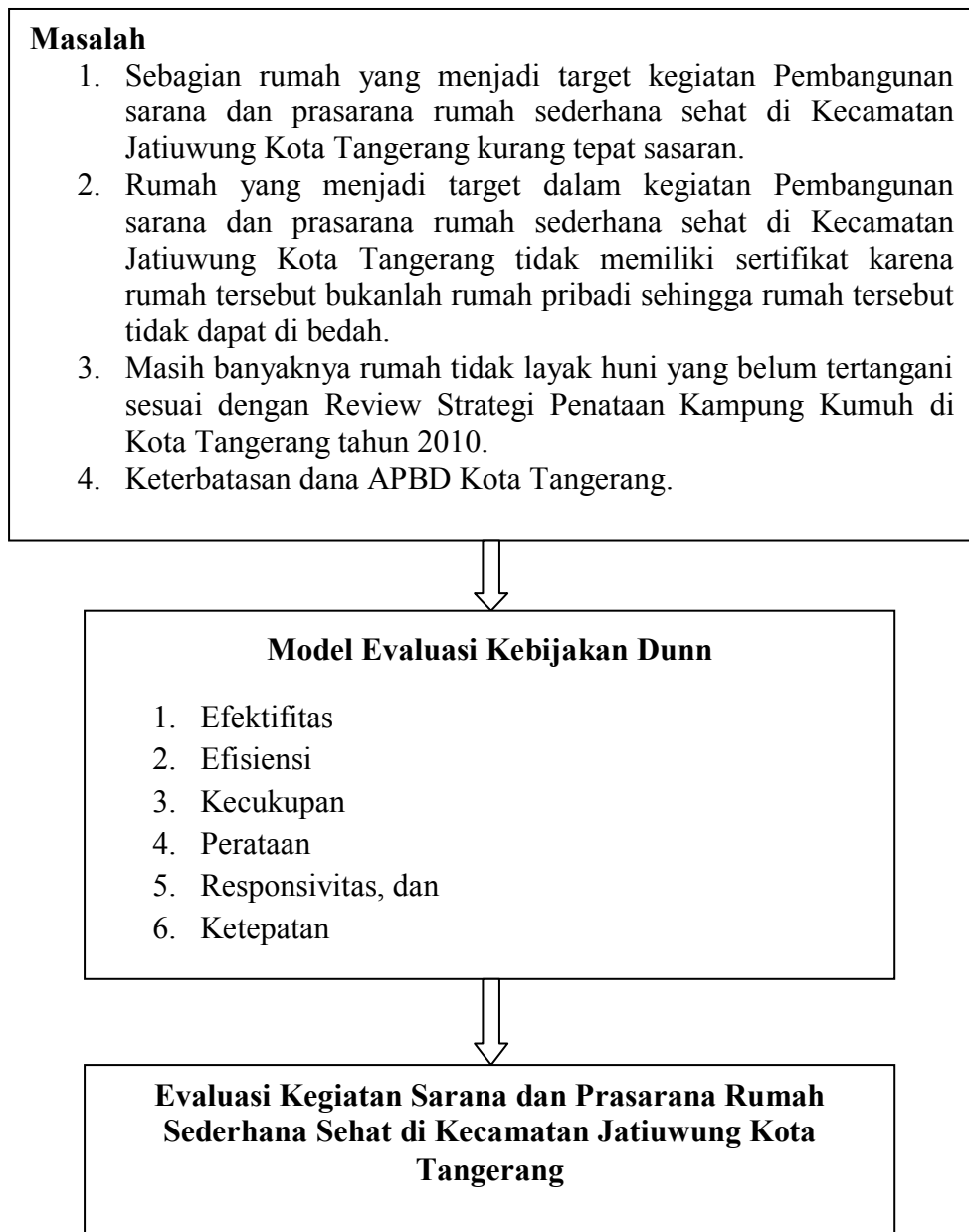
1. Efektifitas;
2. Efisiensi;
3. Kecukupan;
4. Perataan;
5. Responsivitas, dan
6. Ketepatan.

Kerangka berpikir ini menjelaskan bagaimana teori evaluasi kebijakan menurut Dunn digunakan untuk menganalisa Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang. Tujuan dari penetapan konsep teori ini yaitu untuk mengevaluasi sejauhmana dampak atau manfaat yang dirasakan atas kebijakan tersebut.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori ini karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan dalam teori Dunn. Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Karena pelaksanaan program tersebut dibutuhkan evaluasi lebih lanjut, sehingga kebijakan atas program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang dapat terealisasi sesuai dengan harapan masyarakat khususnya

masyarakat di Kecamatan Jatiuwung yang sudah semestinya mendapat bantuan dari pemerintah atas program yang diselenggarakannya.

**Gambar 2.3**  
**Bagan Kerangka Berfikir**



#### 2.4. Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan sebuah persepsi awal peneliti terhadap objek yang diteliti. Asumsi dasar yang disimpulkan dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat atau bedah rumah Kota Tangerang mendapat bantuan berupa rehab total/sebagian bangunan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, akan tetapi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kelurahan Jatake dan Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, peneliti menemukan beberapa masalah, sehingga kegiatan pembangunan ini kurang berjalan optimal. Menurut hal yang dituturkan oleh Ibu Linda Donarika Marbun, ST, MT pada saat itu sebagai Kasi bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang bahwa :  
-Berdasarkan review kampung kumuh yang disusun oleh BAPPEDA Kota Tangerang ada 57 rumah tidak layak huni, inilah yang menjadi salah satu kendala kami selaku pelaksana dalam menjalankan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, karena keterbatasan dana APBD Kota Tangerang, maka di tahun 2012 kemarin kami hanya bisa merehab 14 rumah”.

Oleh karena itu, untuk mendukung keterlaksanaanya program pembangunan ini, maka Pemerintah perlu menyiapkan dana khusus untuk menjalankan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang agar pembangunan selanjutnya dapat dilaksanakan secara merata dan tidak ada kesenjangan di masyarakat khususnya di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

Berdasarkan asumsi awal yang dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian mengenai Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana Sehat di Kota Tangerang ini, menurut Bungin (2012 : 76) bahwa : “Titik tolak penelitian bertumpu pada pada minat untuk mengetahui masalah atau fenomena sosial yang timbul karena berbagai rangsangan dan bukan pada metodologi penelitian. Sekalipun demikian tetap harus diingat bahwa metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian”. Oleh karena itu, penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui keadaan atau status tertentu dan berusaha menggambarkan fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Fuad dan Nugroho (2014 : 54) mendefinisikan bahwa : “Metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan ini mengarah kepada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penggunaan metode kualitatif dilaksanakan sesuai

karakteristik yang ada yaitu secara langsung terlibat di lokasi penelitian. Sebagaimana dipertegas oleh Muhadjir dalam Fuad dan Nugroho (2014 : 54 bahwa : “Penelitian kualitatif menekankan proses daripada hasil dari obyek penelitiannya”. Jadi, mendefinisikan metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kelurahan Jatake dan Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

### **3.3. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tangerang. Adapun subyek Penelitian adalah instansi pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, yaitu dengan cara mencari informan yang ada di instansi tersebut yang termasuk ke dalam wilayah penelitian ini.

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis dalam hal ini Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat. Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diselenggarakan selama ini oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang.



### **3.4. Fenomena Yang Diamati**

#### **3.4.1. Definisi Konsep**

Untuk mengetahui masalah dalam penelitian mengenai Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, maka teori yang digunakan adalah kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan dari model teori Dunn (Nugroho, 2008:473). Berikut adalah kriteria evaluasi kebijakan tersebut meliputi :

1. Efektifitas. Efektifitas merupakan suatu bentuk kriteria yang di dalamnya terdapat pencapaian suatu hasil yang dicapai. Dalam hal ini ilustrasi yang digunakan yaitu pencapaian sebuah target pembangunan sejalan dengan kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Banten.
2. Efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang telah dilakukan di dalam mencapai hasil yang diinginkan dari kegiatan pembangunan tersebut.
3. Kecukupan. Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria pula di dalam proses evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
4. Perataan. Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan pembangunan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan.

5. Responsivitas. Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan.
6. Ketepatan. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan atas pembangunan yang dilaksanakan.

### **3.4.2. Definisi Operasional**

Mengacu dari definisi konsep serta teori yang digunakan sebagai alat penelitian ini yaitu berdasarkan kriteria evaluasi yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dengan dimensi sebagai berikut:

1. Efektifitas terdiri dari dimensi, yaitu pencapaian target kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Efisiensi terdiri dari dimensi, yaitu ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan kecepatan pelaksanaan kegiatan.
3. Kecukupan terdiri dari dimensi kepuasan, tingkat kebutuhan dan kecukupan pengawasan.
4. Perataan terdiri dari dimensi, yaitu jenis manfaat yang diperoleh, perataan output yang dihasilkan.
7. Responsivitas terdiri dari dimensi, yaitu memberikan hasil yang baik, kemudahan, pihak terkait tanggap terhadap proses kegiatan tersebut.
8. Ketepatan terdiri dari dimensi, yaitu ketepatan sosialisasi dan ketepatan antara tujuan dan manfaat.

### 3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian tentang evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Irawan dalam Moleong (2012 :19) dijelaskan bahwa : “Dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi instrumen terpenting adalah peneliti sendiri”. Sedangkan menurut Moleong, penceritahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Lain halnya dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Furchan, Arif dan Agus Maimun.(2013:33) menurutnya:

Sebagai peneliti kualitatif, tugas anda adalah menembus pengertian akal sehat (*commonsense understanding*) tentang kebenaran dan kenyataan. Apa yang kelihatannya keliru atau tidak konsisten menurut perspektif dan logika anda, mungkin menurut subyek anda tidak demikian. Dan, kendati anda tidak harus sependapat dengan pandangan subyek terhadap dunia ini, anda harus dapat mengetahui, menerima dan menyajikan pandangan mereka itu sebagaimana mestinya.

Menurut Prasetya dalam bukunya penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu social (2010:17) bahwa :

Peneliti sebagai instrument ini (disebut *participant-observer*) yaitu :

1. Peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada objek/subjek yang ditelitinya.
2. Peneliti akan mampu melakukan kapan menyimpulkan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan.
3. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara *gradual*“ membangun” pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal.

Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa sebagai sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus

penelitian, bahan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

### **3.6. Informan Penelitian**

Menurut Morse dalam Denzin K (2010:289) dijelaskan bahwa : “Seorang informan yang baik adalah seorang yang mampu menangkap, memahami, dan memenuhi permintaan peneliti, memiliki kemampuan reflektif, bersifat artikulatif, meluangkan waktu untuk wawancara, dan bersemangat untuk berperan serta dalam penelitian”. Penentuan informan dalam penelitian mengenai evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang menggunakan teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan).

Menurut Bungin, burhan dalam bukunya analisis data penelitian kualitatif (2012:53) bahwa : “Prosedur sampling yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi social tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian”.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

**Tabel 3.1**  
**Sumber Data Informan**

No	Informan	Keterangan
I	Instansi a. Linda Donarika Marbun,ST,MT Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang b. Rusianto Lurah Kelurahan Jatake c. Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang	<i>Key Informant</i>  <i>Key Informant</i>  <i>Key Informant</i>
II	Masyarakat a. Ketua RT/W 1. Moch. Sadeli Ketua RT. 03/RW. 04 2. Nurman Ketua RT. 01/RW. 04 3. Nana Supriatna Ketua RT. 04 / RW. 05 b. Warga Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang ; 1. Kelurahan Jatake a. Emong b. Saepi 2. Kelurahan Alam Jaya a. Mustopa b. Rumsinah c. Muhammad Iksan d. Supriyono e. Syahrup	<i>Secondary Informant</i>          <i>Secondary Informant</i>

Sumber: Peneliti, 2016.

### 3.7. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Loflang dalam Moleong (2005 : 157) mendefinisikan bahwa : “Sumber data utama atau primer dalam penelitian

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan atau data sekunder seperti dokumen, gambar dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan data berupa panduan wawancara, buku catatan, kamera digital dan alat perekam (*handphone*)”.

### **3.7.1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer, yaitu melalui studi lapangan (*Field Research*). Studi lapangan ini adalah untuk memperoleh data primer yang akan dilakukan melalui metode wawancara (*interview*) yang dilakukan secara langsung kepada informan untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan. Data yang dimaksud, yaitu dari para pelaksana kebijakan yang ada di pemerintah Kota Tangerang terkait dengan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan selama ini oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Untuk memperoleh data primer, sumber data ini diperoleh melalui :

##### **a. Pengamatan/Observasi**

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang secara umum dikenal dengan pengamatan langsung di lapangan. Menurut Spradley

dalam Mukhtar (2010 : 88) menyatakan bahwa : “Observasi dalam penelitian kualitatif lebih baik dilakukan secara langsung yang dikenal dengan *partisipan observation*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga orisinitas dan akurasi data yang diperoleh di lapangan”. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi.

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti apa yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Mukhtar (2010 : 93) sebagai berikut:

Pertama, tehnik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, tehnik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian Sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang Berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan diperoleh dari data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti. Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan. Kelima, tehnik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana tehnik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Oleh karena itu, observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi. Metode wawancara menurut Irawan dalam Fuad dan Nugroho (2014 : 61) adalah : “Suatu alat pengumpulan data yang digunakan dengan instrumen lainnya, tetapi sebagai metode wawancara merupakan satu-satunya alat yang diperlukan berpusat pada informan”. Melalui wawancara ini peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*indepth interview*) karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti informan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan, informan cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, dan informan dapat menceritakan sesuatu yang terjadi dimasa silam dan masa mendatang. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan.

Oleh karena itu, melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interview. Interview pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah :



- 1) Buku catatan : untuk mencatat percakapan dengan sumber data.
- 2) Alat perekam : untuk merekam semua data baik percakapan atau dokumentasi foto, karena jika hanya menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan.

Adapun pedoman wawancara yang digunakan peneliti mengacu pada teori Evaluasi Kebijakan Dunn dalam Nugroho (2004 : 473) bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari

1. Efektifitas, dalam hal ini efektifitas menanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kecukupan, seberapa jauh hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata.
5. Responsifitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
6. Ketepatan, apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Wawancara**

No.	ASPEK	INDIKATOR	INFORMAN
1.	Efektifitas, dalam hal ini efektifitas menanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai	- Pencapaian target kegiatan	Instansi : Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang dan Kasubag Perencanaan Kota Tangerang Masyarakat : Ketua RT. 03/04 dan Ketua RT. 01/04 Kel. Alam Jaya

		- Pelaksanaan kegiatan	Instansi : Lurah Jatake, Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dan Ketua RT/RW 04 Kel. Jatake
2.	Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan	Instansi : Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang dan Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dan masyarakat di RT. 03/04 Kel. Alam Jaya dan masyarakat RT. 04/05 Kel. Jatake
		- Kecepatan	Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Lurah Jatake dan Masyarakat RT. 01/04 Kel. Alam Jaya
3.	Kecukupan, seberapa jauh hasil yang diinginkan memecahkan masalah	- Kepuasan	Masyarakat : Warga RT. 03.04 Kel. Alam Jaya dan warga RT.04/05 Kel. Jatake
		- Tingkat kebutuhan	Masyarakat : Warga RT. 01/04 Kel. Alam Jaya
		- Kecukupan Pengawasn	Instansi : Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang dan Lurah Jatake

4.	Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata	- Perataan manfaat	Warga : Ketua RT dan warga 03/04 Kel. Alam Jaya
		- Perataan output yang dihasilkan	Instansi : Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang dan Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
5	Responsifitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu	- Memberikan hasil yang baik	Instansi : Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang Warga RT. 03/04 Kel. Alam Jaya
		- Kemudahan	Instansi : Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dan Masyarakat RT. 01/04 Kel. Alam Jaya
		- Tanggap	Instansi : Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang
6	Ketepatan, apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	- Ketepatan sosialisasi	Instansi : Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dan Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang Warga RT. 03/04 Kel. Alam Jaya

		- Ketepatan antara tujuan dan manfaat	Ketua RT. 03/04 Kel. Alam Jaya
		- Ketepatan manfaat terhadap bangunan	Instansi Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang dan Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
		- Ketepatan manfaat terhadap lingkungan	Ketua RT. 04/05 Kel. Jatake

Sumber: Peneliti, 2016.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Tujuannya adalah untuk memperoleh data sekunder yang akan dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip, sampai bahan-bahan dan informasi, literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan membahas tentang evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

### 3.7.2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan pengerjaan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi dan penyajian data sampai pada tahap penarikan kesimpulan/verifikasi.

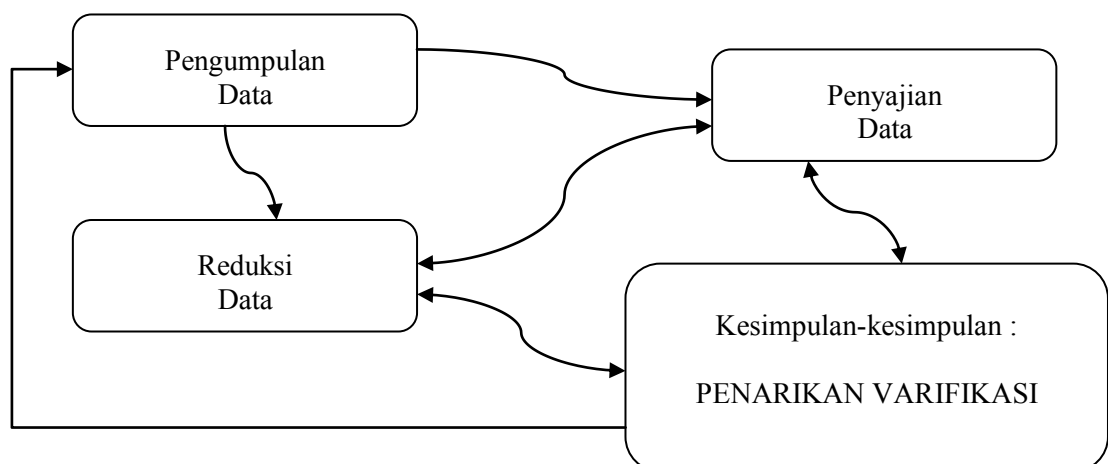
Menurut Sugiyono (2007:244) dikemukakan :

Analisis data penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Oleh karena itu, data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai masalah penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1992:16) dalam Denzin (2012:592) yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data dalam Model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan Kesimpulan-kesimpulan yang terdiri dari penarikan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Proses dari analisis data tersebut digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Analisis Data Menurut Miles & Huberman**



Dari gambar 3.1 diatas maka dapat diuraikan tiga kegiatan dalam proses analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Huberman, dalam Denzin (2012:593) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulismemo). Reduksidata/ proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Denzin (2012:593) bahwa penyajian data (*data display*) sebagai konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan synopsis, dan deskripsi singkat.

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

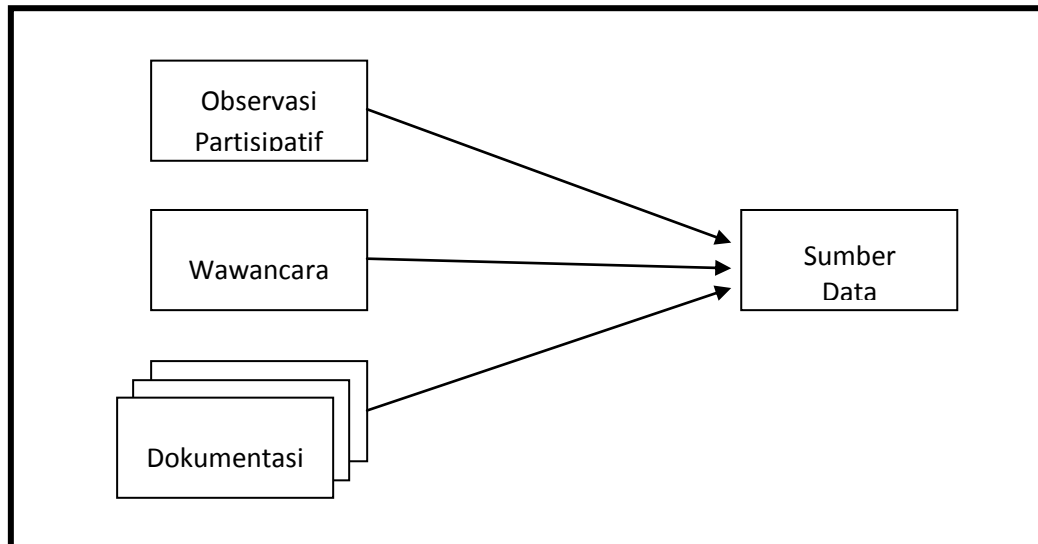
Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses interpretasi; penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang digunakan semakin banyak seperti: merumuskan pola dan tema, pengelompokan, dan penggunaan Triangulasi, mencari kasus-kasus negative, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek silang dengan hasil responden.

### **3.8. Pengujian Keabsahan Data**

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif data bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula.

Menurut Fuad dan Nugroho (2014 : 19) berpendapat : “Triangulasi merupakan salah satu cara langkah penting dalam melakukan uji kredibilitas data”. Sebagaimana dipertegas oleh pendapat Wiliam dalam Mukhtar (2010:165) menjelaskan : “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 3.2**  
**Komponen Teknik Triangulasi**



Ada pun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi sumber dan teknik, yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut,berulang dan terus-menerus sampai dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.



### 3.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Adapun jadwal penelitian direncanakan dan dimulai dari April 2014 s/d Agustus 2016 seperti digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian**

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
	2014	2015	2016							
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts
Pengajuan Judul Skripsi										
Observasi Awal										
Penyusunan Proposal										
Perbaikan & Bimbingan										
Seminar Proposal										
Revisi Proposol										
Observasi & Penyebaran Kuesioner										
Penyusunan & Bimbingan Skripsi										
Sidang Skripsi										

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Kota Tangerang**

Wilayah Kota Tangerang terletak antara  $6^{\circ} 6'$  sampai  $6^{\circ} 13'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ} 36'$  sampai  $106^{\circ} 42'$  Bujur Timur, berjarak sekitar 27 Km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Berdasarkan data dalam buku Kota Tangerang dalam angk, Kota Tangerang memiliki luas wilayah 18.424 Ha (termasuk Bandara Soekarnor-Hatta dengan luas 1.969 Ha), yang terdiri atas 13 Kecamatan 104 Kelurahan, 949 Rukun Warga (RW), dan 4.652 Rukun Tetangga (RT). Batas administrasi wilayah Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Serpong dan Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Adapun luas wilayah administrasi menurut kecamatan di Kota Tangerang yang diterbitkan oleh Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang dan BPS Kota Tangerang, dapat dilihat pada data tabel berikut ini :

**Tabel 4.1.**  
**Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kota Tangerang**

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah		
			Kelurahan	RW	RT
1.	Batuceper	1.158	7	44	208
2.	Benda	592	5	42	195
3.	Cibodas	961	6	86	443
4.	Ciledug	877	8	97	335
5.	Cipondoh	1.791	10	92	553
6.	Jatiuwung	1.441	6	40	210
7.	Karang Tengah	1.047	7	74	358
8.	Karawaci	1.348	16	125	523
9.	Larangan	940	8	89	397
10.	Neglasari	1.608	7	50	239
11.	Periuk	954	5	58	365
12.	Pinang	2.159	11	75	432
13.	Tangerang	1.579	8	77	394
14.	Bandara Soekarno-Hatta	1.969	-	-	-
	Jumlah	18.424	104	949	4.652

Sumber : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Tangerang, 2013.

Secara rinci, luas dan batas wilayah administrasi Kota Tangerang ditunjukkan pula pada tabel dan gambar peta wilayah di bawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah dan Batas Wilayah Administrasi Kota Tangerang yang Dirinci Menurut Kecamatan**

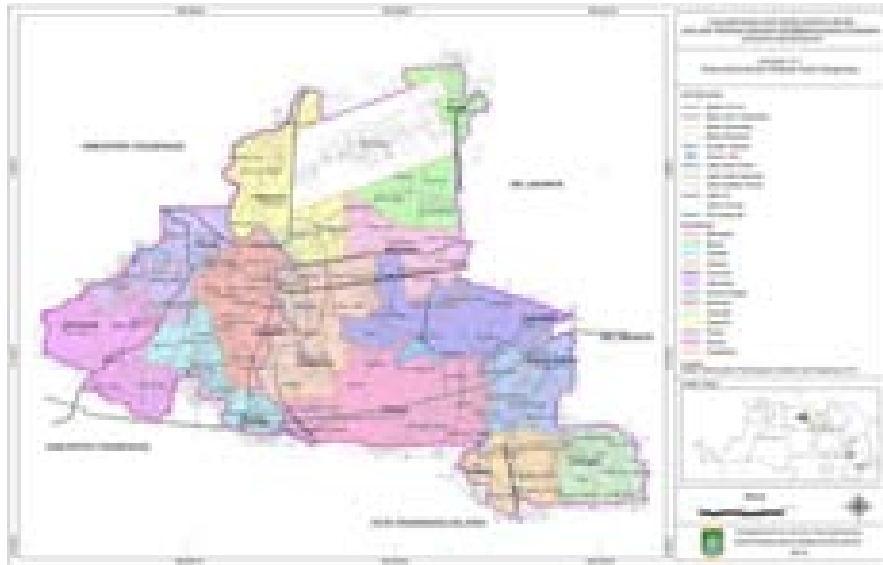
No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah			Batas Administrasi			
			Kel.	RW	RT	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Batuceper	11,58	7	45	216	Kec. Benda	Prov. DKI Jakarta	Kec. Cipondoh, Kec. Tangerang	Kec. Neglasari
2	Benda*)	5,92	5	42	199	Kab. Tangerang	Prov. DKI Jakarta	Kec. Batuceper, Kec.	Kec. Neglasari

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah			Batas Administrasi			
			Kel.	RW	RT	Utara	Timur	Selatan	Barat
								Neglasari	
3	Cibodas	9,61	6	86	450	Kec. Periuk, Kec. Karawaci	Kec. Pinang	Kab. Tangerang	Kec. Jatiuwung
4	Ciledug	8,77	8	102	356	Kec. Karang Tengah,Kec. Pinang	Kec. Larangan	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
5	Cipondoh	17,91	10	97	585	Kec. Batuceper,Prov. DKI Jakarta	Kec. Karang Tengah,Prov. DKI Jakarta	Kec. Pinang,Kec. Karang Tengah	Kec. Tangerang
6	Jatiuwung	14,41	6	41	220	Kec. Periuk	Kec. Cibodas	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
7	Karang Tengah	10,47	7	74	358	Kec. Cipondoh	Prov. DKI Jakarta	Kec. Ciledug	Kec. Pinang
8	Karawaci	13,48	16	127	528	Kec. Neglasari	Kec. Tangerang	Kec. Cibodas	Kec. Cibodas,Kec. Periuk
9	Larangan	9,40	8	89	407	Prov. DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta	Kab. Tangerang	Kec. Ciledug, Kec. Karang Tengah
10	Neglasari	16,08	7	50	240	Kab. Tangerang	Kec. Benda, Kec. Batuceper	Kec. Karawaci, Kec. Tangerang	Kab. Tangerang,Kec. Periuk
11	Periuk	9,54	5	60	373	Kab. Tangerang	Kec. Neglasari,Kec. Karawaci	Kec. Jatiuwung,Kec. Cibodas	Kab. Tangerang
12	Pinang	21,59	11	74	438	Kec. Cipondoh,Kec. Tangerang	Kec. Karang Tengah	Kab. Tangerang	Kec. Cibodas
13	Tangerang	15,79	8	78	398	Kec. Neglasari, Kec. Batuceper	Kec. Cipondoh, Kec. Pinang	Kec. Pinang	Kec. Karawaci
Tahun 2011		164,55	104	965	4.768				
Tahun 2012		164,55	104	965	4.768				
Tahun 2013		164,55	104	956	4.704				
Tahun 2014		164,55	104	949	4.652				
Tahun 2016		164,55	104	931	4.587				

Sumber: LKPJ AMJ Walikota Tangerang, Penelitian Tahun 2010

Keterangan: \*) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta (19,69 km<sup>2</sup>)

**Gambar 4.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang**



Sumber : LKPJ AMJ Walikota Tangerang, Penelitian Tahun 2013

#### **4.1.2. Visi dan Misi Kota Tangerang**

Dalam pencapaian kondisi pembangunan pada tahun 2016, Kota Tangerang berupaya menindaklanjuti dan meningkatkan hasil-hasil pencapaian pembangunan. Tindak lanjut pembangunan tersebut diselenggarakan dalam koridor kebijakan pembangunan jangka panjang, sebagaimana yang tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah Kota Tangerang tahun 2014.

##### **1. Visi Kota Tangerang**

###### **a. Kota yang Mandiri**

Kota Tangerang telah berkembang sebagai kawasan perkotaan yang bernuansa sebagai kawasan industri dan perdagangan. Keberadaan sejumlah kawasan-kawasan industri serta didukung dengan keberadaan infrastruktur yang menunjang aktivitas perdagangan menjadikan Tangerang semakin bertumbuh kembang dan berdaya saing. Kondisi

tersebut turut pula dipengaruhi oleh posisi strategis Tangerang sebagai wilayah penghubung antar antar daerah dan sekaligus akses langsung terhadap jalur perdagangan internasional, serta keterhubungan yang relatif baik dengan ibu kota Negara (DKI Jakarta) sebagai pusat pasar dan modal.

Berdasarkan apa yang telah dicapai inilah, Kota Tangerang yang semakin memantapkan diri untuk :

- 1) Menjadikan masyarakat Kota Tangerang terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu cukup sandang, pangan papan/perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- 2) Demokratis dalam artian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang didasarkan atas penyerapan dan pengakomodasian aspirasi dari berbagai komponen masyarakat yang ada;
- 3) Iman dan takwa dalam artian pengamalan dan pengembangan nilai-nilai religius dengan berdasarkan kepada norma-norma keagamaan dalam setiap aspek kehidupan;
- 4) Reformis dalam artian menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakan hak asasi manusia, mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), berakuntabilitas tinggi, serta terus menerus melakukan perubahan kearah yang lebih baik;
- 5) Indah dalam arti sebagai kota yang bersih, nyaman, asri dan tertata dengan baik.

b. Kota berwawasan lingkungan

Penyelenggaraan pembangunan tidak semata diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan perekonomian kota, namun juga harus berpijak pada prinsip untuk menjaga daya dukung dan daya tampung kota berdasarkan berbagai sumberdaya yang tersedia, sehingga pembangunan secara lestari dan berkelanjutan merupakan orientasi yang harus sejalan. Untuk itu "Berwawasan Lingkungan" memiliki pengertian bahwa pembangunan Kota Tangerang dilaksanakan dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, baik fisik maupun non fisik. Dengan kata lain pembangunan Kota Tangerang diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Selain itu pembangunan yang berwawasan lingkungan juga mengharuskan dipenuhinya kebutuhan dasar dan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik.

## **2. Misi Kota Tangerang**

Dalam mencapai kondisi yang diharapkan, sebagaimana visi Kota Tangerang untuk mewujudkan Kota Mandiri dan Berwawasan Lingkungan, maka diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan yang dapat mendasari gerak langkah Pemerintah Kota Tangerang selama kurun waktu tertentu. Untuk itu ditetapkan misi Kota

Tangerang yang dalam pelaksanaan pembangunan sebelum mencapai era tinggal landas yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis melalui tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan potensi perekonomian daerah melalui keseimbangan ekonomi skala besar dengan skala kecil dan rumah tangga;
- c. Memenuhi kebutuhan fasilitas kota yang mencakup fasilitas fisik dan non fisik;
- d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian tata ruang wilayah serta kelestarian lingkungan hidup;
- e. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian tata ruang wilayah serta kelestarian lingkungan hidup;
- f. Menumbuh-kembangkan budaya daerah serta kehidupan masyarakat Tangerang yang agamis dan religius.

#### **4.1.3. Gambaran Kondisi Ekonomi di Kota Tangerang**

Gambaran kondisi ekonomi yang diuraikan adalah yang terkait dengan penataan kampung kumuh di Kota Tangerang terutama mengenai tingkat kesejahteraan dan tingkat kemiskinan penduduk di Kota Tangerang.

##### **1. Tingkat Kesejahteraan**

Gambaran kesejahteraan penduduk Kota Tangerang dapat dilihat dari tahapan pencapaian kesejahteraannya yang dikelompokkan menjadi : keluarga pra sejahtera (Pra KS), keluarga sejahtera tahap I (KS I), keluarga



sejahtera tahap II (KS II), keluarga sejahtera tahap III (KS III), dan keluarga sejahtera tahap III plus (KS III +). Penjelasan dari masing-masing kelompok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk rekreasi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.
- c. Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II) adalah keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
- d. Keluarga sejahtera tahap III (KS III) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti

secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.

- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus (KS III +) adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan penduduk di tiap kecamatan dan pencapaian kesejahteraan di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Kesejahteraan Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2013**

No	Kecamatan	Keluarga					Jumlah
		Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+	
1.	Batuceper	1.422	3.246	6.291	5.849	2.412	19.220
2.	Benda	2.092	4.585	4.815	4.071	526	16.089
3.	Cibodas	1.146	6.079	10.859	3.736	1.167	22.987
4.	Ciledug	1.027	3.416	7.974	8.132	2.711	23.260
5.	Cipondoh	846	2.524	9.777	17.458	6.215	36.820
6.	Jatiuwung	484	5.567	7.364	8.531	4.337	26.283
7.	Karang Tengah	983	2.896	4.181	7.722	2.444	18.226
8.	Karawaci	1.321	6.094	13.554	8.827	2.958	32.754
9.	Larangan	1.394	4.853	5.124	7.445	5.203	24.019
10.	Neglasari	3.490	5.567	5.712	3.882	1.587	20.238
11.	Periuk	2.407	4.208	7.710	6.209	1.456	21.990
12.	Pinang	1.853	4.995	12.884	8.027	2.974	30.733
13.	Tangerang	708	3.440	6.547	13.086	2.902	26.683
		19.173	57.470	102.792	102.975	36.892	319.302

Sumber : Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistika Kota Tangerang dan BPS, 2013.

Berdasarkan data pada tabel di atas, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Tangerang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah keluarga pra sejahtera (Pra KS) sebanyak 19.173 keluarga atau hanya 6% dari jumlah total keluarga di Kota Tangerang, di mana distribusi terbesarnya berada di Kecamatan Neglasari (3.490 keluarga). Sisanya merupakan keluarga sejahtera tahap I (KS I) sebanyak 54.470 keluarga (18%), keluarga sejahtera tahap II (KS II) sebanyak 102.792 keluarga (32,20%), keluarga sejahtera tahap III (KS III) sebanyak 102.975 keluarga (32,25%), dan keluarga sejahtera tahap III plus (KS III+) sebanyak 36.892 keluarga (11,55%).

## **2. Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang berdasarkan data jumlah rumah tangga sasaran tahun 2016 menunjukkan 7,47%. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional tahun sebelumnya yang mencapai 14,15%. Hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Kota Tangerang hanya setengah dari tingkat kemiskinan nasional.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Kota Tangerang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah daripada tingkat kemiskinan nasional. *Pertama*, Kota Tangerang merupakan kota dengan tingkat aktivitas ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan berbagai daerah lain di Indonesia, bahkan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten. Sektor Industri manufaktur yang menopang perekonomian Kota Tangerang memberikan lapangan pekerjaan yang tinggi bagi penduduk Kota Tangerang dan memberikan insentif bagi lapangan usaha lainnya untuk tumbuh dan

menyediakan lapangan pekerjaan tambahan selain sektor industri. *Kedua*, Kota Tangerang sebagai wilayah penyangga Ibukota Negara Indonesia, DKI Jakarta, memberikan akumulasi kapital dan pasar yang besar dimana penduduk Kota Tangerang yang mencari nafkah di Jakarta akan dibawah kembali ke Tangerang dan meningkatkan demand atas berbagai barang dan jasa di Kota Tangerang.

Adapun tingkat kemiskinan menurut data tiap kecamatan di Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Kemiskinan di Kota Tangerang**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)			Jumlah Rumah Tangga	Tingkat Kemiskinan
		RTS Hasil Pengolahan PPLS	RTS Tambahan	Total RTS		
1.	Batuceper	1.886	9	1.895	22.765	8,32
2.	Benda	2.020	22	2.042	17.372	11,75
3.	Cibodas	1.341	6	1.347	30.825	4,37
4.	Ciledug	1.392	46	1.438	25.418	5,66
5.	Cipondoh	2.635	23	2.658	40.175	6,62
6.	Jatiuwung	2.823	49	2.872	33.047	8,69
7.	Karang Tengah	1.232	17	1.249	25.298	4,94
8.	Karawaci	3.131	40	3.171	43.871	7,23
9.	Larangan	1.974	55	2.029	33.125	6,13
10.	Neglasari	4.503	66	4.569	21.398	21,35
11.	Periuk	1.684	12	1.696	28.320	5,99
12.	Pinang	1.906	71	1.977	32.536	6,08
13.	Tangerang	2.019	22	2.041	33.834	6,03
		28.546	438	28.984	387.984	7,47

Sumber : Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang, Bappeda Kota Tangerang, 2013

Tabel di atas, menunjukkan distribusi kemiskinan di Kota Tangerang tiap Kecamatan. Kecamatan Cibodas memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Tangerang,

sedangkan Kecamatan Neglasari menunjukkan tingkat kemiskinan paling tinggi. Ketimpangan kemiskinan di berbagai kecamatan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan distribusi jumlah penduduknya. Oleh karena itu, penyebab kemiskinan di Kota Tangerang bukan terutama karena penumpukan jumlah penduduk di suatu wilayah tetapi lebih kepada akses atas lapangan usaha yang tidak merata pendapatannya.

#### **4.1.4. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang**

##### **4.1.4.1. Struktur Organisasi**

Sebuah organisasi harus mempunyai suatu struktur organisasi yang digunakan untuk memudahkan pengkoordinasian dan penyatuan usaha, untuk menunjukkan kerangka-kerangka hubungan di antara fungsi, bagian-bagian maupun tugas dan wewenang serta tanggung jawab. Serta untuk menunjukkan rantai (garis) perintah dan perangkapan fungsi yang diperlukan dalam suatu organisasi.

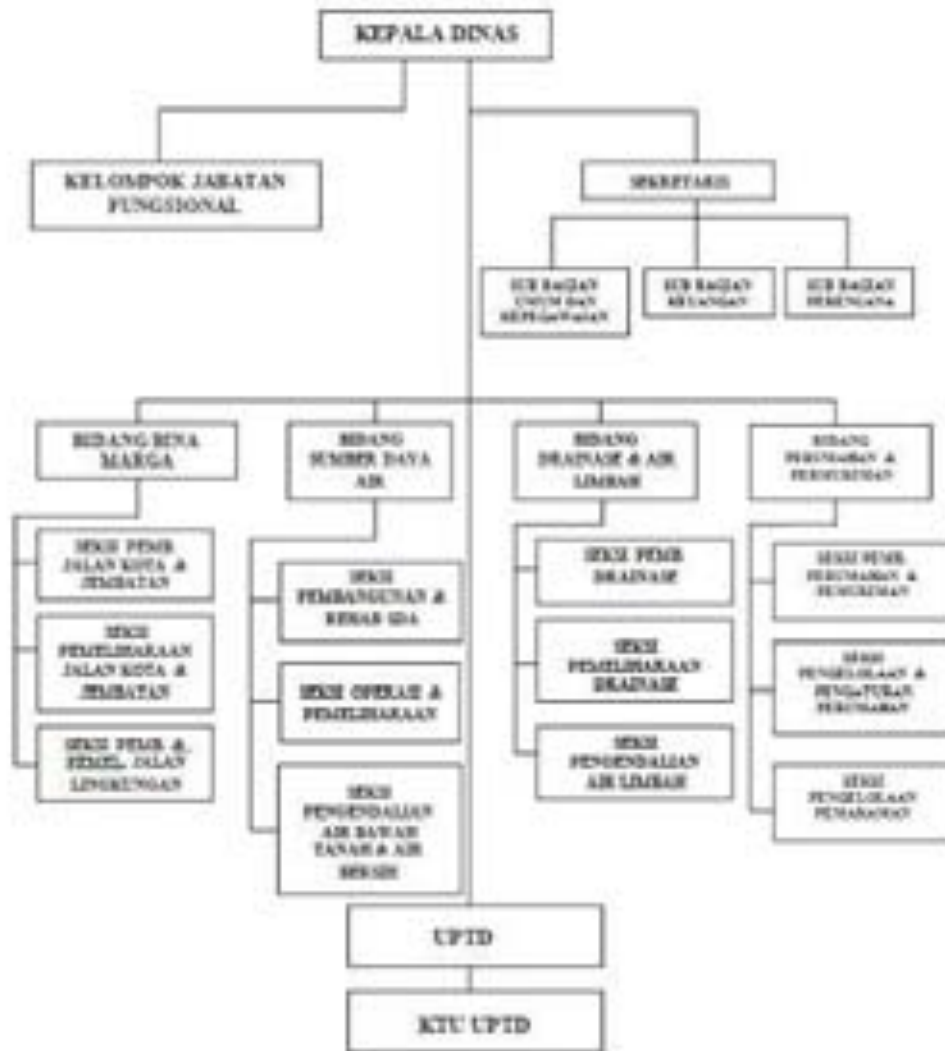
Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, struktur organisasi tertinggi dikepalai oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) kepala bidang yaitu Bidang Umum dan Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Perencanaan yang masing-masing membawahkan 3 Kepala Seksi/Kasubag. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang, susunan organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian keuangan
  - c. Sub bagian perencanaan
3. Bidang bina marga membawahkan :
- a. Seksi pembangunan jalan kota dan jembatan
  - b. Seksi pemeliharaan jalan kota dan jembatan.
  - c. Seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan
4. Bidang sumber daya air membawahkan
- a. Seksi pembangunan dan rehab sumber daya alam
  - b. Seksi operasi dan pemeliharaan
  - c. Seksi pengendalian dan air bawah tanah dan air bersih
5. Bidang Drainase dan air limbah membawahkan :
- a. Seksi pembangunan drainase
  - b. Seksi pemeliharaan drainase
  - c. Seksi pengendalian air limbah
6. Bidang perumahan dan permukiman membawahkan :
- a. Seksi pembangunan perumahan dan permukiman
  - b. Seksi pengolahan dan pengaturan perumahan
  - c. Seksi pengelolaan pemakaman
7. UPTD

Adapun untuk mengetahui gambaran lebih jelasnya mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini :

**Gambar 4.2**  
**Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang**



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Tahun 2013.

#### 4.1.4.2. Visi dan Misi

Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang memiliki visi yakni : **“Membangun peradaban baru di bidang pekerjaan umum dan perumahan dengan pelayanan yang akhlakul karimah”**. Dalam pencapaian visi tersebut dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang memiliki beberapa misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana kebinamargaan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana drainase, air minum dan air.

#### **4.1.5. Potret Kampung Kumuh di Kecamatan Jatiuwung**

Di kecamatan Jatiuwung terdapat 4 (empat) lokasi kampung kumuh yang tersebar di 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Jatake, Kelurahan Gandasari, Kelurahan Keroncong dan Kelurahan Alam Jaya. Adapun gambaran yang akan disajikan dalam kaitan ini khususnya Kelurahan Jatake, dan Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut :

1. Potret kampung kumuh di Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, yaitu berlokasi di RT. 01/04 dan RT. 03/04.
  - a. Kondisi Fisik :
    - 1) Jumlah bangunan rumah kumuh di lokasi ini sekitar 30 rumah.
    - 2) Pemanfaatan ruang kampung kumuh ini tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Tangerang 2010-2030 dimana kawasan tersebut peruntukan lahannya adalah kawasan untuk industri.
    - 3) Tingkat kepadatan bangunan di lokasi kampung kumuh ini sekitar 122 unit/ha.
    - 4) Sekitar 20% bangunan di lokasi kampung kumuh ini merupakan bangunan temporer.



- 5) Jarak antara bangunan 1,5-3,0 m.
  - 6) Tata letak bangunan kurang teratur.
  - 7) Kebutuhan air bersih penduduk diperoleh dengan menggunakan sumber sumur pompa.
  - 8) Terdapat sekitar 7 rumah yang tidak memiliki jamban keluarga.
  - 9) Sebagian besar sampah dibuang dan dibakar di lahan kosong (70%).
  - 10) Kondisi saluran drainase yang ada relatif buruk sehingga ketika turun hujan menimbulkan genangan di kurang dari 50% kawasan.
  - 11) Jalan lingkungan yang ada sebagian besar berjenis perkerasan paving block dengan kondisi lebih dari 50% masih baik.
- b. Kondisi Ekonomi :
- 1) Pendapatan penduduk rata-rata antara Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- per bulan
  - 2) Penduduknya mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan pedagang.
  - 3) Jarak ke tempat kerjanya rata-rata 1-10 km.
  - 4) Letak kawasan berdasarkan RTRW Kota Tangerang 2010-2030 sangat strategis.
  - 5) Fungsi kawasan sekitar kampung kumuh adalah industri.
- c. Kondisi sosial :
- 1) Kepadatan penduduknya sekitar 490 jiwa/ha.
  - 2) Pertumbuhan penduduknya lebih dari 0,4%.
  - 3) Tingkat pendidikan penduduknya rata-rata tamatan SLTP.

- 4) Jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan tidak tetap sekitar 10 orang.
  - 5) Status gizi balita buruk dan gizi balita kurang tidak ada.
  - 6) Penderita penyakit DBD tidak ada.
  - 7) Penderita penyakit diare 2 kasus.
  - 8) Penderita penyakit ISPA tidak ada.
- d. Gambaran Lokasi dalam dokumen foto dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 4.3**  
**Kondisi Bangunan Kampung Kumuh di Kelurahan Jatake**  
**Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang**



2. Potret kampung kumuh di Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, yaitu berlokasi di RT. 04/05.
  - a. Kondisi Fisik :
    - 1) Jumlah bangunan rumah kumuh di lokasi ini sekitar 27 rumah.
    - 2) Pemanfaatan ruang kampung kumuh ini tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Tangerang 2010-2030 dimana kawasan tersebut peruntukan lahannya adalah kawasan untuk industri.

- 3) Tingkat kepadatan bangunan di lokasi kampung kumuh ini sekitar 99 unit/ha.
  - 4) Sekitar 50% bangunan di lokasi kampung kumuh ini merupakan bangunan temporer.
  - 5) Jarak antara bangunan 1,5-3,0 m.
  - 6) Tata letak bangunan kurang teratur.
  - 7) Kebutuhan air bersih penduduk diperoleh dengan menggunakan sumber sumur pompa.
  - 8) Terdapat sekitar 7 rumah yang tidak memiliki jamban keluarga.
  - 9) Sebagian besar sampah dibuang dan dibakar.
  - 10) Kondisi saluran drainase yang ada relatif buruk sehingga ketika turun hujan menimbulkan genangan di kurang dari 50% kawasan.
  - 11) Jalan lingkungan yang ada sebagian besar berjenis perkerasan paving block dengan kondisi lebih dari 50% masih baik.
- b. Kondisi Ekonomi :
- 1) Pendapatan penduduk rata-rata antara Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- per bulan .
  - 2) Penduduknya mempunyai pekerjaan sebagai pedagang.
  - 3) Jarak ke tempat kerjanya rata-rata 1-10 km.
  - 4) Letak kawasan berdasarkan RTRW Kota Tangerang 2010-2030 sangat strategis karena terletak di kawasan industri.
  - 5) Fungsi kawasan sekitar kampung kumuh adalah industri.

- c. Kondisi sosial :
- 1) Kepadatan penduduknya sekitar 398 jiwa/ha.
  - 2) Pertumbuhan penduduknya lebih dari 0,5%.
  - 3) Tingkat pendidikan penduduknya rata-rata tamatan SLTP.
  - 4) Jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan tidak tetap sekitar 11 orang.
  - 5) Status gizi balita buruk dan gizi balita kurang tidak ada.
  - 6) Penderita penyakit DBD tidak ada.
  - 7) Penderita penyakit diare 4 kasus.
  - 8) Penderita penyakit ISPA tidak ada.
- d. Gambaran Lokasi dalam dokumen foto dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 4.4**  
**Kondisi Bangunan di Kelurahan Alam Jaya**  
**Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang**



## **4.2. Deskripsi Data Penelitian**

### **4.2.1. Daftar Informan Penelitian**

Pada BAB III mengenai metodologi penelitian telah dijelaskan pemilihan informan dari kunjungan lapangan yang dipilih secara *purposive*. Informan

tersebut, ditentukan dan ditetapkan bukan berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian. Adapun, pada penelitian ini, peneliti memilih informan yaitu pegawai pemerintah terkait, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, serta *stakeholder* yang paham dengan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat tersebut. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 4.5**  
**Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Status Informan
1.	Linda Donarika Marbun,ST,MT	Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang
2.	Rusianto	Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang
3.	Rani, S.Si	Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
4.	Moch. Sadeli	Ketua RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
5.	Nurman	Ketua RT. 01/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
6.	Nana Supriatna	Ketua RT. 04 / RW. 05 Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
7.	Emong	Warga RT. 04/05 Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
8.	Sapei	Warga RT. 04/05 Kelurahan Jatake Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
9.	Mustopa	Warga RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
10.	Rumsinah	Warga RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
11.	Muhammad Iksan	Warga RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya Keamatan Jatiuwung Kota Tangerang
12.	Supriyono	Warga RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
13.	Syahrup	Warga RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang

Sumber: Peneliti, 2016.

#### 4.2.2. Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkandari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, mengenai Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, peneliti menggunakan Model evaluasi kebijakan Dunn. Adapun kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan dari model teorai Dunn (Nugroho, 2008:473) meliputi : 1) efektifitas; 2) efisiensi; 3) kecukupan; 4) perataan; 5) responsivitas, dan 6) ketepatan.

Dalam penelitian Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, peneliti memilih metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode pada aspek tertentu, yaitu:

- a. Kode Q 1, 2, 3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
- b. Kode I<sub>1</sub>, menunjukkan daftar urutan informan dari Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang.

- c. Kode I<sub>2</sub>, menunjukkan daftar urutan informan dari Kasi Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.
- d. Kode I<sub>3-1</sub> sampai I<sub>3-3</sub>, menunjukkan daftar informan dari Pengurus RT/RW
- e. Kode I<sub>4-1</sub> sampai I<sub>4-2</sub>, menunjukkan daftar informan dari masyarakat, yaitu warga penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah sederhana sehat di Kelurahan Jatake .
- f. Kode I<sub>5-1</sub> sampai I<sub>5-5</sub>, menunjukkan daftar informan dari masyarakat yang terdiri dari 4 orang warga penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah sederhana sehat di Kelurahan Alam Jaya dan 1 orang bukan penerima bantuan.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Setelah data bersifat jenuh artinya telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat diajadikan jawaban atas masalah penelitian.

### **4.3. Deskripsi Hasil Penelitian**

Kegiatan pembangunan kampung kumuh pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas permukiman. Dalam penanganan kampung kumuh di Kota Tangerang, strategi, kebijakan juga program dan tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik kampung kumuh itu. Evaluasi kebijakan menurut Dunn digunakan untuk mengevaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Tujuan dari penetapan konsep teori ini yaitu untuk mengevaluasi sejauhmana dampak atau manfaat yang dirasakan atas kebijakan tersebut. Oleh karena petugas-petugas dalam perusahaan, kegiatan-kegiatannya atau tugas-tugasnya tergambar dalam pola organisasi, maka suatu sistem pengawasan harus dapat memenuhi prinsip. Adapun kriteria evaluasi kebijakan akan dijabarkan lebih lanjut dibawah ini:

#### **4.3.1. Efektivitas**

Efektifitas merupakan suatu bentuk kriteria yang di dalamnya terdapat pencapaian suatu suatu hasil yang dicapai. Dalam hal ini ilustrasi yang digunakan yaitu pencapaian sebuah target pembangunan sejalan dengan kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi Banten, pembangunan jangka panjang terkait dengan penataan kampung kumuh. Apakah target kegiatan pembangunan yang telah ditentukan telah tercapai dengan baik atau belum.

##### **4.3.1.1. Pencapaian target kegiatan**

Setiap kebijakan mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi



kebijakan. Setiap perubahan pasti menginginkan kearah yang lebih baik, begitu pula efektivitas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, harapan pemerintah dan masyarakat mengharapkan perubahan yang lebih baik dari pengimplementasian kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Kebijakan ini memang sangat mendukung terhadap penataan kampung kumuh, mengatur semua aspek tata ruang di Kota Tangerang dengan harapan dapat menciptakan Kota Tangerang yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Linda Donarika Marbun, ST, MT pegawai Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang, beliau menyatakan bahwa :

“.... Tujuan dan pencapaian target kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat hidup layak dilihat dari rumah yang mereka tempati, walaupun rumahnya sederhana akan tetapi mereka dapat memiliki WC, sanitasi yang baik, memiliki kamar ruang tidur, ruang tamu dan cukup pencahayaan....”.  
(Wawancara dengan I<sub>1</sub> pada tanggal 15 Juli 2016)

Perubahan yang hendak dicapai yaitu agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan seperti yang diharapkan, agar semua aspek kegiatan pembangunan yang diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Sejauh ini pencapaian target dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat memang cukup dirasakan khususnya di Kecamatan Jatiuwung yaitu, sudah terlihat hasilnya masyarakat yang rumahnya telah direnovasi sekarang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari WC, kamar ruang tidur maupun ruang tamu dan dapat merasakan pencahayaan yang bagus. Kontribusi atas kegiatan tersebut pun dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut keterangan informasi

yang disampaikan Bapak Rusianto Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang, beliau menyatakan :

“..... Tujuan pembangunan infrastruktur ini, saya rasa masyarakat pun sejak awal tahu bahwa program ini untuk penanganan kawasan kumuh, dalam arti tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yaitu mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan .....” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> pada tanggal 15 Juli 2016)

Hal ini dikatakan pula oleh Rani Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, beliau menyatakan :

”..... Sejauh ini kegiatan pembangunan cukup baik dan dapat dirasakan hasilnya, menurut saya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial pada masyarakat yang dapat bantuan, karena rumah mereka sudah dapat dikatakan layak huni dan mengurangi kesenjangan antar warga .....” (Wawancara dengan I<sub>3</sub> pada tanggal 13 Mei 2016)

Sejauh ini perubahan atas pencapaian target dari kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dapat mengatasi krisis sosial, karena masyarakat merasakan bahwa kebijakan pembangunan yang telaksana cukup baik khususnya yang dilaksanakan di Kecamatan Jatiuwung. Tercapainya kegiatan pembangunan yang terlaksana ini tidak luput dari proses sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan informasi kebijakan agar hasil dari kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh pelaku baik oleh instansi pemerintah sendiri ataupun masyarakat umum lainnya sebagai penerima bantuan tersebut, seperti diungkapkan oleh Bapak Moch Sadeli selaku Ketua RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya berikut kutipan hasil wawancaranya :

“..... Masyarakat di RT saya ini tahu adanya kegiatan rehab rumah dari pemerintah Kota Tangerang, waktu itu saya kumpulin warga di rumah,

warga yang terdata terus saya kasih tahu siapa saja yang dapat bantuan bedah rumah. Sebelumnya juga ada banyak orang dari pemerintah kesini kasih tahu banyak masalah pembangunan rumah ini katanya mau ada bantuan rehab rumah....” .(Wawancara dengan I<sub>3-1</sub>, tanggal 1 Mei 2016)  
Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Nurman selaku Ketua

RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya, beliau menyatakan hal yang senada, yaitu :

“.....sebenarnya program bantuan rehab rumah ini sudah saya sosialisasikan sekalipun bukan tugas dan kewenangan penuh sebagai RT ataupun RW, akan tetapi karena tugas kita mendata warga siapa saja yang berhak mendapatkannya, makanya saya informasikan, ya itupun hanya sebatas gambaran mengenai jumlah unit rumah yang menerima bantuan...” .(Wawancara dengan I<sub>3-2</sub>, tanggal 7 Mei 2016).

Dari kutipan wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kegiatan pembangunan bedah rumah sehat tersebut masyarakat sebelumnya sudah mengetahui dari sosialisasi yang disampaikan oleh RT/RW nya. Dengan demikian masyarakat tahu bahwa tujuan dan sasaran dari efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, yaitu mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sekalipun dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara menyeluruh, akan tetapi setidaknya pencapaian target kegiatan pembangunan tersebut cukup baik dan dapat memberikan perubahan yang sesuai dengan target yang dicapai. Hasilnya saat ini masyarakat penerima bantuan sudah dapat menikmati rumah sehat yang layak huni.

Efektivitas pencapaian target kegiatan dikatakan efektif karena kebijakan pembangunan yang telaksana cukup baik mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan ini

adalah sasaran dari kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **4.3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam suatu kebijakan, pelaksanaan kegiatan mempunyai peranan sangat penting, maka pada bagian ini pelaksanaan kegiatan yang dimaksud yaitu suatu kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diimplementasikan. Setiap kebijakan yang dibuat pastinya diimbangi pula dengan sistem pelaksanaan kegiatan. Artinya pelaksanaan kebijakan ini berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat di tiap kecamatan, khususnya di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang memiliki peran yang penting, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rani selaku Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Kutipan wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“..... Pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat menurut saya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, walaupun yang melaksanakan kegiatan pembangunan ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, kami juga ikut mengawasi dan memonitoring agar kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik dan lancar ....”. (Wawancara dengan I<sub>3</sub> pada tanggal 13 Mei 2016)

Hal di atas, diperkuat dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Nana Supriatna selaku Ketua RT. 04/05 Kelurahan Jatake Kota Tangerang, yaitu :

“.....saya dapat melihat sendiri neng pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat waktu itu, jadi selaku RT disini saya melihat dan menilai bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah bagus lah cukup baik dan positif, bantuan rehab rumah dari pemerintah diarahkan kepada keluarga miskin yang kondisi sosial ekonominya rendah....”. (Wawancara dengan I<sub>3-3</sub> pada tanggal 27 April 2016).

Pernyataan di atas menyatakan bahwa program atau kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat tidak akan berjalan dengan sendirinya dan membutuhkan pihak lain untuk terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung di lapangan. Tanggung jawab yang diberikan kepada semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, menuntut agar bantuan rehab rumah sederhana sehat dapat dilaksanakan dengan baik. Dimana setiap elemen dari pemerintah, lembaga masyarakat ataupun keluarga penerima manfaat bekerjasama untuk mewujudkan cita-cita pemerintah mengurangi permasalahan kemiskinan.

Berdasarkan hasil informasi wawancara yang dilakukan pada informan di atas, salah satunya dengan pihak Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, selaku instansi pemerintah yang sekaligus memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, walaupun yang melaksanakan kegiatan pembangunan ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, karena memang sebuah program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan sendiri secara baik bila tidak ada keterkaitan dengan pihak lainnya. Seperti halnya bantuan rehab rumah sederhana sehat ini dimana keterkaitan berbagai pihak yang terkait sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, para pihak satu dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat harus terjalin

harmonisasi secara langsung, karena jika tidak maka akan menghasilkan dampak yang negatif, yang dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan pembangunan bantuan rehab rumah sederhana sehat di Kota Tangerang.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diimplementasikan berjalan dengan baik, setiap elemen dari pemerintah, lembaga masyarakat ataupun keluarga peneriman manfaat saling bekerjasama, karena efektivitas kegiatan pembangunan tersebut tidak akan berjalan sendirinya secara baik bila tidak ada keterkaitan dengan pihak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kriteria efektivitas dalam pembangunan rumah sederhana sehat sebagaimana dimaksud baik pencapaian target ataupun dalam pelaksanaannya kegiatannya, secara umum sudah dilakukan dengan baik. Artinya tujuan dan sasaran dari program pemerintah tersebut adalah untuk mengupayakan berkurangnya luas permukiman kumuh sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

#### **4.3.2. Efisiensi**

Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang diinginkan. Di dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Tangerang pada masyarakatnya khususnya di Kecamatan Jatiuwung.

#### 4.3.2.1. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan

Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dalam kaitan ini merupakan otoritas kewenangan atau legitimasi bagi para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika pelaksanaan kegiatan itu hasilnya nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan pembangunan tersebut.

Di dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Dinas Pekerjaan Umum memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Hal ini peneliti ketahui berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Linda Donarika Marbun, ST, MT Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang, berikut kutipan wawancaranya :

“..... sejauh ini kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan...”. (Wawancara dengan I<sub>1</sub>, pada tanggal 20 Mei 2016).

Keberlangsung program kebijakan pembangunan ini merupakan hal terpenting yang harus dilakukan. Seluruh pihak yang berkaitan didalamnya harus berhubungan dan berkaitan secara baik untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sebagai bagian dari program pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Rani, berikut kutipan wawancaranya :

“..... kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini bertujuan agar masyarakat yang kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni dapat menikmati hidup layak karena rumah merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat pasti membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat....”. (Wawancara dengan I<sub>3</sub>, pada tanggal 13 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum memang melaksanakan tugasnya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis yang ada, sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan perencanaan dan hasilnya dapat membawa manfaat serta dinikmati secara langsung oleh masyarakat yang kurang mampu.

Hal lain yang lebih penting atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini adanya respon dari pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai penerima kebijakan. Kebijakan ini merupakan bentuk bantuan yang diperuntukan untuk kalangan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah dan berada di wilayah perkampungan kumuh, sehingga hasil kebijakan ini dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung. Sebagaimana diungkapkan oleh Mustopa warga masyarakat di RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya bahwa :

“.... alhamdulillah lamun dibandingkeun jeung bangunan nu kamari mah, rehaban imah anu urang ieu lebih enak lah, bantuan ti pamarentah ieu memang alus bisa ngabantu abdi rakyat miskin...”. (Wawancara dengan I<sub>5-1</sub>, pada tanggal 1 Mei 2016)

Rumah yang telah dibangun oleh pemerintah, menurut keterangan informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang dinikmati oleh masyarakat jika dibandingkan dengan



bangunan yang sebelumnya, hasil bantuan rehab rumah tersebut lebih nyaman. Kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diperuntukan oleh rakyat/masyarakatnya dapat membantu rakyat miskin.

**Gambar 4.5**  
**Hasil dari Kebijakan Pemerintah atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya**



- Sebelum -

- Sesudah -

Sejatinya bantuan rehab rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah, sumber dana yang digunakan berasal dari APBD. Sedangkan seberapa besar biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini, masyarakat tidak mengetahui secara pasti. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Emong warga masyarakat RT. 04/05 Kelurahan Jatake, yaitu :

“..... gak tau ya neng, bapak mah disini hanya tau nya di data saja oleh bapak RT/RW disini, katanya bapak mau dapat bantuan rehab rumah, kalo biayanya bapak gak tahu lah masalah itu mah ...”. (Wawancara dengan I<sub>4-1</sub>, pada tanggal 27 April 2016)

Kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah, besaran dana yang digunakan untuk satu unit rumah secara pasti masyarakat tidak

mengetahuinya. Namun dalam pelaksanaannya biaya yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat tersebut sesuai dengan komitmen dari pemerintah. Pada dasarnya sumber biaya yang diberikan oleh pemerintah secara optimal dapat mencukupi, sekalipun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat belum dapat terlaksana secara menyeluruh khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal ini karena anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD sangatlah terbatas untuk direalisasikan terhadap kegiatan pembangunan tersebut.

Efisiensi terkait dengan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai hasil yang diinginkan. Di dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan nilai utama yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Tangerang pada masyarakatnya khususnya di Kecamatan Jatiuwung.

#### **4.3.2.2. Kecepatan pelaksanaan kegiatan**

Kecepatan pelaksanaan kegiatan, yang dimaksud pada indikator ini adalah pelaksana kebijakan. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi tercapainya keberhasilan suatu kebijakan. Artinya, kecepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini nantinya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas produk pembangunan yang sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakatnya. Begitupun lamanya penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sehat dalam satu wilayah di kecamatan Jatiuwung, peneliti berhasil mewawancarai Ibu Rani Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa :

“.... kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat untuk 1 unit rumah penyelesaiannya kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya...”. (Wawancara dengan I<sub>2</sub>, pada tanggal 13 Mei 2016)

Hal senada pun dikemukakan oleh Bapak Rusianto Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang menyatakan :

“.....setahu saya kegiatan ini yang sudah berlangsung untuk penyelesaian 1 unit rumah kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya...” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> pada tanggal 15 Juli 2016)

Dari kutipan wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa hal ini memberikan bukti bahwa para pelaksana kebijakan di lapangan memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat secara cepat dan tepat. Hal yang sama diperkuat dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Rumsinah Warga RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya, berikut kutipan wawancaranya :

“..... alus lah ceuk ibu mah neng, hasil gawena ti pamarentah ieu cepet ngarehab imah teh, jadi ibu oge seneng bisa nempatan deui ieu imah, sanajan leutik tapi ayeuna mah imah ibu jadi bersih, nyaman lah, nuhun pisan ku ayana bantuan ieu jadi ngaringankeun ibu .....”. (Wawancara dengan I<sub>5-2</sub>, pada tanggal 7 Mei 2016)

Informan tersebut menyatakan bahwa penyelesaian kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat berjalan sesuai dengan harapan, setelah dirinya menerima bantuan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat mengalami perubahan kondisi yang membanggakan. Dengan adanya bantuan tersebut dapat memberikan keringanan beban ekonomi untuk memiliki rumah sederhana sehat yang layak dihuni.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara mengenai kriteria efisiensi dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, dilihat dari

ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan kecepatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut bahwa penyelesaian kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, sekalipun mungkin di dalam proses kegiatan tersebut masih ada hambatan dan kendala yang dihadapi, tetapi masyarakat mungkin memahami dan memaklumi keadaan kondisi tersebut. Akan tetapi hasilnya masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan rehab rumah sederhana sehat ini, karena menurut keterangan informan menyatakan bahwa bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam membiayai perbaikan rumah singgahnya. Mengingat hidup serba kekurangan di zaman sekarang ini menjadi hambatan dalam memperoleh fasilitas rumah yang layak huni secara memadai. Oleh karena itu kesulitan hidup karena faktor ekonomi memaksa mereka membiarkan kondisi fisik rumahnya terabaikan dan rusak.

Namun demikian, efisiensi terkait dengan kecepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan selama itu, tujuannya adalah agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan, sehingga program pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat berhasil dilaksanakan.

Dengan demikian, kriteria efisiensi dalam pembangunan rumah sederhana sehat sangat perlu diperhatikan, karena keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program pembangunan yang dicanangkan sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena menentukan proses pembangunan kedepannya.

### **4.3.3. Kecukupan**

Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria pula di dalam proses evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

#### **4.3.3.1. Kepuasan**

Adanya implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah biasanya mengharapkan suatu perubahan kondisi yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun perubahan yang ingin dicapai dari kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini, hasilnya diharapkan dapat memuaskan baik bagi pelaksananya maupun bagi masyarakat yang menerima bantuan rumah ini, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Iksan warga RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya bukan penerima bantuan, dalam wawancaranya menyatakan :

“.....perubahannya ya baguslah lah positif, bantuan rehab rumah sederhana sehat ini dapat memuaskan kalangan masyarakat yang tidak mampu atau tidak memiliki rumah yang layak huni. Dengan adanya kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, masyarakat merasa terbantu dan dapat memiliki fasilitas rumah yang layak sehat, indah dan nyaman tidak seperti sebelumnya yang kumuh dan kotor....”. (Wawancara dengan I<sub>5-3</sub>, pada tanggal 30 April 2016)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Supriyono warga penerima bantuan rehab rumah Warga di RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya, berikut kutipan wawancaranya :

“.....Bapak mah bangga atuh neng dan merasa puas sekarang mah, rumah bapak sudah bagus dan baik, teras bersih dan gak repot sekarang mah ada WC nya, bantuan pemerintah ini sangat bagus lah membantu rakyat yang miskin seperti bapak ini....” (Wawancara dengan I<sub>5-4</sub>, pada tanggal 30 April 2016)

Adapun pencapaian dari hasil pembangunan rumah sederhana sehat yang telah terwujud seperti terlihat pada dokumentasi foto berikut ini :

**Gambar 4.6**  
**Masyarakat dapat menikmati rumah sederhana sehat yang layak huni**  
**dibandingkan kondisi sebelumnya**



Dengan adanya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat, masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah ini dinilai positif. Artinya mereka mengalami perubahan kehidupan yang memuaskan karena dapat memiliki rumah sederhana sehat yang layak huni. Seperti halnya hasil wawancara dengan Bapak Saepi warga RT. 04/05 Kelurahan Jatake, yang menyatakan sebagai berikut :

“..... sebenarnya kalo dibilang berubah sih yang berubah, tapi kondisi hidup saya sih masih jauh dari sejahtera gak ada yang berubah seperti begini saja keadaannya, tapi saya sangat bersyukur dan puas karena merasa terbantu bisa memperbaiki rumah yang sudah rusak ini ....” (Wawancara dengan I<sub>4-2</sub>, pada tanggal 27 April 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, keluarga penerima bantuan rehab rumah sederhana sehat dari pemerintah Tangerang, maka dilihat dari ungkapan mengenai kepuasan tentunya secara signifikan dapat memberikan kepuasan, walaupun kondisi hidup masih jauh dari kata sejahtera. Akan tetapi mereka sangat terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat karena dapat meringankan biaya beban mereka untuk membiayai kebutuhan merenovasi rumahnya menjadi rumah yang layak huni.

Oleh karena itu, tingkat kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria kepuasan di dalam proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, karena hasil yang diinginkan sesuai dengan harapan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

#### **4.3.3.2. Tingkat kebutuhan**

Pemerintah melalui kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini memiliki suatu keinginan membantu keluarga miskin yang bersyarat untuk memenuhi tingkat kebutuhan hidupnya agar dapat memiliki fasilitas rumah yang layak huni. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan yang didapat, maka peneliti melakukan wawancara dengan Syahrup warga RT. 01/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya, berikut kutipan wawancaranya :

“..... boro-boro neng bapak mah untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari aja tau sendiri masih sulit, kerja bapak hanya buruh harian, sudah memiliki rumah yang layak huni dari bantuan pemerintah ini saja bapak merasa cukup dan bersyukur ....”. (Wawancara dengan I<sub>5-5</sub>, pada tanggal 15 Mei 2016)

Sependapat dengan keterangan informasi yang disampaikan oleh Syahrup, Ibu Rumsinah menyatakan hal yang sama. Dalam kutipan wawancara menyatakan bahwa :

“.....akh neng masyarakat miskin jiga ibu mah, tos kacukupan makan sehari-hari oge tos beryukur, cita-cita mah hoyong eta oge neng gaduh motor, tv anu lebar atawa kabutuhan lain na lah anu serba mewah, rompok oge apan neng ieu teh bantuan pamarentah dialusana....”. (Wawancara dengan I<sub>5-2</sub>, pada tanggal 7 Mei 2016).

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pemerintah melalui kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat memenuhi tingkat kebutuhan hidup masyarakat miskin, walaupun memang disisi lain kondisi tingkat ekonomi masyarakat miskin masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena mayoritas penduduk kampung kumuh sebagian besar masyarakatnya hanya mengandalkan kerja serabutan ataupun sebagai buruh bangunan.

#### **4.3.3.3. Kecukupan Pengawasan**

Agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah digariskan, maka salah satu tugas pelaksana kebijakan adalah melakukan pengawasan. Dalam hal ini menurut keterangan informan Ibu Linda Donarika Marbun, ST, MT, beliau mengungkapkan wawancaranya sebagai berikut :

“..... Sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini, kami hanya menjalankan pembangunannya saja sesuai dengan usulan atau data yang di dapat dari kelurahan, siapa warga masyarakat yang rumahnya perlu direnovasi dan diperbaiki....”. (Wawancara dengan I<sub>1</sub>, pada tanggal 20 Mei 2016)



Sementara itu Bapak Rusianto Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang mengemukakan tentang hal yang sama bahwa :

“.....dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang telah berjalan pengawasan dilakukan salah satunya oleh BKPD ...”  
(Wawancara dengan I<sub>2</sub> pada tanggal 15 Juli 2016)

Pernyataan yang disampaikan tersebut memang benar adanya, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat hanya menjalankan pembangunannya, sementara pengawasan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kecamatan Jatiuwung.

Oleh karena itu, keterkaitan kecukupan pengawasan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait yang menanganinya sesuai dengan prosedur pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kriteria kecukupan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, bahwa kepuasan, tingkat kebutuhan dan kecukupan pengawasan dinilai cukup baik dan positif. Artinya eksistensi tingkat kecukupan dalam suatu program pembangunan pemerintah sangat penting, karena tanpa kapasitas tingkat kecukupan yang memadai, segala faktor modal, loyalitas para pelaksana atau lainnya tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi pembangunan tersebut. Oleh karena itu, kapasitas tingkat kecukupan untuk menunjang pembangunan harus tetap diperhatikan.

#### **4.3.4. Perataan**

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, pihak pemerintah harusnya dapat memberikan bantuan tanpa adanya perbedaan diskriminasi sehingga proses kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin sebagaimana mestinya.

##### **4.3.4.1. Jenis manfaat yang diperoleh**

Pada poin ini output dari kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak, sama halnya dengan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pada pasal 28 diatur mengenai peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan perumahan dan permukiman kampung kumuh. Sejauh ini peneliti melihat bahwa yang paling merasakan manfaat dari diberlakukannya kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat. Menurut Bapak Moch Sadeli Ketua RT. 03/RW. 04, beliau mengatakan;

“.....Manfaat tentu beragam yang jelas manfaat paling nyata dan dirasakan oleh pemerintah ketika kebijakan pembangunan ini dilaksanakan dengan baik walau belum terlaksana secara 100% misal telah dilaksanakan 70% dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah, akan tetapi manfaat dari penataan kampung kumuh ini dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.....”  
(Wawancara dengan I<sub>3-1</sub>, pada tanggal 1 Mei 2016)

Sedangkan Ketua RT. 01/RW. 04 sebagai pelaksana yang terjun langsung menyaksikan kegiatan pembangunan, mengatakan sejauh ini manfaat yang dirasakan dari diimplementasikannya kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat belum tepat sasaran, menurut Bapak Nurman mengungkapkan bahwa :

”..... Manfaat yang didapat dari dilaksanakannya kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ... ya.. terciptanya kondisi rumah yang layak huni, sehat, aman, teratur dan serasi.....”  
(Wawancara dengan I<sub>3-2</sub>, pada tanggal 7 Mei 2016)

Namun belum cukup dengan hal itu, hal serupa ditambahkan oleh Nurman mengenai ketepatan sasaran atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat, yaitu sebagai berikut :

“..... Ya dikatakan tepat sih ya tepat, memang benar untuk RT. 01/RW.04 ini jumlah bangunan rumah kumuh yang mendapat bantuan ada 3 unit rumah, akan tetapi dari 27 rumah yang di data ini, ada 4 rumah yang kondisinya sudah rusak parah, jadi pantaslah jika harusnya keempat rumah ini yang mendapat bantuan terlebih dahulu, akan tetapi menurut koordinator pelaksana, menurutnya masih layak dan tidak dalam status urgensi dan bisa diusulkan kembali untuk pembangunan tahap selanjutnya...”. (Wawancara dengan I<sub>3-2</sub>, pada tanggal 7 Mei 2016).

Pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat memang membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Tangerang Tahun 2005-2025, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau. Artinya arah kebijakan ini, yaitu :
  - a. Untuk mengembangkan rumah vertikal yang layak huni dan terjangkau.
  - b. Untuk memfasilitasi dan merehabilitasi rumah layak huni .
  - c. Untuk memfasilitasi dan bekerjasama membiayai pembangunan perumahan dengan dunia usaha.
  - d. Untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha pengembang.
2. Menurunnya kawasan kumuh permukiman. Artinya arah kebijakan ini, yaitu :
  - a. Dapat meningkatkan daya dukung dan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman.
  - b. Dapat meningkatkan daya dukung dan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.

Akan tetapi di sisi lain, berdasarkan hasil observasi peneliti pernah menanyakan tentang manfaat yang belum dirasakan oleh masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan atas bantuan rehab rumah sederhana sehat ini, menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan rehab rumah tersebut oleh karena keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah Kota Tangerang, padahal mereka pun menginginkan kondisi rumahnya yang layak huni.

Dinas Pekerjaan Umum merupakan bagian dari pelaksana kegiatan pembangunan rehab rumah sederhana sehat di Kota Tangerang sangat penting perannya. Jadi sebagai pihak pelaksana harus memperhatikan ketentuan dan prosedur perencanaan dan penganggaran pembangunan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rani Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, bahwa :

“..... kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang sudah sesuai dengan prosedur, perencanaan dan penganggaran, memang pelaksanaan kegiatan ini harus sinkron sesuai dengan prosedur dan ketentuan baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat miskin yang khususnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak....”. (Wawancara dengan I<sub>2</sub>, pada tanggal 13 Mei 2016)

Kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara umum sudah memenuhi prosedur, perencanaan dan penganggaran mereka melaksanakannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditentukan melalui beberapa keharusan kewajibannya, walaupun menurut penilaian peneliti membutuhkan proses yang cukup lama.

Berdasarkan keterangan informasi dari dari informan di atas, pihak pelaksana yang disebutkan sangat penting perannya guna pelaksanaan kebijakan di lapangan. Masalah data masyarakat peneriman bantuan rehab rumah di setiap kecamatan yang kami terima dari RT/RW harusnya dilakukan pengecekan data kembali. Karena dalam program atau kebijakan pemerintah yang dibuat masih sering terjadi tidak tepat sasaran bagi yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Sedangkan kurangnya jumlah kuota untuk bantuan rehab rumah sederhana sehat ini secara langsung menghambat penanggulangan angka

kemiskinan, artinya masih ada masyarakat yang belum bisa menikmati fasilitas rumah yang layak huni secara memadai. Seharusnya pemerintah menambah alokasi anggaran APBD untuk bantuan ini agar kuota jumlah bantuan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat ditambah lagi.

Oleh karena itu, jenis perataan manfaat yang diperoleh dalam hal ini dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat atas kegiatan program pembangunan tersebut, sehingga proses kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin.

#### **4.3.4.2. Perataan output yang dihasilkan**

Perataan output yang dihasilkan dari adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merfata dan berkeadilan. Pemerintah sangat mendukung terhadap penataan kampung kumuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Linda Donarika Marbun,ST,MT, bahwa :

“..... Ya, tujuan dari program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini sangat diperlukan sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Banten, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman khususnya terkait dengan penataan kampung kumuh, sehingga output dari kebijakan ini dapat mengurangi meluasnya perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Kota Tangerang...”. (Wawancara dengan I<sub>1</sub>, pada tanggal 20 Mei 2016)

Menurut keterangan informasi yang disampaikan Bapak Rusianto Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang bahwa :

“.....tujuan dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada saat itu adalah secara umum adalah untuk meminimalisir berkembangnya perkampungan kumuh sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin...” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> pada tanggal 15 Juli 2016)

Tujuan dari perataan output yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat adalah untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman kampung kumuh, sehingga kebijakan pemerintah ini dapat mengurangi meluasnya perumahan dan permukiman kumuh, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu perekonomian masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi kehidupannya.

Adapun perataan output yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan dana APBD yang diatur dalam kebijakan. Seperti diungkapkan oleh Ibu Rani Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, yang menyatakan bahwa :

“.....Instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dapat menyelesaikan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan atau rencana kerja dan peraturan daerah begitu juga dengan biaya yang menggunakan dana APBD karena setelah pembangunan selesai ada laporannya...”. (Wawancara dengan I<sub>2</sub>, pada tanggal 13 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan di atas, mengungkapkan bahwa memang sebuah program kegiatan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah semestinya didukung oleh sumber dana yang cukup, karena kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika sumber pembiayaan tidak memadai. Seperti halnya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini dimana keterkaitan pembiayaannya yaitu bersumber dari APBD yang sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan

pelaksanaan kegiatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata bagi masyarakat penerima bantuan tersebut.

Oleh karena itu, perataan output yang dihasilkan atas kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat harusnya dilakukan pengecekan ulang kembali data. Karena kebijakan pemerintah yang dibuat masih sering kali terjadi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kriteria perataan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah Kota Tangerang, bahwa jenis manfaat yang diperoleh dan perataan output yang dihasilkan dinilai sudah sesuai dengan prosedur, perencanaan dan penganggaran. Artinya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat diarahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan satu tujuan yang paling utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi kehidupannya.

#### **4.3.5. Responsivitas**

Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat diharapkan mampu menjadi respon pemerintah agar proses kegiatan yang sudah ada ini bisa lebih maksimal, memberikan hasil yang baik, memberikan kemudahan dan tanggap terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakatnya.



#### 4.3.5.1. Memberikan hasil yang baik

Mengingat suatu kebijakan publik yang dibuat pemerintah melalui bentuk program kegiatan atau dalam bentuk peraturan senantiasa mengandung manfaat yang memberikan dapat hasil dari target yang akan dicapai. Tidak hanya untuk masyarakat atau para penerima kebijakan secara langsung akan tetapi para stakeholder (pelaksana) dapat merasakan kemanfaatan yang dicapai. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini harapannya dapat memberikan hasil yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Iksan, warga bukan penerima manfaat di RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya, yaitu :

“.....Ya saya mendukung program kegiatan ini, karena kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum, menurut penilaian saya dapat memberikan hasil yang baik, adanya kegiatan pembangunan tersebut sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan umumnya di Kota Tangerang dan khususnya di wilayah-wilayah kecamatan serta memutuskan rantai kemiskinan melalui strategi dan kebijakan penanganan kampung kumuh....”. (Wawancara dengan I<sub>5-3</sub>, pada tanggal 30 April 2016)

Diperkuat dengan hasil wawancara dengan Ibu Linda yang menyatakan bahwa :

“..... Ya saya dukung, karena jelas manfaat dari adanya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat meminimalisir menjamurnya kampung kumuh yang ada di wilayah Kota Tangerang....”. (Wawancara dengan I<sub>1</sub>, pada tanggal 20 Mei 2016).

Hasil wawancara dengan para informan di atas, bahwa dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, respon baik dari masyarakat ataupun instansi pemerintah pada dasarnya mereka mendukung kegiatan pembangunan tersebut

karena selama ini kebijakan pemerintah ini dapat memberikan hasil yang baik dan positif bagi masyarakatnya.

Oleh karena itu, responsifitas berkenaan dengan memberikan hasil yang baik setidaknya dapat memuaskan kebutuhan dan agar proses kegiatan pembangunan yang sudah ada ini bisa lebih berjalan maksimal, memberikan hasil yang baik, memberikan kemudahan dan tanggap terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut.

#### **4.3.5.2. Kemudahan**

Adapun pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan pihak Pendamping, yaitu Kecamatan dan Pihak Kelurahan bahwa kewenangan dalam melaksanakan kebijakan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat, sebenarnya pemerintah memberikan kemudahan dalam proses permohonan yang diusulkan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rani Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, beliau menyatakan sebagai berikut :

“..... Kami memberi kemudahan, berupa memberikan data yang akurat, karena kelurahan dan kecamatan yang tahu persis kondisi keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan dan Kecamatan Jatiuwung...”.  
(Wawancara dengan I<sub>2</sub>, pada tanggal 13 Mei 2016)

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Rumsinah Warga di RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya. Dalam kutipan hasil wawancaranya menyatakan bahwa :

“..... Ibu mah tidak tahu neng ya, karena ini teh urusannya pak RT yang ngedata-data dulu, soalnya ibu mah tahu nya langsung dibongkar aja

rumah di kasih tahu sama pak RT gak lama setelah nama ibu ditulis ...". (Wawancara dengan I<sub>5-2</sub>, pada tanggal 7 Mei 2016).

Pernyataan yang sama diutarakan oleh Bapak Supriyono yang menyatakan bahwa :

“.....Rumah saya yang diperbaiki ini neng, sebelumnya dilihat dulu keadaannya baru kemudian didata oleh Pak RT untuk mendapatkan bantuan rehab rumah dari pemerintah. (Wawancara dengan I<sub>5-4</sub>, pada tanggal 30 April 2016)

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Rumsinah, Bapak Muhammad Iksan dalam kutipan hasil wawancaranya menambahkan :

“.....Setahu saya sih tidak sulit, tinggal RT dan RW saja yang ngedata langsung siapa saja masyarakat yang layak mendapat program pembangunan tersebut. (Wawancara dengan I<sub>5-3</sub>, pada tanggal 30 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kegiatan dan juga informasi tentang kebijakan pembangunan bedah rumah sehat, memang seharusnya disesuaikan dengan jumlah data yang ada, sehingga akses pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dapat terealisasi secara menyeluruh. Akan tetapi mengingat masih kurangnya anggaran dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka pada akhirnya menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut. Padahal seharusnya masyarakat sudah dapat menikmati sarana pembangunan rumah layak huni tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat, yang diselenggarakan oleh pemerintah harusnya dapat memberikan kemudahan dalam proses permohonannya, dan dapat cepat terealisasi secara menyeluruh, sehingga hasilnya dapat dinikmati. Hal ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap masyarakatnya.

#### 4.3.5.3. Tanggap

Tanggapan pihak terkait terhadap proses kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat di Kota Tangerang yang diatur menurut dasar hukum yang berlaku secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti diungkapkan oleh Linda Donarika Marbun, ST, MT Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang, kutipan wawancara menjelaskan sebagai berikut :

“..... Kegiatan ini sudah diatur menurut dasar hukum yang berlaku dan memiliki payung hukum, sehingga ketentuan dalam proses pelaksanaan program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku.....”.  
(Wawancara dengan I<sub>1</sub>, pada tanggal 20 Mei 2016).

Oleh karena itu, terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dasar hukum yang dimaksud adalah peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang merupakan bagian dari penataan kampung kumuh di Kota Tangerang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kriteria responsivitas dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang, bahwa hasil, kemudahan dan ketanggapan terhadap kegiatan pembangunan dinilai cukup baik, sekalipun akses pemenuhan kegiatan pembangunan tersebut kurang dapat terealisasi secara menyeluruh. Akan tetapi respon baik dari masyarakat ataupun instansi pemerintah pada dasarnya mereka mendukung kegiatan pembangunan tersebut dengan harapan kedepannya pemerintah dapat merespon dan memprioritaskan kembali masyarakat yang belum dapat menikmati sarana pembangunan rumah layak huni tersebut.

#### **4.3.6. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan. Dari proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang merupakan implementasi dari sinergis kebijakan dan kesinambungan antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi Banten dan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam penataan kampung kumuh. Mengacu pada standar operasional pelaksanaannya apakah pembagian peran dan tanggung jawab atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat telah disosialisasikan, tepat tujuan dan manfaat, dapat membawa dampak perubahan terhadap kondisi bangunan dan apakah program kegiatan ini pun membawa dampak positif bagi lingkungan.

#### 4.3.6.1. Ketepatan sosialisasi

Implementasi kebijakan baru akan efektif apabila para pembuat kebijakan dan implementornya mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat tidak hanya ditransmisikan kepada instansi terkait saja, akan tetapi harus ditransmisikan kepada masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat mengetahui telah ada kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, tujuan dari sosialisasi ini untuk mempermudah dan mempercepat pendataan yang dilakukan oleh RT/RW setempat dengan cara memberitahu kepada masyarakat yang layak menerima bantuan rehab rumah tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Rani Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, seperti kutipan hasil wawancara berikut ini :

“..... Kita selaku aparaturnya pemerintah di tingkat kecamatan ini selalu mensosialisasikan setiap program kegiatan pemerintah yang ada, khususnya program bedah rumah sehat ini salah satunya program yang menjadi perhatian dari pemerintah kota Tangerang....”. (Wawancara dengan I<sub>2</sub>, pada tanggal 13 Maret 2016).

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat oleh pemerintah Kota Tangerang, berdasarkan keterangan informan bahwa pihak Kecamatan Jatiuwung telah sesuai melaksanakan sosialisasi kepada tiap kelurahan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaannya.

Tetapi pada praktiknya masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang kegiatan pembangunan bedah rumah sehat tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Muhammad Iksan, warga bukan penerima bantuan di

lingkungan RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya. Kutipan hasil wawancara menyatakan bahwa :

“.....Program bedah rumah sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang selama ini telah terlaksana, disosialisasikannya secara tidak langsung tapi itu hanya disampaikan melalui Ketua RT/RW setempat saja, masyarakat tahunya hanya di data dan diberikan informasi bahwa akan ada bantuan dari pihak pemerintah untuk renovasi rumah ....”. (Wawancara dengan I5-3, pada tanggal 30 April 2016).

Pernyataan informan yang diungkapkan tersebut, memberikan bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan telah ditransmisikan cukup baik secara internal. Akan tetapi pada masyarakat, sosialisasi atas program bedah rumah sehat tersebut RT tidak disampaikan dengan baik karena walaupun sosialisasi telah dilakukan oleh pihak pemerintah baik dari Dinas Pekerjaan Umum maupun dari pihak Kecamatan Jatiuwung melalui kelurahan-kelurahan yang ada tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui atas kebijakan tersebut. Hal ini tentunya dapat menghambat implementasi kebijakan pembangunan bedah rumah sederhana sehat.

Sementara itu ketentuan permohonan dari masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya yang tidak layak huni sebelumnya harusnya instansi atau dinas terkait dan para pihak di bawahnya mensosialisasikannya secara jelas, akurat dan tidak bersifat ambigu sehingga dapat dihindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan (baik data ataupun tidak tepat sasaran). Hal ini sesuai dengan jawaban informan yang diwawancara yaitu Ibu Linda Donarika Marbun,ST,MT Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang. Beliau mengungkapkan :

“..... Kami selalu mensosialisasikan di setiap pertemuan walaupun, tidak semua orang hadir, karena hanya diwakilkan, seperti RT, RW, LSM atau tokoh masyarakat yang ada...”. (Wawancara dengan I<sub>1</sub>, pada tanggal 20 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa isi dan maksud tujuan dari sosialisasi yaitu untuk dipahami dengan baik. Akan tetapi dari implementasi kebijakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung tidak berjalan dengan baik, karena umumnya masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas isi dan maksud kebijakan pemerintah tersebut. Maka dari itu, penyampaian sosialisasi harus jelas dan tepat secara harfiah tidak cukup apabila pelaksana kebijakan itu tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku dari program kebijakan, artinya pelaksana kebijakan tidak hanya secara intern mensosialisasikan sebuah program kebijakan, akan tetapi harus benar-benar tersampaikan kepada pihak masyarakat.

#### **4.3.6.2. Ketepatan antara tujuan dan manfaat**

Perintah yang diberikan kepada implementor harus konsisten, jelas dan tepat antara tujuan dan manfaat karena perintah yang sering berubah-ubah akan membingungkan para pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat tidak akan dapat tercapai. Ketepatan antara tujuan dan manfaat dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dirasa masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari minimnya kuota yang diberikan kepada masing-masing kelurahan. Padahal jumlah rumah yang perlu renovasi jumlahnya cukup banyak. Seperti diungkapkan oleh Bapak Moch. Sadeli Ketua RT. 03/04 sebagai berikut :



“.....dari jumlah bangunan rumah kumuh yang saya tahu datanya, di lokasi Kelurahan Alam Jaya yaitu sekitar 27 rumah yang kondisi fisiknya tidak layak huni....”. (Wawancara dengan I<sub>3-1</sub>, pada tanggal 1 Mei 2016).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti melihat bahwa program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah kuota yang ada masih jauh dari target pencapaian, karena di Kelurahan Alam ini saja yang mendapat program bantuan rehab rumah tersebut baru hanya 7 unit rumah, yaitu 3 unit di lingkungan RT. 03/RW. 04, 3 unit di lingkungan RT. 01/RW. 04 dan 1 unit di lingkungan RT. 01/RW. 06. Padahal jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini masih jauh dari harapan. Apalagi selama peneliti melihat di lapangan bahwa penerimaan manfaat ini rata-rata kepala rumah tangganya hanya memiliki penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari paling besar mereka hanya mendapatkan penghasilan Rp. 10.000,-/hari itupun kalau rejekinya sedang ada, kebanyakan suami mereka hanya bekerja sebagai buruh, tukang ojek, dagang warung kecil-kecilan hanya untuk menyambung hidup saja.

Oleh karena itu, ketepatan antara manfaat dan tujuan dari adanya program bantuan atau kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang terlaksana ini, keluarga RTS (Rumah Tangga Sasaran) penerima bantuan umumnya sangat mengharapkan dan membutuhkan adanya bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak. Untuk itu pemerintah serta pihak terkait di dalamnya sebagai pelaksana kebijakan melaksanakan segala komitmen yang

menjadi tanggung jawabnya sehingga penyediaan rumah layak huni yang dilakukan pemerintah dapat menekan angka kemiskinan.

#### **4.3.6.3. Ketepatan manfaat terhadap bangunan**

Adanya implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya mengharapkan adanya manfaat. Adapun perubahan yang ingin dicapai dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, yaitu ketepatan manfaat terhadap bangunan. Apakah renovasi rumah yang dilaksanakan ini membawa dampak positif perubahan terhadap kondisi bangunan yang berkualitas untuk jangka waktu panjang. Menurut keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Linda Donarika Marbun, ST, MT Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang. Dalam wawancaranya menjelaskan :

“..... Saya rasa ini dapat membawa dampak perubahan yang baik dari sebelumnya, mewujudkan perumahan dan permukiman yang teratur sesuai dengan arahan rencana tata ruang untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan....”. (Wawancara dengan I<sub>1</sub>, pada tanggal 20 Mei 2016).

Hal yang senada diungkapkan oleh Ibu Rani Kasubag Perencanaan Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, dalam kutipan wawancaranya menjelaskan sebagai berikut :

“..... Ya, mempengaruhi juga dengan adanya bedah rumah tata ruang kota menjadi lebih rapih dan dampak manfaat terhadap yang dirasakan masyarakat tidak mampu dapat memiliki kondisi bangunan yang berkualitas dari sebelumnya....”. (Wawancara dengan I<sub>2</sub>, pada tanggal 13 Mei 2016).

Dari ungkapan di atas, peneliti dapat melihat bahwa selain menanggulangi tingkat kemiskinan, program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah

seederhana sehat dapat memberikan manfaat khususnya pada tata ruang kota, sehingga struktur ruang kota menjadi tertata rapih.

#### **4.3.6.4. Ketepatan manfaat terhadap lingkungan**

Kebijakan atau program kegiatan pembangunan yang diperuntukan untuk masyarakat miskin mempunyai tujuan keinginan kearah yang lebih baik. Begitu pula manfaat dari kegiatan renovasi rumah sederhana sehat tersebut apakah membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Bapak Nana Supriatna Ketua RT. 04 / RW. 05 mengungkapkan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“.....saya mah bangga neng atas perubahan kondisi warga di lingkungan RT saya ini, manfaat bantuan rehab rumah ini tidak saja dirasakan bagi warga miskinnya, tapi lingkungan sekitar pun dapat merasakan kerapihan sanitasi lingkungan di sekitar menjadi tertata rapi tidak lagi semrawut dan memenuhi syarat tidak lagi mencemari lingkungan yang berpotensi sebagai penyebaran berbagai penyakit....”. (Wawancara dengan I<sub>3-3</sub>, pada tanggal 27 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, maka dilihat dari ungkapan di atas, bahwa mengenai perubahan setelah adanya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung secara signifikan mengalami perubahan sekalipun pelaksanaannya belum dirasakan 100% oleh masyarakat di wilayah itu. Akan tetapi kontribusi dari kegiatan pembangunan ini memberikan dampak yang sangat baik terhadap sanitasi lingkungan. Dimana yang tidaknya sanitasi pembuangan limbah rumah tangga yang tidak memenuhi syarat, sekarang menjadi tertata karena sistem pembuangan yang memenuhi syarat kesehatan tidak mencemari lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kriteria tentang ketepatan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang, bahwa mengenai ketepatan sosialisasi, ketepatan antara tujuan dan manfaat, ketepatan manfaat terhadap bangunan dan ketepatan manfaat terhadap lingkungan dinilai baik. Artinya pencapaian tujuan kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, diperlukan sosialisasi yang penuh oleh pemerintah itu sendiri kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, peran serta pemerintah di bawahnya, baik kecamatan, kelurahan atau lembaga masyarakat RT/RW sangat diperlukan untuk membantu mensosialisasikan program. Hal ini mengingat akan pentingnya pembangunan yang merata guna mencapai masyarakat miskin yang sejahtera. Selain daripada itu diharapkan kegiatan pembangunan yang terlaksana dapat tepat sesuai tujuan dan manfaat, tepat sesuai manfaat terhadap bangunan dan tepat manfaat terhadap kondisi lingkungan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan pula untuk dapat memperhatikan dan mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan, sehingga kebijakan dari kegiatan program pembangunan yang dibuat dapat dirasakan oleh penerima manfaat.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara mengenai kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang telah dianalisa, maka berikut ini akan peneliti sajikan rangkuman mengenai informasi hasil wawancara yang dianggap dapat mewakili atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang seperti tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.6**  
**Matriks Hasil Wawancara**

Informan	Status Informan	Pencapaian Target Kegiatan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?  “.... Tujuan dan pencapaian target kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat hidup layak dilihat dari rumah yang mereka tempati, walaupun rumahnya sederhana akan tetapi mereka dapat memiliki WC, sanitasi yang baik, memiliki kamar ruang tidur, ruang tamu dan cukup pencahayaan....”.
Informan	Status Informan	Pelaksanaan Kegiatan
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?  “..... Pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat menurut saya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, walaupun yang melaksanakan kegiatan pembangunan ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, kami juga ikut mengawasi dan memonitoring agar kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik dan lancar ....”.
Informan	Status Informan	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?  “..... sejauh ini kegiatan pembangunan

		sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan...”.
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah abentuk dari kebijakan ini membawa manfaat yang sesuai dengan keinginan masyarakat ?  “..... kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini bertujuan agar masyarakat yang kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni dapat menikmati hidup layak karena rumah merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat pasti membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat....”.
Informan	Status Informan	Kecepatan Pelaksanaan Kegiatan
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Seberapa lama penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sehat ?  “.... kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat untuk 1 unit rumah penyelesaiannya kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya...”.
Informan	Status Informan	Kecukupan Pengawasan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Sebagai instansi pelaksanaan proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari <i>stakeholder</i> setempat kurang tepat sasaran ?  “..... Sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini, kami hanya menjalankan pembangunannya saja sesuai dengan usulan atau data yang di dapat dari kelurahan, siapa warga masyarakat yang rumahnya perlu direnovasi dan

		diperbaiki....”.
Informan	Status Informan	Jenis Manfaat Yang Diperoleh
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat ?  “..... kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang sudah sesuai dengan prosedur, perencanaan dan penganggaran, memang pelaksanaan kegiatan ini harus sinkron sesuai dengan prosedur dan ketentuan baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat miskin yang khususnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak....”.
Informan	Status Informan	Perataan Output Yang Dihasilkan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah tujuan dari output kebijakan program pembangunan rumah sederhana sehat ini mutlak diperlukan untuk meminimalisir menjamurnya pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali ?  “..... Ya, tujuan dari program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini sangat diperlukan sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Banten, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman khususnya terkait dengan penataan kampung kumuh, sehingga output dari kebijakan ini dapat mengurangi meluasnya perumahan

		dan permukiman kumuh yang ada di Kota Tangerang...”.
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan dana APBD yang diatur dalam kebijakan perda ?  “.....Instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dapat menyelesaikan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan atau rencana kerja dan peraturan daerah begitu juga dengan biaya yang menggunakan dana APBD karena setelah pembangunan selesai ada laporannya...”.
Informan	Status Informan	Memberikan Hasil Yang Baik
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah Bapak/Ibu mendukung program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang telah dilakukan oleh pemerintah karena memberikan hasil yang baik bagi masyarakat miskin yang kurang mampu ?  “..... Ya saya dukung, karena jelas manfaat dari adanya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat meminimalisir menjamurnya kampung kumuh yang ada di wilayah Kota Tangerang....”.
Informan	Status Informan	Kemudahan
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah dinas diberikan kewenangan melaksanakan kebijakan dari pemerintah memberikan kemudahan dalam proses permohonan yang diusulkan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ?  “..... Kami memberi kemudahan, berupa memberikan data yang akurat,



		karena kelurahan dan kecamatan yang tahu persis kondisi keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan dan Kecamatan Jatiuwung...”.
Informan	Status Informan	Tanggapan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang yang diatur menurut dasar hukum yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik ?  “..... Kegiatan ini sudah diatur menurut dasar hukum yang berlaku dan memiliki payung hukum, sehingga ketentuan dalam proses pelaksanaan program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku....”.
Informan	Status Informan	Ketepatan Sosialisasi
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat oleh pemerintah Kota Tangerang telah sesuai dengan aturan yang disosialisasikan ?  “..... Kita selaku aparaturn pemerintah di tingkat kecamatan ini selalu mensosialisasikan setiap program kegiatan pemerintah yang ada, khususnya program bedah rumah sehat ini salah satunya program yang menjadi perhatian dari pemerintah kota Tangerang....”.
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah ketentuan permohonan dari masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya yang tidak layak huni sebelumnya instansi atau dinas terkait telah mensosialisasikannya ?  “..... Kami selalu mensosialisasikan di setiap pertemuan

		walaupun, tidak semua orang hadir, karena hanya diwakilkan, seperti RT, RW, LSM atau tokoh masyarakat yang ada...”.
Informan	Status Informan	Ketepatan Manfaat Terhadap Bangunan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah renovasi ini membawa dampak perubahan terhadap kondisi bangunan yang berkualitas untuk jangka waktu panjang ? “..... Saya rasa ini dapat membawa dampak perubahan yang baik dari sebelumnya, mewujudkan perumahan dan permukiman yang teratur sesuai dengan arahan rencana tata ruang untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan....”.
I <sub>2</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Menurut Bapak, selain menanggulangi tingkat kemiskinan, apakah program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat memberikan manfaat khususnya pada tata ruang kota, sehingga struktur ruang kota menjadi tertata rapih ? “..... Ya, mempengaruhi juga dengan adanya bedah rumah tata ruang kota menjadi lebih rapih dan dampak manfaat terhadap yang dirasakan masyarakat tidak mampu dapat memiliki kondisi bangunan yang berkualitas dari sebelumnya....”.

#### 4.4. Pembahasan

Langkah selanjutnya adalah pembahasan, yaitu melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan

teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah model teori Dunn. Teori ini menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat yang pada saat itu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang. Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, yaitu sebagai berikut :

#### **4.4.1. Efektivitas**

Efektivitas berkaitan dengan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan ini adalah sasaran dari kebijakan publik yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap kebijakan mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun perubahan yang ingin dicapai dari kebijakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, harapan pemerintah dan masyarakat menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Kebijakan ini memang sangat mendukung terhadap penataan kampung kumuh, mengatur semua aspek tata ruang di Kota Tangerang sehingga mampu menciptakan Kota Tangerang yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah.

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target kegiatan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. pencapaian target dari kegiatan pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat memang cukup dirasakan khususnya di Kecamatan Jatiuwung yaitu, sudah terlihat hasilnya masyarakat yang rumahnya telah direnovasi sekarang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari WC, kamar ruang tidur maupun ruang tamu dan dapat merasakan pencahayaan yang bagus. Selain itu kegiatan tersebut pun dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. karena masyarakat merasakan bahwa kebijakan pembangunan yang telaksana cukup baik. Dengan demikian masyarakat tahu bahwa tujuan dan sasaran dari efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, yaitu mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sekalipun dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara menyeluruh, akan tetapi setidaknya pencapaian target kegiatan tersebut cukup baik dan dapat memberikan perubahan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Hasilnya saat ini masyarakat penerima bantuan sudah dapat menikmati rumah sehat yang layak huni.

Adapun pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diimplementasikan, proses pelaksanaannya berjalan dengan cukup baik. Dimana setiap elemen dari pemerintah, lembaga masyarakat ataupun keluarga peneriman manfaat saling bekerjasama, khususnya Kecamatan

Jatiuwung Kota Tangerang, selaku instansi pemerintah yang sekaligus memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, walaupun yang melaksanakan kegiatan pembangunan ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, karena itu memang sebuah program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan sendirinya secara baik bila tidak ada keterkaitan dengan pihak lainnya.

#### **4.4.2. Efisien**

Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Efisiensi disini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang diinginkan. Di dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh pihak pemerintah Kota Tangerang pada masyarakatnya khususnya di Kecamatan Jatiuwung.

Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dalam kaitan ini merupakan otoritas kewenangan atau legitimasi bagi para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, Dinas Pekerjaan Umum memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Tangerang

Berdasarkan hasil penelitian, keberlangsung program kebijakan pembangunan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan. Seluruh pihak yang berkaitan didalamnya menjalin hubungan kerjasama secara baik demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat sebagai bagian dari mensukseskan program pemerintah dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Selain dari pada itu bentuk bantuan yang diperuntukan untuk kalangan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah dan berada di wilayah perkampungan kumuh dapat merasakan dan menikmati secara langsung. Kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan tersebut, anggaran yang digunakan bersumber dari APBD. Ddalam pelaksanaannya biaya yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat tersebut sesuai dengan komitmen dari pemerintah. Pada dasarnya sumber biaya yang diberikan oleh pemerintah secara optimal dapat mencukupi, sekalipun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat belum dapat terlaksana secara menyeluruh khususnya bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Hal ini karena anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD sangatlah terbatas untuk direalisasikan terhadap kegiatan pembangunan tersebut.

Sementara itu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi tercapainya keberhasilan suatu kebijakan. Artinya, kecepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat nantinya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas produk pembangunan yang sesuai

dengan harapan pemerintah dan masyarakatnya. Berdasarkan keterangan informan tersebut yang menyatakan bahwa penyelesaian kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat berjalan sesuai dengan harapan, setelah dirinya menerima bantuan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat mengalami perubahan kondisi yang membanggakan. Dengan adanya bantuan tersebut, maka dapat meringankan beban ekonomi sekalipun mungkin di dalam proses kegiatan tersebut masih ada hambatan dan kendala yang dihadapi, tetapi masyarakat mungkin memahami dan memaklumi keadaan kondisi tersebut.

#### **4.4.3. Kecukupan**

Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria pula di dalam proses evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah biasanya mengharapkan suatu perubahan kondisi yang lebih baik sesuai dan dapat memuaskan baik bagi pelaksanaannya maupun bagi masyarakat yang menerima bantuan rumah.

Berdasarkan hasil penelitian, adanya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat, masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah ini dinilai positif. Mereka mengalami perubahan kehidupan yang memuaskan karena dapat memiliki rumah sederhana sehat yang layak huni. Dilihat dari ungkapan mengenai

kepuasan tentunya secara signifikan dapat memberikan kepuasan, walaupun kondisi hidup masih jauh dari kata sejahtera. Akan tetapi mereka sangat terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat karena dapat meringankan biaya beban mereka untuk membiayai kebutuhan merenovasi rumahnya menjadi rumah yang layak huni.

Sedangkan dilihat dari tingkat kebutuhan, mungkin pemerintah melalui kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini secara tidak langsung dapat memenuhi tingkat kebutuhan hidup masyarakat, walaupun memang disisi lain kondisi tingkat ekonomi masyarakat masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Selanjutnya, agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah digariskan, maka salah satu tugas pelaksana kebijakan adalah melakukan pengawasan. Hal itu dibenarkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa memang benar adanya, akan tetapi dalam kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum hanya menjalankan pembangunannya, sementara pengawasan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kecamatan Jatiuwung.

#### **4.4.4. Perataan**

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, pihak pemerintah harusnya dapat memberikan bantuan tanpa adanya perbedaan



diskriminasi sehingga proses kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin sebagaimana mestinya.

Kebijakan pemerintah berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan itu. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat memang membawa manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, berdasarkan hasil observasi peneliti pernah menanyakan tentang manfaat yang belum dirasakan oleh masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan atas bantuan rehab rumah sederhana sehat ini, menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan rehab rumah tersebut oleh karena keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah Kota Tangerang. Dinas Pekerjaan Umum merupakan bagian dari pelaksana kegiatan pembangunan rehab rumah sederhana sehat di Kota Tangerang dapat memperhatikan ketentuan dan prosedur perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Berdasarkan keterangan informan bahwa pihak pelaksana yang disebutkan sangat penting perannya guna pelaksanaan kebijakan. Masalah data masyarakat penerimaan bantuan rehab rumah di setiap kecamatan yang kami terima dari RT/RW harusnya dilakukan pengecekan kembali. Karena kebijakan pemerintah

yang dibuat masih sering terjadi tidak tepat sasaran. Sedangkan kurangnya jumlah kuota untuk bantuan rehab rumah sederhana sehat ini secara langsung menghambat penanggulangan angka kemiskinan, artinya masih ada masyarakat yang belum bisa menikmati fasilitas rumah yang layak huni secara memadai. Seharusnya pemerintah menambah alokasi anggaran APBD untuk bantuan ini agar kuota jumlah bantuan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat ditambah lagi.

Adapun perataan output yang dihasilkan dari adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan dana APBD yang diatur dalam kebijakan. Keterangan informan menjelaskan memang sebuah program kegiatan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah semestinya didukung oleh sumber dana yang cukup, karena kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika sumber pembiayaan tidak memadai.

#### **4.4.5. Responsifitas**

Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat diharapkan mampu menjadi respon pemerintah agar proses kegiatan yang sudah ada ini bisa lebih maksimal, memberikan hasil yang baik, memberikan kemudahan dan tanggap terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakatnya.

Mengingat suatu kebijakan publik yang dibuat pemerintah melalui bentuk program kegiatan atau dalam bentuk peraturan senantiasa mengandung manfaat yang dapat memberikan hasil baik dari target yang akan dicapai. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini harapannya dapat memberikan hasil yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, respon baik dari masyarakat ataupun instansi pemerintah pada dasarnya mereka mendukung kegiatan pembangunan tersebut karena selama ini kebijakan pemerintah ini dapat memberikan hasil yang baik dan positif bagi masyarakatnya.

Adapun kebijakan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat, sebenarnya pemerintah memberikan kemudahan dalam proses permohonan yang diusulkan dari masyarakat. Hasil wawancara dengan informan mendukung bahwa kebijakan pembangunan bedah rumah sehat, memang seharusnya disesuaikan dengan jumlah data yang ada, sehingga akses pemenuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin dapat terealisasi secara menyeluruh.

Adapun tanggapan pihak terkait terhadap proses kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat di Kota Tangerang yang diatur menurut dasar hukum yang berlaku secara umum dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sudah diatur menurut dasar hukum yang berlaku dan memiliki payung hukum, sehingga ketentuan dalam proses pelaksanaan program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

#### **4.4.6. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan. Dari proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang merupakan implementasi dari sinergis kebijakan dan kesinambungan antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi Banten dan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam penataan kampung kumuh.

Mengacu pada standar operasional pelaksanaannya bahwa pembagian peran dan tanggung jawab atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat telah disosialisasikan, tepat tujuan dan manfaat, membawa dampak perubahan terhadap kondisi bangunan dan selain dari pada itu membawa dampak positif bagi lingkungan. Hal ini diperkuat dengan dengan informan pihak Kecamatan Jatiuwung telah sesuai melaksanakan sosialisasi kepada tiap kelurahan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaannya. Hal ini memberikan bukti bahwa sosialisasi yang dilakukan telah ditransmisikan cukup baik secara internal. Akan tetapi pada masyarakat, sosialisasi atas program bedah rumah sehat tersebut RT tidak disampaikan dengan baik karena walaupun sosialisasi telah dilakukan oleh pihak pemerintah baik dari Dinas Pekerjaan Umum maupun dari pihak Kecamatan Jatiuwung melalui kelurahan-kelurahan yang ada tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengetahui atas kebijakan tersebut. Hal ini tentunya dapat menghambat implementasi kebijakan pembangunan bedah rumah sederhana sehat.

Perintah yang diberikan kepada implementor harus konsisten, jelas dan tepat antara tujuan dan manfaat karena sehingga tujuan dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat tidak akan dapat tercapai. Hasil observasi peneliti di lapangan melihat bahwa program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah kuota yang ada masih jauh dari target pencapaian, karena di Kelurahan Alam ini saja yang mendapat program bantuan rehab rumah tersebut baru hanya 7 unit rumah, yaitu 3 unit di lingkungan RT. 03/RW. 04, 3 unit di lingkungan RT. 01/RW. 04 dan 1 unit di lingkungan RT. 01/RW. 06. Padahal jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini masih jauh dari harapan, apalagi melihat kondisi di lapangan bahwa penerimaan manfaat ini rata-rata kepala rumah tangganya hanya memiliki penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari paling besar mereka hanya mendapatkan penghasilan Rp. 10.000,-/hari itupun kalau rejekinya sedang ada, kebanyakan suami mereka hanya bekerja sebagai buruh, tukang ojek, dagang warung kecil-kecilan hanya untuk menyambung hidup saja. Ketepatan antara manfaat dan tujuan dari adanya program bantuan atau kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang terlaksana ini, keluarga penerima bantuan umumnya sangat mengharapkan dan membutuhkan adanya bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.

Adapun perubahan yang ingin dicapai dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, yaitu ketepatan manfaat terhadap bangunan.

Dari ungkapan informan, peneliti dapat melihat bahwa selain menanggulangi tingkat kemiskinan, program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat memberikan manfaat khususnya pada tata ruang kota, sehingga struktur ruang kota menjadi tertata rapih.

Kebijakan kegiatan pembangunan yang diperuntukan untuk masyarakat miskin mempunyai tujuan keinginan kearah yang lebih baik. Begitu pula manfaat dari kegiatan renovasi rumah sederhana sehat membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya, jika dilihat dari ungkapan informan, bahwa mengenai perubahan setelah adanya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung secara signifikan mengalami perubahan sekalipun pelaksanaannya belum dirasakan 100% oleh masyarakat di wilayah itu. Akan tetapi kontribusi dari kegiatan pembangunan ini memberikan dampak yang sangat baik terhadap sanitasi lingkungan. Dimana yang tidaknya sanitasi pembuangan limbah rumah tangga yang tidak memenuhi syarat, sekarang menjadi tertata karena sistem pembuangan yang memenuhi syarat kesehatan tidak mencemari lingkungan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah penelitian, maka peneliti melakukan penyimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan optimal. Hal tersebut berdasarkan temuan lapangan peneliti yaitu adanya keterbatasan kuota masing-masing kelurahan tidak sesuai dengan hasil kebijakan yang terlaksana dimana jumlah rumah sasaran penerimaan bantuan dalam dokumen rencana tindak komunitas realisasi pembangunan karena ada sebanyak 14 unit rumah yang dibangun menggunakan dana APBD. Tidak adanya kejelasan sosialisasi dan kriteria dalam penetapan masyarakat penerima bantuan karena kondisi yang hampir sama di wilayah/kawasan penerima bantuan yang sama-sama membutuhkan bantuan rehab rumah, kondisi ini juga dikarenakan tidak maksimalnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan bedah rumah dan perlu dilakukan secara bertahap. Serta kurangnya sosialisasi mengenai manfaat, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan pembangunan tersebut.



## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti paparkan di atas maka peneliti mencoba memberikan saran terhadap hasil penelitian agar dapat membantu para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Jatiuwung sesuai dengan tujuan program yang telah digariskan sebagai berikut :

1. Melakukan upaya penurunan secara signifikan kawasan kumuh dengan memaksimalkan peran dari lembaga dan dinas terkait secara bersinergi. Upaya ini dimaksudkan agar adanya peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan kawasan kumuh melalui peningkatan kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan serta penyusunan rencana tindak penanganan kampung kumuh.
2. Melakukan survei secara menyeluruh di setiap wilayah Kota Tangerang dalam menentukan kawasan dan masyarakat penerima manfaat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke kawasan yang berdasarkan data di Badan Pusat Statistik Kota Tangerang.
3. Melakukan sosialisasi secara bertahap sehingga tepat sasaran dalam mensosialisasikan maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial yang ada seperti koran lokal dan penempatan spanduk-spanduk di tempat umum dan melakukan diskusi dengan warga setempat dalam memberikan pemahaman bagaimana

mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan bedah rumah sederhana sehat.

4. Menambah jumlah anggaran APBD, sehingga masyarakat penerima manfaat dapat secara adil menikmati hasil atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat, mengingat jumlah penerimaan manfaat saat ini masih belum menikmati sarana dan prasarana rumah sehat yang layak huni tersebut.
5. Melakukan upaya-upaya pendataan masyarakat dengan memaksimalkan peran RT/RW, untuk memberikan arahan atau sosialisasi dalam menentukan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat serta melakukan musyawarah untuk mengatasi permasalahan dan menemukan solusi bersama-sama, serta pendampingan pada saat proses pembangunan rumah sederhana sehat mulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan selesai, sehingga hasilnya dapat merubah paradigma masyarakat akan pentingnya rumah sederhana sehat yang layak huni bagi kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2012. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : UNDIP Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Denzin K, Norman dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : DIA FISIP UI.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Cetakan Ke-2. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Cetakan Ke-3 Revisi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati Sugijanto. 2005. *Pengembangan Kota Indonesia Dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Cetakan Buku Ke-1. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Solichin, Abdul Wahab. 2011. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Edisi dan Revisi Terbaru. Jakarta : PT. Buku Seru CAPS.

\_\_\_\_\_. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Presindo.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Prasetya Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA FISIP Universitas Indonesia: Jakarta.

Miles, Matthew dan Huberman, Michael. 2007 *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

**Dokumen :**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

**Sumber lain :**

Umajah.M, Siti. 2008. Tesis dengan Judul: Perbaikan Kampung Komprehensif dan Dampaknya Kesejahteraan Sosial serta kemandirian masyarakat miskin kampung kumuh dikota Surabaya. Universitas Air Langga. Hal 45. (diakses tanggal 10 juni 2010).

## Lampiran 2

### MEMBER CHECK

Nama : Linda Donarika Marbun,ST,MT  
(Kasi Pengawasan Bangunan Gedung Hunian Rumah  
Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang)

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 20 Mei 2016

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Tujuan dan pencapaian target kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat hidup layak dilihat dari rumah yang mereka tempati, walaupun rumahnya sederhana akan tetapi mereka dapat memiliki WC, sanitasi yang baik, memiliki kamar ruang, ruang tamu dan cukup pencahayaan.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Ya, sangat membantu dengan baik.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Saya rasa ini sudah diinformasikan oleh kelurahan melalui RT/RW setempat yang telah terdata masyarakatnya.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Ya ... sangat baik.

- Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?
- Jawab : Saya berjalan dengan baik tidak ada hambatan di lapangan.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Sejauh ini kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Ya sudah pasti membawa manfaat.
- Tanya : Seberapa lama proses penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ?
- Jawab : Yang pasti waktu itu sekitar 3 bulan lama penyelesaiannya.
- Tanya : Sebagai instansi pelaksana program kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik untuk mencegah adanya KKN, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari *stakeholder* setempat kurang tepat sasaran ?
- Jawab : Sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini, kami hanya menjalankan pembangunannya saja sesuai dengan usulan atau data yang di dapat dari kelurahan, siapa warga masyarakat yang rumahnya perlu direnovasi dan diperbaiki.
- Tanya : Apakah tujuan dari output kebijakan program pembangunan rumah sederhana sehat ini mutlak diperlukan untuk meminimalisir menjamurnya pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali ?

- Jawab : Ya, tujuan dari program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini sangat diperlukan sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Banten, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman khususnya terkait dengan penataan kampung kumuh, sehingga output dari kebijakan ini dapat mengurangi meluasnya perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Kota Tangerang.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu mendukung program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang telah dilakukan oleh pemerintah karena memberikan hasil yang baik bagi masyarakat miskin yang kurang mampu ?
- Jawab : Ya saya dukung, karena jelas manfaat dari adanya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat meminimalisir menjamurnya kampung kumuh yang ada di wilayah Kota Tangerang.
- Tanya : Apakah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang yang diatur menurut dasar hukum yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik ?
- Jawab : Kegiatan ini sudah diatur menurut dasar hukum yang berlaku dan memiliki payung hukum, sehingga ketentuan dalam proses pelaksanaan program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
- Tanya : Apakah ketentuan permohonan dari masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya yang tidak layak huni sebelumnya instansi atau dinas terkait telah mensosialisasikannya ?
- Jawab : Kami selalu mensosialisasikan di setiap pertemuan walaupun, tidak semua orang hadir, karena hanya diwakilkan, seperti RT, RW, LSM atau tokoh masyarakat yang ada.
- Tanya : Apakah renovasi ini membawa dampak perubahan terhadap kondisi bangunan yang berkualitas untuk jangka waktu panjang ?

Jawab : Saya rasa ini dapat membawa dampak perubahan yang baik dari sebelumnya, mewujudkan perumahan dan permukiman yang teratur sesuai dengan arahan rencana tata ruang untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Informan

**Linda DonarikaMarbun,ST,MT**  
NIP. 19721102 200003 2003



## MEMBER CHECK

Nama : Rusianto  
(Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang)

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 15 Juli 2016

---

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Tujuan pembangunan infrastruktur ini, saya rasa masyarakat pun sejak awal tahu bahwa program ini untuk penanganan kawasan kumuh, dalam arti tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yaitu mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Tentu saja membantu sekali, apalagi program ini saya rasa dapat disambut baik oleh masyarakat yang kurang mampu.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Ya sudah tahu karena sebelumnya program ini disosialisasikan oleh RT/RW yang ada di lingkungannya.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Pelaksanaannya baik berjalan lancar.

- Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?
- Jawab : Berjalan baik, pembangunan selesai sesuai rencana.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Ya... sudah pasti penyelesaian harus tepat waktu mengingat kondisi biaya anggaran yang digunakan.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Membawa manfaat sesuai dengan harapan masyarakat.
- Tanya : Seberapa lama proses penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ?
- Jawab : Kurang lebih 3 bulan dapat diselesaikan.
- Tanya : Sebagai instansi pelaksana proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik untuk mencegah adanya KKN, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari *stakeholder* setempat kurang tepat sasaran ?
- Jawab : Ya secara prakteknya di lapangan sudah tepat, namun masih kurang.
- Tanya : Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat ?
- Jawab : Terlaksana sesuai dengan prosedur, perencanaan dan penganggaran.
- Tanya : Seberapa lama penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sehat ?

- Jawab : Setahu saya kegiatan ini yang sudah berlangsung untuk penyelesaian 1 unit rumah kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya.
- Tanya : Sebagai instansi pelaksanan proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari *stakeholder* setempat kurang tepat sasaran ?
- Jawab : Dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang telah berjalan pengawasan dilakukan salah satunya oleh BKPD.
- Tanya : Apakah tujuan dari output kebijakan program pembangunan rumah sederhana sehat ini mutlak diperlukan untuk meminimalisir menjamurnya pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali ?
- Jawab : Tujuan dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada saat itu adalah secara umum adalah untuk meminimalisir berkembangnya perkampungan kumuh sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Informan,

**Rusianto**

NIP. ....

## MEMBER CHECK

Nama : Rani, S.Si  
(Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang)

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 13 Mei 2016

---

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Tujuan yang ingin dicapai pemerintah yaitu menata dan menanggulangi berkembangnya kampung kumuh agar kondisinya dapat lebih baik, pencapaian target yang terlaksana cukup baik sekalipun masih terbatasnya anggaran.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Sejauh ini kegiatan pembangunan cukup baik dan dapat dirasakan hasilnya, menurut saya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial pada masyarakat yang dapat bantuan, karena rumah mereka sudah dapat dikatakan layak huni dan mengurangi kesenjangan antar warga.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Masyarakat mengetahui kegiatan ini, sekalipun ya mungkin tidak seluruhnya, karena pasti masyarakat yang hanya masuk dalam data saja yang kemungkinan besar mengetahui

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

- Jawab : Ya baik, kebijakan pembangunan ini lancar.
- Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?
- Jawab : Ya berjalan baik seperti yang saya lihat.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Secara otomatis memang harus dapat terselesaikan secara tepat waktu dan biaya yang efisien.
- Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?
- Jawab : Pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat menurut saya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, walaupun yang melaksanakan kegiatan pembangunan ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, kami juga ikut mengawasi dan memonitoring agar kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini bertujuan agar masyarakat yang kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni dapat menikmati hidup layak karena rumah merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat pasti membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat.
- Tanya : Sebagai instansi pelaksana proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik untuk mencegah adanya KKN, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari *stakeholder* setempat kurang tepat sasaran ?

- Jawab : Kami disini melaksanakan saja sesuai dengan perintah yang dapat dengan sebaik mungkin.
- Tanya : Seberapa lama proses penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ?
- Jawab : Kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat untuk 1 unit rumah penyelesaiannya kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya.
- Tanya : Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat ?
- Jawab : Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang sudah sesuai dengan prosedur, perencanaan dan penganggaran, memang pelaksanaan kegiatan ini harus sinkron sesuai dengan prosedur dan ketentuan baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat miskin yang khususnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak.
- Tanya : Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan dana APBD yang diatur dalam kebijakan perda ?
- Jawab : Instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dapat menyelesaikan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan atau rencana kerja dan peraturan daerah begitu juga dengan biaya yang menggunakan dana APBD karena setelah pembangunan selesai ada laporannya
- Tanya : Apakah dinas diberikan kewenangan melaksanakan kebijakan dari pemerintah memberikan kemudahan dalam proses permohonan yang diusulkan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ?
- Jawab : Kami memberi kemudahan, berupa memberikan data yang akurat, karena kelurahan dan kecamatan yang tahu persis

- kondisi keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan dan Kecamatan Jatiuwung.
- Tanya : Apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat oleh pemerintah Kota Tangerang telah sesuai dengan aturan yang disosialisasikan ?
- Jawab : Kita selaku aparatur pemerintah di tingkat kecamatan ini selalu mensosialisasikan setiap program kegiatan pemerintah yang ada, khususnya program bedah rumah sehat ini salah satunya program yang menjadi perhatian dari pemerintah kota Tangerang.
- Tanya : Apakah renovasi ini membawa dampak perubahan terhadap kondisi bangunan yang berkualitas untuk jangka waktu panjang ?
- Jawab : Ya, mempengaruhi juga dengan adanya bedah rumah tata ruang kota menjadi lebih rapih dan dampak manfaat terhadap yang dirasakan masyarakat tidak mampu dapat memiliki kondisi bangunan yang berkualitas dari sebelumnya.

Informan

**Rani, S.Si**

NIP. 19840912 20021 22002

## MEMBER CHECK

Nama : Moch. Sadeli  
(Ketua RT. 03/RW. 04)

Umur : 42 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 1 Mei 2016

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Sangat baik dapat membantu masyarakat miskin disini.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Ya, kegiatan ini baik neng membantu secara sosial dan ekonomi.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Ya... karena saya yang menginformasikannya.

Tanya : Apakah masyarakat di sini mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Masyarakat di RT saya ini tahu neng adanya kegiatan rehab rumah dari pemerintah Kota Tangerang, waktu itu saya kumpulin warga di rumah yang terdata terus saya kasih tahu siapa saja yang dapat bantuan bedah rumah. Sebelumnya juga ada banyak orang dari pemerintah kesini kasih tahu banyak masalah pembangunan rumah ini katanya mau ada bantuan rehab rumah.



- Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?
- Jawab : Cukup baik.
- Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?
- Jawab : Sesuai kondisi di lapangan, pembangunan dapat berjalan dengan baik.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Kalo menurut saya pekerjaan yang dilaksanakan selesai tepat waktu akan tetapi besaran biaya yang digunakan tidak tahu persis.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Ya membawa manfaat bagi masyarakat.
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Saya rasa masyarakat sudah menikmati dengan nyaman dari rumah yang sebelumnya.
- Tanya : Seberapa lama proses penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ?
- Jawab : Sesuai pelaksanaan
- Tanya : Sebagai instansi pelaksana program kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik untuk mencegah adanya KKN, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari *stakeholder* setempat kurang tepat sasaran ?

- Jawab : Sudah baik tepat sasaran
- Tanya : Menurut Bapak apakah dengan adanya kegiatan pembangunan di lingkungan RT ini dapat memberikan manfaat positif bagi warga bapak di sini yang mendapatkan renovasi rumah ?
- Jawab : Manfaat tentu beragam yang jelas manfaat paling nyata dan dirasakan oleh pemerintah ketika kebijakan pembangunan ini dilaksanakan dengan baik walau belum terlaksana secara 100% misal telah dilaksanakan 70% dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah, akan tetapi manfaat dari penataan kampung kumuh ini dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.
- Tanya : Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?
- Jawab : Ya pembangunan sangat tepat sasaran dan banyak manfaatnya bagi lingkungan.

Informan,

**Moch. Sadeli**

## MEMBER CHECK

Nama : Nurman  
(Ketua RT. 01/RW. 04)

Umur : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 7 Mei 2016

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Membantu masyarakat miskin yang tidak mampu, agar rumahnya dapat lebih baik.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Menurut saya kegiatan ini bagus dan baik, karena membantu meringankan beban kebutuhan ekonomi masyarakat miskin.

Tanya : Apakah masyarakat di sini mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Sebenarnya program bantuan rehab rumah ini sudah saya sosialisasikan sekalipun bukan tugas dan kewenangan penuh sebagai RT ataupun RW, akan tetapi karena tugas kita mendata warga siapa saja yang berhak mendapatkannya, makanya saya informasikan, ya itupun hanya sebatas gambaran mengenai jumlah unit rumah yang menerima bantuan.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Sangat baik.

Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?

Jawab : Secara keseluruhan tidak ada hambatan dan berjalan baik sesuai harapan.

Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?

Jawab : Pembangunan selesai tepat waktu, akan tetapi besaran biaya saya tidak tahu pasti.

Tanya : Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?

Jawab : Manfaat yang didapat dari dilaksanakannya kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ... ya terciptanya kondisi rumah yang layak huni, sehat, aman, teratur dan serasi.

Ya tepat sasaran, memang benar untuk RT. 01/RW.04 ini jumlah bangunan rumah kumuh yang mendapat bantuan ada 3 unit rumah, ini karena memang kondisi rumah tersebut sudah rusak parah, jadi pantaslah jika mendapat bantuan. Sekalipun masih banyak kondisi rumah yang perlu direhab, akan tetapi menurut koordinator pelaksana masih layak dan tidak dalam status urgensi dan bisa diusulkan kembali untuk pembangunan tahap selanjutnya.

Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?

Jawab : Dapat dinikmati secara nyaman, karena lebih sehat dan aman.

Tanya : Seberapa lama proses penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ?

Jawab : Sesuai yang dijadwalkan dari rencananya.

- Tanya : Sebagai instansi pelaksana proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik untuk mencegah adanya KKN, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari *stakeholder* setempat kurang tepat sasaran ?
- Jawab : Baik dan tepat sasaran.
- Tanya : Menurut Bapak apakah dengan adanya kegiatan pembangunan di lingkungan RT ini dapat memberikan manfaat positif bagi warga bapak di sini yang mendapatkan renovasi rumah ?
- Jawab : Ya sangat positif dan baik, masyarakat miskin merasa terbantu.
- Tanya : Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?
- Jawab : Ya tepat sasaran sekaligus bermanfaat.

Informan,

**Nurman**

## MEMBER CHECK

Nama : Nana Supriatna  
(Ketua RT. 04 / RW. 05)

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 27 April 2016

---

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Tujuannya sangat baik, pencapaian target tepat sasaran dan terlaksana dengan baik

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Cukup baik dan positif program kegiatan dari pemerintah ini.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Sudah, ya sudah mengetahui.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Baik, pembangunan dapat selesai sesuai harapan.

Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada di RW 04 ini berjalan baik ?

- Jawab : saya dapat melihat sendiri neng pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat waktu itu, jadinya selaku RT disini melihat dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut sudah bagus lah cukup baik dan positif, bantuan rehab rumah dari pemerintah diarahkan kepada keluarga miskin yang kondisi sosial ekonominya rendah.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Selesai tepat waktu, masalah biaya saya tidak pernah menanyakan dan hanya melaksanakan yang harus saya kerjakan.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Ya bermanfaat.
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Sudah pasti.
- Tanya : Seberapa lama proses penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ?
- Jawab : Proses penyelesaian setahu saya 3 bulan dalam pelaksanaannya.
- Tanya : Sebagai instansi pelaksanan proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik untuk mencegah adanya KKN, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari *stakeholder* setempat kurang tepat sasaran ?
- Jawab : Tepat sasaran sesuai data yang ada.
- Tanya : Menurut Bapak apakah dengan adanya kegiatan pembangunan di lingkungan RT ini dapat memberikan manfaat positif bagi warga bapak di sini yang mendapatkan renovasi rumah ?

- Jawab : Ya memberikan manfaat secara baik
- Tanya : Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?
- Jawab : Sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
- Tanya : Apakah program pembangunan rumah sederhana sehat membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitar wilayah RT/RW di sini ?
- Jawab : saya mah bangga neng atas perubahan kondisi warga di lingkungan RT saya ini, manfaat bantuan rehab rumah ini tidak saja dirasakan bagi warga miskinnya, tapi lingkungan sekitar pun dapat merasakan kerapihan sanitasi lingkungan di sekitar menjadi tertata rapi tidak lagi semrawut dan memenuhi syarat tidak lagi mencemari lingkungan yang berpotensi sebagai penyebaran berbagai penyakit.

Informan,

**Nana Supriatna**



## MEMBER CHECK

Nama : Mustopa  
Warga di RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 1 Mei 2016

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Saelah, sae pisan ceuk bapak mah tujuanna.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Komo bae neng, ngabantu pisan kondisi bapak nu sakieu repotna

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Abdi terang informasina ti pak RT/RW neng.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Baik pisan neng.

Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?

- Jawab : Ya saelah pisan lancar.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Henteu nyaho bapak mah masalah eta.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Sangat sesuai harapan dan bermanfaat sekali.
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Alhamdulillah lamun dibandikeun jeung bangunan nu kamari mah, rehaban imah anu urang ieu lebih enak lah, bantuan ti pamarentah ieu memang alus bisa ngabantu abdi rakyat miskin.
- Tanya : Apakah bapak tahu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?
- Jawab : Gak tau kalo masalah biayanya mah.
- Tanya : Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
- Jawab : Cepet selesaina.
- Tanya : Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat di sini merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
- Jawab : Bagi abdi mah puas kita lah.

- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Membeli kebutuhan itu mah kurang begitu penting, yang penting ada buat makan dulu.

Informan,

**Mustopa**

## MEMBER CHECK

Nama : Emong  
Warga di RT. 04/05 Kelurahan Jatake

Umur : 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 27 April 2016

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Menurut bapak mah neng baik.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Membantu sekali.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Tadinya saya gak percaya, dan setelah menanyakan langsung ke RT disini saya mengetahui adanya program bantuan rumah itu.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Masyarakat disini kebanyakan menilai baik.

Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?

Jawab : Berjalan baik.

- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Gak tahu
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Bermanfaat.
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Nyaman lebih enak dan sehat karena bersih.
- Tanya : Apakah bapak tahu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?
- Jawab : Gak tau ya neng, bapak mah disini hanya tau nya di data saja oleh bapak RT/RW disini, katanya bapak mau dapat bantuan rehab rumah, kalo biayanya bapak gak tahu lah masalah itu mah.
- Tanya : Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
- Jawab : Lumayan pekerjaannya mah menurut saya cepet segini mah dan tidak asal-asalan.
- Tanya : Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat di sini merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
- Jawab : Ya merasa puas

Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?

Jawab : Kalau ada rezeki nya mah pengen kebutuhan itu saya beli

Informan,

**Emong**

## MEMBER CHECK

Nama : Rumsinah  
Warga di RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal : 7 Mei 2016

---

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Ibu mah merasa seneng lah neng, tujuan pamarentah ieu baik.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Wah eta mah tos pasti neng masyarakat didieu pasti pisan ngarasa terbantu.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Ibu terangna informasi ieu tinu sanes, saur na mah eta oge ti pak RT anu masihan terang na.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Sae pisan, baguslah neng, komo bae jadi rapih.

Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?

Jawab : Baik neng baik pisan..

- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Akh ibu mah masalah eta mah tidak tahu, tahunya ibu mah selesai aja rumah ini.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Ya pasti waelah seur manfaat na pisan.
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Nyaman, pasti bae sehat da bersih rumah na.
- Tanya : Apakah bapak tahu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?
- Jawab : Teu apal masalah biaya ibu mah neng.
- Tanya : Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
- Jawab : Alus lah ceuk ibu mah neng, hasil gawena ti pamarentah ieu cepet ngarehab imah teh, jadi ibu oge seneng bisa nempatan deui ieu imah, sanajan leutik tapi ayeuna mah imah ibu jadi bersih, nyaman lah, nuhun pisan ku ayana bantuan ieu jadi ngaringankeun ibu.
- Tanya : Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat di sini merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
- Jawab : Bisa jadi anu kening bantuan mah puas, tapi gak tau atuh neng kalo bagi yang belum mah mungkin bisa bae kecewa.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?



- Jawab : Akh memenuhi itu mah neng, gimana nanti saja yang penting ibu mah bisa makan dulu.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : akh neng masyarakat miskin jiga ibu mah, tos kacukupan makan sehari-hari oge tos beryukur, cita-cita mah hoyong eta oge neng gaduh motor, tv anu lebar atawa kabutuhan lain na lah anu serba mewah, rompok oge apan neng ieu teh bantuan pamarentah dialusana
- Tanya : Menurut Bapak/Ibu apakah rumah yang diperbaki oleh pemerintah ini sangat mudah prosesnya ?
- Jawab : Ibu mah tidak tahu neng ya, karena ini teh urusannya pak RT yang ngedata-data dulu, soalnya ibu mah tahu nya langsung dibongkar aja rumah di kasih tahu sama pak RT gak lama setelah nama ibu ditulis.

Informan,

**Rumsinah**

## MEMBER CHECK

Nama : Muhammad Iksan  
Warga di RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 7 Mei 2016

---

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Cukup baik dan membantu.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Pasti membantu, masyarakat pasti senang.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Saya mengetahui meski tidak secara langsung bahwa adanya pembangunan rumah itu yang pasti dari pemerintah setempat entah itu melalui lurah atau RT/RW nya yang telah diinformasikan melalui sosialisasi.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Sangat baik, tapi pelaksanaannya saya rasa instansi/pemerintah setempat terkait harus lebih mengawasi atas pelaksanaannya, jika kedepannya ada program yang sama seperti ini.

- Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?
- Jawab : Jika dilihat dari hasilnya, ya sangat baik karena pembangunan dapat berjalan lancar sesuai rencana dan harapan masyarakat.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Memang sudah semestinya, saya rasa program pembangunan yang dicanangkan pemerintah tersebut, sudah pasti ada target penyelesaiannya dari rencana awal, untuk meminimalisir biaya yang digunakan.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Pasti ini bermanfaat sekali.
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Menurut saya sih lebih layak dari sebelumnya.
- Tanya : Apakah bapak tahu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?
- Jawab : Yang pasti mungkin sesuai rencana karena disesuaikan dengan anggaran yang ada.
- Tanya : Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
- Jawab : Telah sesuai.

- Tanya : Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat di sini merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
- Jawab : Perubahannya ya baguslah lah positif, bantuan rehab rumah sederhana sehat ini dapat memuaskan kalangan masyarakat yang tidak mampu atau tidak memiliki rumah yang layak huni. Dengan adanya kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, masyarakat merasa terbantu dan dapat memiliki fasilitas rumah yang layak sehat, indah dan nyaman tidak seperti sebelumnya yang kumuh dan kotor.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Ya untuk memenuhi semua kebutuhan di luar pangan itu, sudah pasti mungkin semua orang pasti punya cita-cita, tapi bagi masyarakat miskin yang mendapat bantuan, asal sudah terpenuhi kebutuhan pangannya pun mereka patut bersyukur.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu mendukung program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang telah dilakukan oleh pemerintah karena memberikan hasil yang baik bagi masyarakat miskin yang kurang mampu ?
- Jawab : Ya saya mendukung program kegiatan ini, karena kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum, menurut penilaian saya dapat memberikan hasil yang baik, adanya kegiatan pembangunan tersebut sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan umumnya di Kota Tangerang dan khususnya di wilayah-wilayah kecamatan serta memutuskan rantai kemiskinan melalui strategi dan kebijakan penanganan kampung kumuh
- Tanya : Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu sebelumnya instansi telah mensosialisasikan kepada warga masyarakat di sini atas program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ?
- Tanya : Menurut Bapak/Ibu apakah rumah yang diperbaiki oleh pemerintah ini sangat mudah prosesnya ?

Jawab : Setahu saya sih tidak sulit, tinggal RT dan RW saja yang ngedata langsung siapa saja masyarakat yang layak mendapat program pembangunan ini.

Jawab : Program bedah rumah sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang selama ini telah terlaksana, disosialisasikannya secara tidak langsung tapi itu hanya disampaikan melalui Ketua RT/RW setempat saja, masyarakat tahunya hanya di data dan diberikan informasi bahwa akan ada bantuan dari pihak pemerintah untuk renovasi rumah

Informan,

**Muhammad Iksan**

## MEMBER CHECK

Nama : Supriyono  
Warga di RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 30 April 2016

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Baik dan lumayan lah, masyarakat miskin juga merasa senang.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Alhamdulillah terbanbtu bapak mah neng dan hanya bisa ngucapin terima kasih saja.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Ya, Bapak tahu ini dari pak RT yang ngasih tahunya.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Bagus kerjanya baik.

Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?

- Jawab : Menurut bapak baik.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Tidak tahu lah neng masalah biaya mah, bapak mah yang penting dapat bantuan dari pemerintah aja, mau berapa atau apa diaminin aja dan rumah bapak dapat selesai lagi agar bisa ditempatin.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Ya pasti bermanfaat, karena rumah tempat utama berteduh.
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Yah terasa jadi nyaman.
- Tanya : Apakah bapak tahu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?
- Jawab : Tidak tahu sama sekali
- Tanya : Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
- Jawab : Cukup lumayan cepat neng.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
- Jawab : Bapak mah bangga atuh neng dan merasa puas sekarang mah, rumah bapak sudah bagus dan baik, teras bersih dan gak repot sekarang mah ada WC nya, bantuan pemerintah ini sangat bagus lah membantu rakyat yang miskin seperti bapak ini.

- Tanya : Menurut Bapak/Ibu apakah rumah yang diperbaiki oleh pemerintah ini sangat mudah prosesnya ?
- Jawab : Rumah saya yang diperbaiki ini neng, sebelumnya dilihat dulu keadaannya baru kemudian didata oleh Pak RT untuk mendapatkan bantuan rehab rumah dari pemerintah.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Cukup dulu paling yang utama na mah kebutuhan makan sehari-hari aja.

Informan,

**Supriyono**



## MEMBER CHECK

Nama : Syahrup  
Warga di RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya

Umur : 34 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 15 Mei 2016

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Tujuannya ngabenerkeun rumah rakyat miskin neng setahu bapak mah.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Bapak tahu dari orang-orang aja, tapi pastinya setelah pak RT mendata dan menjelaskan jadi tahu jelas.

Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?

Jawab : Baik.

Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?

- Jawab : Tidak tahu.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Bermanfaat
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Nyaman banget setelah direhab.
- Tanya : Apakah bapak tahu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?
- Jawab : Tidak pernah menanyakan masalah biaya.
- Tanya : Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
- Jawab : Ya selesai dengan cepat.
- Tanya : Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat di sini merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
- Jawab : Ya ... bapak puas
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Boro-boro neng bapak mah untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari aja tau sendiri masih sulit, kerja bapak hanya buruh harian, sudah memiliki rumah yang layak huni dari bantuan pemerintah ini saja bapak merasa cukup dan bersyukur.

Informan,

**Syahrup**

MEMBER CHECK

Nama : Saepi  
Warga di RT. 04/05 Kelurahan Jatake

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal : 27 April 2016

---

---

Tanya : Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?

Jawab : Tujuannya sangat membantu bagi masyarakat kurang mampu neng, seperti bapak ini.

Tanya : Apakah kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?

Jawab : Sangat membantu, tapi harusnya sih bisa lebih adil menurut saya mah, agar masyarakat miskin lain yang tidak cemburu sosial.

Tanya : Apakah masyarakat mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?

Jawab : Ya tahu.

Tanya : Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?

Jawab : Baik dan lancar.

Tanya : Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada ini berjalan baik ?

- Jawab : Saya rasa berjalan baik pembangunan itu.
- Tanya : Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
- Jawab : Ya saya sih gak pernah nanya-nanya urusan itu, yang penting rumah ini menjadi baik pun sudah bersyukur sajalah.
- Tanya : Apakah bentuk dari kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat ?
- Jawab : Sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin.
- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Rumah jadi nyaman sehat dan aman tidak kotor dan amburadul.
- Tanya : Apakah bapak tahu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?
- Jawab : Apalagi saya tidak pernah tahu neng.
- Tanya : Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
- Jawab : Ya cepat selesai tidak lama.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
- Jawab : Sebenarnya kalo dibilang berubah sih yang berubah, tapi kondisi hidup saya sih masih jauh dari sejahtera gak ada yang berubah seperti begini saja keadaannya, tapi saya sangat bersyukur dan puas karena merasa terbantu bisa memperbaiki rumah yang sudah rusak ini.


- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi/membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Ya pasti keinginan mah ada tapi mau gimana lagi, gimana rezekinya aja.

Informan,

**Saepi**

- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi/membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan asupan kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Ya pasti keinginan masih ada tapi mau gimana lagi, gimana rezekinya aja.


Informasi,



Sekali

- Tanya : Apakah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
- Jawab : Nyaman banget setelah direhab.
- Tanya : Apakah bapak tahu berapa biaya untuk renovasi/merbaiki bangunan rumah ini ?
- Jawab : Tidak pernah memanyakan masalah biaya.
- Tanya : Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
- Jawab : Ya selesai dengan cepat.
- Tanya : Apakah menurut Bapak/ibu masyarakat di sini merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
- Jawab : Ya ... bapak puas
- Tanya : Apakah Bapak/ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi semua kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Bero-bero yang bapak mah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari aja itu sendiri masih sulit, kerja bapak hanya buruh harian, sudah memiliki rumah yang layak huni dari bantuan pemerintah ini saja bapak merasa cukup dan bersyukur.

Indraman,



Indraman



- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi/membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan asupan kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Cukup dulu paling yang utama ya mah kebutuhan makan sehari-hari aja.

Beliman,



Saef

Saef

Jawab : Program bedah rumah sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang selama ini telah terlaksana, diwujudkan secara tidak langsung tapi itu hanya disampaikan melalui Ketua RW setempat saja, masyarakat tentunya hanya di data dan diberikan informasi bahwa akan ada bantuan dari pihak pemerintah untuk renovasi rumah

Isleman



**Muhammad Ihsan**

- Jawab : Aah memandi itu mah seng, gimana nanti aja yang penting itu mah bisa makan dulu.
- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memandi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : ahh seng masyarakat mikin jiga itu mah, ta kancakapan makan sehari-hari oge ta beryakin, cita-cita mah bojong eta oge seng gaduh motor, tv ama lebar atawa kebutuhan lain ta lah ama serba mawab, rompok oge apat seng ta teh bantuan pemerintah dilusana
- Tanya : Menurut Bapak/Ibu apakah rumah yang diperbaiki oleh pemerintah ini sangat mudah prosesnya ?
- Jawab : Itu mah tidak tahu seng ya, karena ini teh urusannya pak RT yang ngurus-dana dulu, scalinya itu mah tahu nya langsung dibongkar aja rumah di kasih tahu sama pak RT pak lama setelah nama itu ditulis.

Infoman,



**Raminta**

- Tanya : Apakah Bapak/Ibu setelah rumahnya diperbaiki dapat memenuhi/membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
- Jawab : Kalau ada rezeki nya mah pengen kebutuhan itu saya beli

Informasi,



**Emeng**

- Jawab : Ya memberikan manfaat secara baik.
- Tanya : Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?
- Jawab : Sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
- Tanya : Apakah program pembangunan rumah sederhana what membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitar wilayah RT/RW di sini ?
- Jawab : saya mah bangga meng atas perubahan kondisi warga di lingkungan RT saya ini, manfaat bantuan rehab rumah ini tidak saja dirasakan bagi warga miliknya, tapi lingkungan sekitar pun dapat merasakan kerapihan sanitasi lingkungan di sekitar menjadi tertata rapi tidak lagi semrawut dan memenuhi syarat tidak lagi mencemari lingkungan yang berpotensi sebagai penyebaran berbagai penyakit.

Jakarta,



**Dina Nurjinta**

- kondisi keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan dan Kecamatan Jatiuwung.
- Tanya : Apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat oleh pemerintah Kota Tangerang telah sesuai dengan standar yang disosialisasikan ?
- Jawab : Kita selaku aparat pemerintah di tingkat kecamatan ini selalu memprioritaskan setiap program kegiatan pemerintah yang ada, khususnya program bedah rumah sehat ini salah satunya program yang menjadi perhatian dari pemerintah kota Tangerang.
- Tanya : Apakah renovasi ini membawa dampak perubahan terhadap kondisi bangunan yang berkualitas untuk jangka waktu panjang ?
- Jawab : Ya, mempengaruhi juga dengan adanya bedah rumah tata ruang kota menjadi lebih rapih dan dampak manfaat terhadap yang dirasakan masyarakat tidak mampu dapat memiliki kondisi bangunan yang berkualitas dari sebelumnya.



NIP. 19840912 20021 22002

Jawab

- Saya rasa ini dapat membawa dampak perubahan yang baik dari sebelumnya, mewujudkan perumahan dan permukiman yang teratur sesuai dengan arahan rencana tata ruang untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Infoman  
  
Rika Marissa, ST, MT  
19721102 200003 2003

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

NO.	DIMENSI	KISI-KISI	WAWANCARA DAN INFORMAN
1.	Efektifitas, dalam hal ini efektifitas menanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai	- Pencapaian target kegiatan	Instansi 1 1. Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?
			Instansi 2 2. Apakah efektivitas program kebijakan ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?
			Ketua RT. 03 / RW 04 3. Apakah masyarakat di sini mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?
			Ketua RT. 001 / RW 04 4. Apakah masyarakat di sini mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?
		- Pelaksanaan kegiatan	Instansi 2 5. Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?
			Ketua RT04 / RW 05 6. Menurut bapak apakah pembangunan rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada di lingkungan ini berjalan baik ?



2.	Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan	Instansi 1 1. Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?
			Instansi 2 2. Apakah abentuk dari kebijakan ini membawa manfaat yang sesuai dengan keinginan masyarakat ?
			Mustopa Warga Penerima Bantuan RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya 3. Apakah menurut Bapak/Ibu rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman, sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?
			Emong Warga Penerima Bantuan RT. 04/05 Kelurahan Jatake 4. Apakah menurut Bapak/Ibu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?
		- Kecepatan pelaksanaan kegiatan	Instansi 2 5. Seberapa lama penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sehat ?
			Rumsinah Warga Penerima Bantuan RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya 6. Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?
3.	Kecukupan, seberapa jauh hasil yang diinginkan memecahkan masalah	- Kepuasan	Muhammad Iksan Warga bukan penerima bantuan RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya 1. Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat di sini merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?

			Supriyono Warga Penerima Bantuan RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya 2. Apakah Bapak/Ibu merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
			Saepi Warga Penerima Bantuan RT. 04/05 Kelurahan Jatake 3. Apakah Bapak/Ibu merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?
		- Tingkat kebutuhan	Syahrup Warga Penerima Bantuan RT. 01/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya 4. Apakah Bapak/Ibu setelah rumah Bapak/Ibu diperbaiki, Bapak/Ibu dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
			Rumsinah Warga Penerima Bantuan RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya 5. Apakah Bapak/Ibu setelah rumah Bapak/Ibu diperbaiki, Bapak/Ibu dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?
		- Kecukupan Pengawasn	Instansi 1 6. Sebagai instansi pelaksanaan proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari <i>stakeholder</i> setempat kurang tepat sasaran ?
4.	Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata	- Jenis manfaat yang diperoleh	Moch. Sadeli Ketua RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya 1. Menurut Bapak apakah dengan adanya kegiatan pembangunan di lingkungan RT ini dapat

			memberikan manfaat positif bagi warga bapak di sini atukah ada kecemburuan dari pihak lain yang tidak mendapatkan renovasi rumah ini ?
			Nurman Ketua RT. 01/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya 2. Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?
			Instansi 2 Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat ?
		- Perataan output yang dihasilkan	Instansi 1 3. Apakah tujuan dari output kebijakan program pembangunan rumah sederhana sehat ini mutlak diperlukan untuk meminimalisir menjamurnya pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali ?
			Instansi 2 4. Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan dana APBD yang diatur dalam kebijakan perda ?
5	Responsifitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu	- Memberikan hasil yang baik	Muhammad Iksan Warga bukan penerima bantuan RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya 1. Apakah Bapak/Ibu mendukung program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang telah dilakukan oleh pemerintah karena memberikan hasil yang baik bagi masyarakat

			miskin yang kurang mampu ?
			Instansi 1 2. Apakah Bapak/Ibu mendukung program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang telah dilakukan oleh pemerintah karena memberikan hasil yang baik bagi masyarakat miskin yang kurang mampu ?
		- Kemudahan	Instansi 2 : 3. Apakah dinas diberikan kewenangan melaksanakan kebijakan dari pemerintah memberikan kemudahan dalam proses permohonan yang diusulkan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ?
			Rumsinah Warga Penerima Bantuan RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 22 Maret 2015 4. Menurut Bapak/Ibu apakah rumah yang diperbaki oleh pemerintah ini sangat mudah prosesnya ?
		- Tanggap	Instansi 1 5. Apakah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang yang diatur menurut dasar hukum yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik ?
6	Ketepatan, apakah hasil/tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	- Ketepatan sosialisasi	Instansi 2 1. Apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat oleh pemerintah Kota Tangerang telah sesuai dengan aturan yang disosialisasikan ?
			Muhammad Iksan Warga bukan penerima bantuan RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya 2. Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu sebelumnya instansi telah mensosialisasikan kepada

			warga masyarakat di sini atas program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ?
			Instansi 1 3. Apakah ketentuan permohonan dari masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya yang tidak layak huni sebelumnya instansi atau dinas terkait telah mensosialisasikannya ?
		- Ketepatan antara tujuan dan manfaat	Moch. Sadeli Ketua RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya 1. Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?
		- Ketepatan manfaat terhadap bangunan	Instansi 1 1. Apakah renovasi ini membawa dampak perubahan terhadap kondisi bangunan yang berkualitas untuk jangka waktu panjang ?
		-	Instansi 2 2. Menurut Bapak, selain menanggulangi tingkat kemiskinan, apakah program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat memberikan manfaat khususnya pada tata ruang kota, sehingga struktur ruang kota menjadi tertata rapih
		- Ketepatan manfaat terhadap lingkungan	Ketua RT04 / RW 05 1. Apakah program pembangunan rumah sederhana sehat membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitar wilayah ini ?

### Matriks Hasil Wawancara

Informan	Status Informan	Pencapaian Target Kegiatan
I <sub>1</sub>	<p style="text-align: center;">Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016</p>	<p>Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?</p> <p>“.... Tujuan dan pencapaian target kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat hidup layak dilihat dari rumah yang mereka tempati, walaupun rumahnya sederhana akan tetapi mereka dapat memiliki WC, sanitasi yang baik, memiliki kamar ruang tidur, ruang tamu dan cukup pencahayaan....”.</p>
I <sub>2</sub>	<p style="text-align: center;">Rusianto (Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang) Tanggal 15 Juli 2016)</p>	<p>Apakah tujuan dan pencapaian target dari kegiatan program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat yang ada di Kota Tangerang ini ?</p> <p>“..... Tujuan pembangunan infrastruktur ini, saya rasa masyarakat pun sejak awal tahu bahwa program ini untuk penanganan kawasan kumuh, dalam arti tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yaitu mengupayakan berkurangnya luas perumahan dan permukiman kumuh secara konsisten dan berkelanjutan .....”</p>
I <sub>3</sub>	<p style="text-align: center;">Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016</p>	<p>Apakah efektivitas program kebijakan ini dapat mengatasi krisis sosial dan ekonomi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan ?</p> <p>”..... Sejauh ini kegiatan pembangunan cukup baik dan dapat dirasakan hasilnya, menurut saya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat mengatasi krisis sosial pada masyarakat yang dapat bantuan, karena rumah mereka sudah dapat</p>

		dikatakan layak huni dan mengurangi kesenjangan antar warga .....
I <sub>3-1</sub>	Bapak Moch Sadeli selaku Ketua RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 1 Mei 2016	Apakah masyarakat di sini mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?  “..... Masyarakat di RT saya ini tahu adanya kegiatan rehab rumah dari pemerintah Kota Tangerang, waktu itu saya kumpulin warga di rumah, warga yang terdata terus saya kasih tahu siapa saja yang dapat bantuan bedah rumah. Sebelumnya juga ada banyak orang dari pemerintah kesini kasih tahu banyak masalah pembangunan rumah ini katanya mau ada bantuan rehab rumah....”
I <sub>3-2</sub>	Bapak Nurman Ketua RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 7 Mei 2016	Apakah masyarakat di sini mengetahui adanya program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang ?
Informan	Status Informan	Pelaksanaan Kegiatan
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah pelaksanaan dari program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat terlaksana dengan baik ?  “..... Pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat menurut saya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, walaupun yang melaksanakan kegiatan pembangunan ini ialah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, kami juga ikut mengawasi dan memonitoring agar kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik dan lancar ....”
I <sub>3-3</sub>	Nana Supriatna	Menurut bapak apakah pembangunan

	Ketua RT. 04/05 Kelurahan Jatake Kota Tangerang Tanggal 27 April 2016	rumah sederhana sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang ada di lingkungan ini berjalan baik ?  “.....saya dapat melihat sendiri neng pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat waktu itu, jadi selaku RT disini saya melihat dan menilai bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah bagus lah cukup baik dan positif, bantuan rehab rumah dari pemerintah diarahkan kepada keluarga miskin yang kondisi sosial ekonominya rendah....”.
Informan	Status Informan	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah proses kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan biaya yang efisien ?  “..... sejauh ini kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat berjalan dengan baik serta dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan...”.
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah abentuk dari kebijakan ini membawa manfaat yang sesuai dengan keinginan masyarakat ?  “..... kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ini bertujuan agar masyarakat yang kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni dapat menikmati hidup layak karena rumah merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu kebijakan pemerintah atas kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat pasti membawa manfaat dan sesuai dengan keinginan masyarakat....”.
I <sub>5-1</sub>	Mustopa Warga Penerima Bantuan RT. 03/04 Kelurahan	Apakah menurut Bapak/Ibu rumah yang telah dibangun oleh pemerintah ini dapat ditempati secara nyaman,



	<p>Alam Jaya Tanggal 1 Mei 2016</p>	<p>sehat dan aman dari rumah yang sebelumnya ?</p> <p>“.... alhamdulillah lamun dibandikeun jeung bangunan nu kamari mah, rehaban imah anu urang ieu lebih enak lah, bantuan ti pamarentah ieu memang alus bisa ngabantu abdi rakyat miskin...”.</p>
I <sub>4-1</sub>	<p>Bapak Emong Warga Penerima Bantuan RT. 04/05 Kelurahan Jatake Tanggal 27 April 2016</p>	<p>Apakah menurut Bapak/Ibu berapa biaya untuk merenovasi/memperbaiki bangunan rumah ini ?</p> <p>“..... gak tau ya neng, bapak mah disini hanya tau nya di data saja oleh bapak RT/RW disini, katanya bapak mau dapat bantuan rehab rumah, kalo biayanya bapak gak tahu lah masalah itu mah ...”.</p>
Informan	Status Informan	Kecepatan Pelaksanaan Kegiatan
I <sub>3</sub>	<p>Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016</p>	<p>Seberapa lama penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sehat ?</p> <p>“.... kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat untuk 1 unit rumah penyelesaiannya kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya...”.</p>
I <sub>2</sub>	<p>Rusianto (Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang) Tanggal 15 Juli 2016)</p>	<p>Seberapa lama penyelesaian program kegiatan pembangunan rumah sehat ?</p> <p>“.....setahu saya kegiatan ini yang sudah berlangsung untuk penyelesaian 1 unit rumah kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya...” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> pada tanggal 15 Juli 2016)</p>
I <sub>5-2</sub>	<p>Rumsinah Warga Penerima Bantuan RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 7 Mei 2016</p>	<p>Apakah pengerjaan renovasi rumah ini selesai dengan cepat ?</p> <p>“..... alus lah ceuk ibu mah neng, hasil gawena ti pamarentah ieu cepet ngarehab imah teh, jadi ibu oge seneng bisa nempatan deui ieu imah, sanajan leutik tapi ayeuna mah imah ibu jadi bersih, nyaman lah, nuhun</p>

		pisan ku ayana bantuan ieu jadi ngaringankeun ibu .....”.
Informan	Status Informan	Kepuasan
I <sub>5-3</sub>	Muhammad Iksan Warga Bukan Penerima Bantuan RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 7 Mei 2016	Apakah menurut Bapak/Ibu masyarakat di sini merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?  “.....perubahannya ya baguslah lah positif, bantuan rehab rumah sederhana sehat ini dapat memuaskan kalangan masyarakat yang tidak mampu atau tidak memiliki rumah yang layak huni. Dengan adanya kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, masyarakat merasa terbantu dan dapat memiliki fasilitas rumah yang yang layak sehat, indah dan nyaman tidak seperti sebelumnya yang kumuh dan kotor....”.
I <sub>5-4</sub>	Supriyono Warga Penerima Bantuan RT. 03/04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 30 April 2016)	Apakah Bapak/Ibu merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?  “.....Bapak mah bangga atuh neng dan merasa puas sekarang mah, rumah bapak sudah bagus dan baik, teras bersih dan gak repot sekarang mah ada WC nya, bantuan pemerintah ini sangat bagus lah membantu rakyat yang miskin seperti bapak ini....”
I <sub>4-2</sub>	Saepi Warga Penerima Bantuan RT. 04/05 Kelurahan Jatake Tanggal 27 April 2016)	Apakah Bapak/Ibu merasa puas setelah rumah ini diperbaiki oleh pemerintah ?  “..... sebenarnya kalo dibilang berubah sih yang berubah, tapi kondisi hidup saya sih masih jauh dari sejahtera gak ada yang berubah seperti begini saja keadaannya, tapi saya sangat bersyukur dan puas karena merasa terbantu bisa memperbaiki rumah yang sudah rusak ini ....”
Informan	Status Informan	Tingkat Kebutuhan

I <sub>5-5</sub>	Syahrup Warga Penerima Bantuan RT. 01/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 15 Mei 2016)	Apakah Bapak/Ibu setelah rumah Bapak/Ibu diperbaiki, Bapak/Ibu dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?  “..... boro-boro neng bapak mah untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari aja tau sendiri masih sulit, kerja bapak hanya buruh harian, sudah memiliki rumah yang layak huni dari bantuan pemerintah ini saja bapak merasa cukup dan bersyukur ....”.
I <sub>5-2</sub>	Rumsinah Warga Penerima Bantuan RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 7 Mei 2016	Apakah Bapak/Ibu setelah rumah Bapak/Ibu diperbaiki, Bapak/Ibu dapat memenuhi /membeli kebutuhan lainnya, seperti TV, MOTOR dan ataupun kebutuhan pangan lainnya yang digunakan sehari-hari ?  “.....akh neng masyarakat miskin jiga ibu mah, tos kacukupan makan sehari-hari oge tos beryukur, cita-cita mah hoyong eta oge neng gaduh motor, tv anu lebar atawa kabutuhan lain na lah anu serba mewah, rompok oge apan neng ieu teh bantuan pamarentah dialusana....”.
Informan	Status Informan	Kecukupan Pengawasan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Sebagai instansi pelaksanaan proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari <i>stakeholder</i> setempat kurang tepat sasaran ?  “..... Sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini, kami hanya menjalankan pembangunannya saja sesuai dengan usulan atau data yang di dapat dari kelurahan, siapa warga masyarakat

		yang rumahnya perlu direnovasi dan diperbaiki....”.
I <sub>2</sub>	Rusianto (Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang) Tanggal 15 Juli 2016)	Sebagai instansi pelaksanaan proram kebijakan rumah sederhana sehat, apakah pelaksanaan kegiatannya diawasi dengan baik, karena dikhawatirkan rekomendasi yang datang dari <i>stakeholder</i> setempat kurang tepat sasaran ?  “.....dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang telah berjalan pengawasan dilakukan salah satunya oleh BKPD ...”
Informan	Status Informan	Jenis Manfaat Yang Diperoleh
I <sub>3-1</sub>	Moch. Sadeli Ketua RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 1 Mei 2016	Menurut Bapak apakah dengan adanya kegiatan pembangunan di lingkungan RT ini dapat memberikan manfaat positif bagi warga bapak di sini atautkah ada kecemburuan dari pihak lain yang tidak mendapatkan renovasi rumah ini ?  “.....Manfaat tentu beragam yang jelas manfaat paling nyata dan dirasakan oleh pemerintah ketika kebijakan pembangunan ini dilaksanakan dengan baik walau belum terlaksana secara 100% misal telah dilaksanakan 70% dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah, akan tetapi manfaat dari penataan kampung kumuh ini dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.....”
I <sub>3-2</sub>	Nurman Ketua RT. 01/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 7 Mei 2016	Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?  ”..... Manfaat yang didapat dari dilaksanakannya kebijakan pemerintah atas kegiatan

		<p>pembangunan rumah sederhana sehat ... ya.. terciptanya kondisi rumah yang layak huni, sehat, aman, teratur dan serasi.....”</p> <p>“..... Ya dikatakan tepat sih ya tepat, memang benar untuk RT. 01/RW.04 ini jumlah bangunan rumah kumuh yang mendapat bantuan ada 3 unit rumah, akan tetapi dari 27 rumah yang di data ini, ada 4 rumah yang kondisinya sudah rusak parah, jadi pantaslah jika harusnya keempat rumah ini yang mendapat bantuan terlebih dahulu, akan tetapi menurut koordinator pelaksana, menurutnya masih layak dan tidak dalam status urgensi dan bisa diusulkan kembali untuk pembangunan tahap selanjutnya...”.</p>
I <sub>3</sub>	<p>Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016</p>	<p>Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat ?</p> <p>“..... kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang sudah sesuai dengan prosedur, perencanaan dan penganggaran, memang pelaksanaan kegiatan ini harus sinkron sesuai dengan prosedur dan ketentuan baik biaya ataupun manfaatnya bagi masyarakat miskin yang khususnya tidak memiliki tempat tinggal yang layak....”.</p>
Informan	Status Informan	Perataan Output Yang Dihasilkan
I <sub>1</sub>	<p>Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal</p>	Apakah tujuan dari output kebijakan program pembangunan rumah sederhana sehat ini mutlak diperlukan untuk meminimalisir menjamurnya

	<p>Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016</p>	<p>pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali ?</p> <p>“..... Ya, tujuan dari program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ini sangat diperlukan sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Banten, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman khususnya terkait dengan penataan kampung kumuh, sehingga output dari kebijakan ini dapat mengurangi meluasnya perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Kota Tangerang...”.</p>
I <sub>2</sub>	<p>Rusianto (Lurah Kelurahan Jatake Kota Tangerang) Tanggal 15 Juli 2016)</p>	<p>Apakah tujuan dari output kebijakan program pembangunan rumah sederhana sehat ini mutlak diperlukan untuk meminimalisir menjamurnya pemukiman-pemukiman kumuh yang tidak teratur dan tidak terkendali ?</p> <p>“.....tujuan dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada saat itu adalah secara umum adalah untuk meminimalisir berkembangnya perkampungan kumuh sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin...” (Wawancara dengan I<sub>2</sub> pada tanggal 15 Juli 2016)</p>
I <sub>3</sub>	<p>Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016</p>	<p>Apakah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang dilaksanakan oleh instansi terkait dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan dana APBD yang diatur dalam kebijakan perda ?</p> <p>“.....Instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dapat menyelesaikan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan atau rencana kerja dan peraturan daerah</p>

		begitu juga dengan biaya yang menggunakan dana APBD karena setelah pembangunan selesai ada laporannya...”.
Informan	Status Informan	Memberikan Hasil Yang Baik
I <sub>5-3</sub>	Muhammad Iksan Warga Bukan Penerima Bantuan RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 30 April 2016	Apakah Bapak/Ibu mendukung program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang telah dilakukan oleh pemerintah karena memberikan hasil yang baik bagi masyarakat miskin yang kurang mampu ?  “.....Ya saya mendukung program kegiatan ini, karena kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum, menurut penilaian saya dapat memberikan hasil yang baik, adanya kegiatan pembangunan tersebut sekaligus dapat mengurangi tingkat kemiskinan umumnya di Kota Tangerang dan khususnya di wilayah-wilayah kecamatan serta memutuskan rantai kemiskinan melalui strategi dan kebijakan penanganan kampung kumuh....”.
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah Bapak/Ibu mendukung program pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat yang telah dilakukan oleh pemerintah karena memberikan hasil yang baik bagi masyarakat miskin yang kurang mampu ?  “..... Ya saya dukung, karena jelas manfaat dari adanya kegiatan pembangunan rumah sederhana sehat ini dapat meminimalisir menjamurnya kampung kumuh yang ada di wilayah Kota Tangerang....”.
Informan	Status Informan	Kemudahan
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si	Apakah dinas diberikan kewenangan

	Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	melaksanakan kebijakan dari pemerintah memberikan kemudahan dalam proses permohonan yang diusulkan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat ? “..... Kami memberi kemudahan, berupa memberikan data yang akurat, karena kelurahan dan kecamatan yang tahu persis kondisi keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan dan Kecamatan Jatiuwung...”.
I <sub>5-2</sub>	Rumsinah Warga Penerima Bantuan RT. 01/04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 7 Mei 2016	Menurut Bapak/Ibu apakah rumah yang diperbaki oleh pemerintah ini sangat mudah prosesnya ? “..... Ibu mah tidak tahu neng ya, karena ini teh urusannya pak RT yang ngedata-data dulu, soalnya ibu mah tahu nya langsung dibongkar aja rumah di kasih tahu sama pak RT gak lama setelah nama ibu ditulis ...”.
Informan	Status Informan	Tanggapan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat di Kota Tangerang yang diatur menurut dasar hukum yang berlaku dapat dilaksanakan dengan baik ? “..... Kegiatan ini sudah diatur menurut dasar hukum yang berlaku dan memiliki payung hukum, sehingga ketentuan dalam proses pelaksanaan program kebijakan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku....”.
Informan	Status Informan	Ketepatan Sosialisasi
I <sub>3</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat oleh pemerintah Kota Tangerang telah



		<p>sesuai dengan aturan yang disosialisasikan ?</p> <p>“..... Kita selaku aparaturn pemerintah di tingkat kecamatan ini selalu mensosialisasikan setiap program kegiatan pemerintah yang ada, khususnya program bedah rumah sehat ini salah satunya program yang menjadi perhatian dari pemerintah kota Tangerang....”.</p>
I <sub>5-3</sub>	<p>Muhammad Iksan Warga Bukan Penerima Bantuan RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 30 April 2016</p>	<p>Apakah menurut penilaian Bapak/Ibu sebelumnya instansi telah mensosialisasikan kepada warga masyarakat di sini atas program kebijakan pembangunan rumah sederhana sehat ?</p> <p>“.....Program bedah rumah sehat dari pemerintah Kota Tangerang yang selama ini telah terlaksana, disosialisasikannya secara tidak langsung tapi itu hanya disampaikan melalui Ketua RT/RW setempat saja, masyarakat tahunya hanya di data dan diberikan informasi bahwa akan ada bantuan dari pihak pemerintah untuk renovasi rumah ....”.</p>
I <sub>1</sub>	<p>Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016</p>	<p>Apakah ketentuan permohonan dari masyarakat yang ingin merenovasi rumahnya yang tidak layak huni sebelumnya instansi atau dinas terkait telah mensosialisasikannya ?</p> <p>“..... Kami selalu mensosialisasikan di setiap pertemuan walaupun, tidak semua orang hadir, karena hanya diwakilkan, seperti RT, RW, LSM atau tokoh masyarakat yang ada...”.</p>
Informan	Status Informan	Ketepatan antara Tujuan dan Manfaat
I <sub>3-1</sub>	<p>Moch. Sadeli Ketua RT. 03/RW. 04 Kelurahan Alam Jaya Tanggal 1 Mei 2016</p>	<p>Apakah program pembangunan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan ini tepat sasaran dan membawa manfaat ?</p>

		“.....dari jumlah bangunan rumah kumuh yang saya tahu datanya, di lokasi Kelurahan Alam Jaya yaitu sekitar 27 rumah yang kondisi fisiknya tidak layak huni....”.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matriks Hasil Wawancara  
Ketepatan Manfaat Terhadap Bangunan

Informan	Status Informan	Ketepatan Manfaat Terhadap Bangunan
I <sub>1</sub>	Linda Donarika Marbun,ST,MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016	Apakah renovasi ini membawa dampak perubahan terhadap kondisi bangunan yang berkualitas untuk jangka waktu panjang ?  “..... Saya rasa ini dapat membawa dampak perubahan yang baik dari sebelumnya, mewujudkan perumahan dan permukiman yang teratur sesuai dengan arahan rencana tata ruang untuk menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan....”.
I <sub>2</sub>	Rani, S.Si Kasubag Perencanaan Kec. Jatiuwung Kota Tangerang Tanggal 13 Mei 2016	Menurut Bapak, selain menanggulangi tingkat kemiskinan, apakah program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dapat memberikan manfaat khususnya pada tata ruang kota, sehingga struktur ruang kota menjadi tertata rapih ?  “..... Ya, mempengaruhi juga dengan adanya bedah rumah tata ruang kota menjadi lebih rapih dan dampak manfaat terhadap yang dirasakan masyarakat tidak mampu dapat memiliki kondisi bangunan yang berkualitas dari sebelumnya....”.
Informan	Status Informan	Ketepatan Manfaat Terhadap Lingkungan
I <sub>3-1</sub>	Nana Supriatna Ketua RT. 04 / RW. 05	Apakah program pembangunan rumah sederhana sehat membawa dampak

	<p>Kelurahan Alam Jaya Tanggal 27 April 2016</p>	<p>positif bagi lingkungan di sekitar wilayah ini ?</p> <p>“.....saya mah bangga neng atas perubahan kondisi warga di lingkungan RT saya ini, manfaat bantuan rehab rumah ini tidak saja dirasakan bagi warga miskinnya, tapi lingkungan sekitar pun dapat merasakan kerapihan sanitasi lingkungan di sekitar menjadi tertata rapi tidak lagi semrawut dan memenuhi syarat tidak lagi mencemari lingkungan yang berpotensi sebagai penyebaran berbagai penyakit....”.</p>
--	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## LAMPIRAN 5

### Dokumen Penyusunan Standard Rumah Layak Huni di Kota Tangerang



# METODE PELAKSANAAN DAN JADWAL KEGIATAN

## 5.1 ALUR PIKIR DAN PENDEKATAN KEGIATAN

Alur pikir konsultan dalam mencoba untuk menguraikan latar belakang dilaksanakannya Penyusunan Prototype Rumah Layak Huni di Kota Tangerang dimulai dari bagaimana konsultan merinci keinginan pengelolaan yang lebih baik untuk kemudian menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan isu-isu utama yang telah dijelaskan dalam KAK. Uraian alur pikir kegiatan dapat dilihat pada Diagram Alur Pikir Kegiatan.

## ALUR PIKIR KEGIATAN

### PENYUSUNAN PROTOTYPE RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA TANGERANG



## 5.2 METODOLOGI

Sesuai Kerangka Acuan Kerja, metodologi kegiatan

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap penyepakatan luasan lahan dalam rancangan bangunan;
3. Tahap Kompilasi Data dan Analisis :
  - a. Analisis Kebutuhan Minimal Masa (perampilan) dan Ruang (luar-dalam);
  - b. Analisis Kebutuhan Kesehatan dan Kenyamanan;
  - c. Analisis Kebutuhan Minimal Keamanan dan Keselamatan;
  - d. Analisis bahan bangunan (material bangunan);
  - e. Analisis desain bangunan tipe rumah layak huni;
  - f. Penyusunan konsep dasar perancangan bangunan.
4. Tahap Perumusan Perancangan Standar rumah Layak huni

- a. Penyusunan rancangan dasar
  - b. Penyusunan Panduan Rancangan, berupa
5. Penyusunan Prototype Rumah Layak Huni Kota Tangerang

### **5.3 PEMBAHASAN**

Pembahasan-pembahasan yang dilakukan pada Penyusunan Prototype Rumah Layak Huni di Kota Tangerang adalah berupa rangkaian pertemuan antara tim ahli dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga dilakukan survey lokasi bersama-sama dengan pihak pemberi tugas dan atau pemangku kepentingan lainnya.

### **5.4 JADWAL / RENCANA KERJA**

Dalam melaksanakan kegiatan proyek rencana kerja dan jadwal pelaksanaan merupakan salah satu aspek manajemen proyek yang mempunyai peranan penting agar tujuan dan sasaran kegiatan yang diinginkan dapat dicapai secara tepat waktu. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dapat disusun langkah-langkah kegiatan kerja, kebutuhan personil dan fasilitas lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan organisasi proyek yang di harapkan dapat bekerja dengan baik.

Rencana ini dikembangkan sesuai dengan lingkup, metodologi dan ketersediaan waktu. Dan sebagai perangkat untuk melaksanakan rencana kerja tersebut adalah dengan tenaga ahli yang handal. Kombinasi dari keduanya diharapkan mampu mengeluarkan hasil yang optimal pada pekerjaan. Uraian rencana kerja Penyusunan Prototype Rumah Layak Huni di Kota Tangerang dapat dilihat pada Diagram Jadwal Rencana Kerja dibawah ini.

No.	LINGKUP KEJATAN	MINGGU			
		1	2	3	4
<b>A. TAHAP PERDAPAN</b>					
1	Penyajian KAJ dan Metodologi Kerja	✓			
2	Mobilisasi Personel	✓			
3	Studi Literatur dan Pengumpulan Data Awal	✓			
4	Penyiapan Formulir Formulir Survey dan Perangkat Bantu Kerja Lainnya	✓			
5	Penyiapan Mandiri & Perangkat Formulasi kebutuhan Program	✓			
6	Penyiapan Formulir Kompilasi Data (kuisling P3U & Rumah Tidak Layak Huni)	✓			
<b>B. TAHAP IDENTIFIKASI / DIBUKTI DENGAN NARA SUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1	Penyiapan Administrasi Survey / Diskusi Preferensi Rumah Layak Huni			✓	
2	Pelaksanaan Survey / Diskusi (Preferensi Rumah Layak Huni Kota Tangerang)			✓	
3	Kompilasi Data Preferensi Rumah Layak Huni			✓	
<b>C. TAHAP KOMPLIASI DATA DAN ANALISIS</b>					
1	Analisis kebutuhan minimal masa (penampungan) dan ruang (luas dalam)			✓	
2	Analisis kebutuhan kesehatan dan kenyamanan			✓	
3	Analisis kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan			✓	
4	Analisis bahan bangunan (material bangunan)			✓	
5	Analisis desain bangunan tipe rumah layak huni			✓	
6	Penyusunan konsep dasar perancangan bangunan			✓	
<b>D. TAHAP PERUMBUHAN PERANCANGAN STANDAR RUMAH LAYAK HUNI</b>					
1	a. Penyusunan rancangan dasar				✓
2	b. Penyusunan panduan rancangan				✓
<b>E. PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIK PROTOTYPE RUMAH LAYAK HUNI KOTA TANGERANG</b>					
1	Pembuatan CEO, RAB & RKS				✓
2	Finalisasi Data				✓
<b>F. PELAPORAN &amp; KORDINASI / ASISTENSI TEKNIK</b>					
1	Laporan Pendahuluan & Pembahasan	✓			
2	Laporan RAB & Pembahasan				✓
3	Album Rancangan Desain				✓
4	Asistensi Teknis	✓	✓	✓	✓



# LAMPIRAN

## Dokumen Format Survey / Pendataan Rumah Tidak Layak Huni

FORMAT SURVEY / PENDATAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	
KEGIATAN PENYUSUNAN STANDARD RUMAH LAYAK HUNI KOTA TANGERANG TAHUN 2012	
KELURAHAN : _____	
<b>A. DATA IDENTITAS RUMAH</b>	
1. Pemilik Rumah	_____
2. RT / RW	_____
3. No.	_____
4. Rm.	_____
5. No. Telp Pemilik Rumah / Contact Person	_____
6. Surveyor	_____
7. Tgl Survey	_____
<b>B. DATA ADMINISTRASI RUMAH</b>	
1. Luas Tanah	_____
2. Luas Bangunan	_____
3. Ketinggian Bangunan / Jumlah Lantai	_____
4. Status Hak Atas Tanah	_____
5. Status Kepemilikan Bangunan	<input type="checkbox"/> Rumah Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Rumah Bukan Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Lainnya _____
6. Status tan. Mendirikan Bangunan	<input type="checkbox"/> Ada, No. _____ <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Lainnya _____
<b>C. DATA PEJUBU RUMAH</b>	
1. Pemilik Rumah	_____
2. Jumlah Anggota Yang Tinggal Dalam Rumah	_____
3. Jumlah Anak	_____
4. Identitas Suami (SI)	_____
a) Suami	_____
-- Nama	_____
-- Ura	_____
-- Pekerjaan	_____
-- Pendidikan Terakhir	_____
b) Istri	_____
-- Nama	_____
-- Ura	_____
-- Pekerjaan	_____
-- Pendidikan Terakhir	_____

D. PETA LOKASI BUMAH



E. SKETSA DENAH DARI FOTO BUMAH

FOTO TAMPAK DEPAN	SKETSA DENAH RUMAH & LINGKUNGAN
FOTO TAMPAK LAMPING KIRI	
FOTO TAMPAK LAMPING KANAN	
FOTO TAMPAK BELAKANG	CATATAN / BUKTI BANGUNAN

#### F. DATA RINCI SPESIFIKASI / BAHAN BANGUNAN

<b>1. Spesifikasi Material Struktur Bangunan</b>	
- Pondasi	_____
- Kolom	_____
- Balok	_____
- Ring Balok	_____
- Tangga Malar	_____
- Lantai	_____
- Dinding	_____
<b>2. Spesifikasi Material Struktural / Finis Bangunan</b>	
- Lantai Lantai 1 dan Perkerangan	_____
- Lantai Lantai ke Atas	_____
- Lantai Lantai ke Ring Balok	_____
- Lantai Ketinggian Ruangan Pemas / Jendang	_____
- Pemas (Pemas / Jendang)	_____
- Finishing Lantai	_____
- Finishing Dinding Luar	_____
- Finishing Dinding Dalam	_____
- Finishing Dinding Kertas Mural	_____
- Finishing Plafon	_____
- Finishing Atap	_____
- Pemas Pemas / Jendang	_____
<b>3. Spesifikasi Utilitas Bangunan</b>	
- Snek Pipa Air Bersih	_____
- Snek Pipa Air Limbah Hitam	_____
- Snek Pipa Air Hujan	_____
- Datar Lantai Rumah	_____
- Kabel Listrik Rumah	_____

#### G. DATA TEKNIK RUMAH

##### G.1 RUMAH TERTUTUP BERSUDUT DAN LAMPUBUNTAH

1. Perhitungan Lantai Berdaerah RTM / RDTM	_____
2. Intertek Bangunan Berdaerah RTM / RDTM	_____
a) KUB	_____
b) KUB	_____
c) Jumlah Lantai Mula	_____
3. Simpulan Bangunan Berdaerah RTM / RDTM	_____
a) KUB Dapur	_____
b) KUB (Simpulan Bangun)	_____
<b>4. Situasi Khusus</b>	
a) Berada di bawah tutul (Tegangan Tinggi)	_____ (Ya / Tidak) Ya
b) Berada dalam wilayah air banjir	_____ (Ya / Tidak) Ya
c) Berada di pinggir sungai	_____ (Ya / Tidak) Ya

Keterangan Dinding	0	= Randa Terhuni (Bangun Total Layak)
	100	= Randa Terbuka (Bangun Layak)

##### G.2 RUMAH KEADALAN BANGUNAN

1. KONDISI STRUKTUR BANGUNAN	(Lengkapi dengan foto penunjang)	Skor (1-100)
- Pondasi	_____	_____
- Dinding	_____	_____
- Balok	_____	_____
- Kolom	_____	_____
- Dinding	_____	_____
- Lantai	_____	_____
<b>2. KONDISI KAWASAN BENCANA</b>		
	(Lengkapi dengan foto penunjang)	Skor (1-100)
- Kekakuan	_____	_____
* ) Akurasi Struktur Dasar / Kumpul	_____	_____
* ) Akurasi Kondisi Kaku/Kaku	_____	_____
* ) Akurasi Struktur Balok-Balok Lantai	_____	_____
* ) Akurasi Lantai (Tinggi/tingginya lantai)	_____	_____
- Gempa	_____	_____
- Banjir	_____	_____
- Tsunami	_____	_____
- Longsor	_____	_____
- Pele	_____	_____
- Angin kencang	_____	_____

G.1 KOPER SANITASI								
<b>1. BIRUJAN UDARA</b>		Skor (1-100)						
- Ventilasi Udara / Buatan	0 _____	100 _____						
- Bau Pengapapan	0 _____	100 _____						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>- Permasalahannya</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>- Usulan / Rekomendasi</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>			- Permasalahannya	0 _____	_____	- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____
- Permasalahannya	0 _____	_____						
- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____						
<b>2. TINGKAT KELEMBABAN</b>		Skor (1-100)						
- Kelembaban rata-rata Dalam Ruangan	0 _____	100 _____						
- Sumber Kelembaban dari Rembesan Dalam Tanah	0 _____	100 _____						
- Sumber Kelembaban dari Gerakan air hujan	0 _____	100 _____						
- Sumber Kelembaban dari Bangun	0 _____	100 _____						
- Sumber Kelembaban dari Rembesan Tanah Tetangga yang lebih tinggi	0 _____	100 _____						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>- Permasalahannya</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>- Usulan / Rekomendasi</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>			- Permasalahannya	0 _____	_____	- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____
- Permasalahannya	0 _____	_____						
- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____						
<b>3. PENCAHAYAN</b>		Skor (1-100)						
a) Pencahayaan Alam	0 _____	100 _____						
b) Pencahayaan Buatan	0 _____	100 _____						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>- Permasalahannya</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>- Usulan / Rekomendasi</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>			- Permasalahannya	0 _____	_____	- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____
- Permasalahannya	0 _____	_____						
- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____						

G.2 KOPER UTILITAS								
<b>1. UTILITAS AIR BERSIH</b>		Skor (1-100)						
- Sumber Air	0 _____	100 _____						
- Kualitas Air	0 _____	100 _____						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>- Permasalahannya</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>- Usulan / Rekomendasi</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>			- Permasalahannya	0 _____	_____	- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____
- Permasalahannya	0 _____	_____						
- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____						
<b>2. UTILITAS AIR HANGAT</b>		Skor (1-100)						
- Tingkat Kelembaban Ruang	0 _____	100 _____						
- Ketersediaan Sumber Pemanasan	0 _____	100 _____						
- Beban Bangun / Lingkungan	0 _____	100 _____						
- Beban Ketersediaan akibat pergerakan air hujan	0 _____	100 _____						
- Beban Temporal	0 _____	100 _____						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>- Permasalahannya</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>- Usulan / Rekomendasi</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>			- Permasalahannya	0 _____	_____	- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____
- Permasalahannya	0 _____	_____						
- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____						
<b>3. UTILITAS PERSALAMAN</b>		Skor (1-100)						
- Ketersediaan dan Kondisi Tempat Sampah	0 _____	100 _____						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>- Permasalahannya</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>- Usulan / Rekomendasi</td> <td>0 _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>			- Permasalahannya	0 _____	_____	- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____
- Permasalahannya	0 _____	_____						
- Usulan / Rekomendasi	0 _____	_____						

<b>4. UPTUKAS AIR LIMBAH &amp; AIR BENSAS</b>		<b>Skor (2.000)</b>				
- Ketertarikan & kontrol kamar Mandi / Kamar	_____	_____				
- Ketertarikan & kontrol toilet / Toilet	_____	_____				
- Ketertarikan & kontrol Sub Kontrol Dapur & Cuci	_____	_____				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">- Penjelasan</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Usulan / Rekomendasi</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> </tr> </table>			- Penjelasan	_____	- Usulan / Rekomendasi	_____
- Penjelasan	_____					
- Usulan / Rekomendasi	_____					
<b>5. UPTUKAS LISTRIK</b>		<b>Skor (2.000)</b>				
- Ketertarikan & kontrol terapan listrik	_____	_____				
- Pemasangan Tanggapan Shortcut / Pemisahan Listrik	_____	_____				
- Pemasangan Anjungan Kontrol Status Listrik ke Manusia	_____	_____				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">- Penjelasan</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Usulan / Rekomendasi</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">_____</td> </tr> </table>			- Penjelasan	_____	- Usulan / Rekomendasi	_____
- Penjelasan	_____					
- Usulan / Rekomendasi	_____					

**Lampiran 4**

**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
RUMAH SEDERHANA SEHAT**



**Kondisi Rumah Bangunan**



**Kondisi Rumah Tidak Layak Huni di RT. 04/05 Kelurahan Jatake**













Wawancara dengan Ibu Linda Donarika Marbun, ST, MT (Kasi Pengawasan Gedung Hunian Rumah Tinggal Dinas Bangunan Kota Tangerang) Tanggal 20 Mei 2016



Bersama dengan Ibu Rani, S.Si (Kasubag Perencanaan Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang) Tanggal 13 Mei 16



## Walikota Tangerang

**KEPUTUSAN  
WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR : 663 / Kep.434.1-Bapp /2011  
TENTANG  
PENETAPAN  
LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH  
DI KOTA TANGERANG**

Menimbang :

- bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
- bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- bahwa di kabupaten/kota masih terdapat lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditangani;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu penetapan Keputusan Walikota Tangerang tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Tangerang.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993, Nomor : 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3518);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4723);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5059);
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5188);



## Walikota Tangerang

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- g. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG LOKASI PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA TANGERANG**
- Ketahu : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;
- Kedua : Pemerintah Kota bersedia mengalokasikan dana APBD untuk kelancaran pelaksanaan penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan tuntasnya penanganan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2012;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 29 November 2011





## Walikota Tangerang

- I. Lampiran : Keputusan Walikota Tangerang  
 II. Nomor : 663 / Kep-434.1-Kepp / 2011  
 III. Tanggal : 29 November 2011  
 IV. Tentang : Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Tangerang

Tipe/laya Kampung Kumuh	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Prioritas	
Kumuh Besar	Sukorejo	Pura Geger Baru	0402	0704	1	
		Karang Jaya	0402	0702		
Kumuh Sedang	Suka Cemer	Pura Geger	0402	0702	2	
		Sukorejo	0401	0702		
	Cipondoh	Pura Pasaal Indah	0401	0702		
		Cipondoh Indah	0402	0702		
	Jelambarang	Gendawati	0408	0702		
		Karawaci Baru	0404	0706		
	Karawaci	Karawaci	Bojeng Jaya	0401		0702
			Orsone	0402		0702
			Sugil	0401		0702
	Peruk	Gendawati		0401		0702
				0704		
Kumuh Kecil	Cidolog	Panung Terah	0401	0702	3	
		Cipondoh	Cipondoh	0402		0702
		Karawaci	Karawaci	0401		0702
			Pura Pasaal Mare	0404		0704
			Pura Pasaal	0402		0702
						0708
						0701
		Jelambarang		0402		0702
						0702
						0702
	Jelambarang	Jelambarang	Jelambarang	0406		0702
			Karawaci	0401		0704
	Karawaci	Karawaci	Karawaci	0405		0701
			Alam Jaya	0404		0708
			Nusa Jaya	0404		0702
	Peruk	Peruk	Karawaci	0401		0701
Sampang Jaya			0402	0702		
			0402	0702		

Ditetapkan di : Tangerang  
 Pada tanggal : 29 November 2011



TANGERANG



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Nyimas Melati No. 21 A Tangerang 15000

Telpon dan Fax : (021) 5538890 Email : ksbang@tangerangkota.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 073 / 174 -Ksbang

- Membaca : Surat dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa Nomor :  
736/UN.43.6.1/PG/2013 Tanggal : 06 Maret 2013 Perihal :  
Permohonan Izin Penelitian.
- Hengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian;  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;  
4. Keputusan Dirjen Sosia Politik Nomor 14 Tahun 1981 tentang Surat Pembertahuan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan (SP2KL);  
5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang;  
6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang

**MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK MELAKUKAN IZIN PENELITIAN**

1. Nama / NPM : Astri Dwi Astuti / 6661091651  
2. Pekerjaan : Mahasiswa/i  
3. Alamat : Jln. Sriwijaya V/8 Rt.003/018 Bencongan Kelapa Dua  
4. Penanggung jawab : Rina Yulianti, S.IP, M.Si  
5. Jumlah Peneliti : 1 ( satu ) Orang  
6. Instansi Yang dituju : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang  
7. Maksud dan Tujuan : Permohonan Izin Penelitian  
8. Lama Penelitian : Terhitung Tanggal 11 Maret s/d 11 April 2013  
9. Judul Penelitian : **" PROGRAM BEDAH RUMAH OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANGERANG "**



**SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak berkaitan dengan maksud surat penelitian ini,
2. Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
3. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian / Survey Data / Riset belum selesai, permohonan perpanjangan Penelitian harus diajukan kembali;
4. Wajib melaporkan hasilnya dalam bentuk buku / laporan kepada Pemerintah Kota Tangerang Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang untuk dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut;
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Rekomendasi tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan bagi yang berkepentingan dimohon bantuan seperlunya.

DIKELUARKAN  
PADA TANGGAL

:  
: II

DI TANGERANG  
Maret 2013

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KOTA TANGERANG



**Drs. H. HARIBULLAH, M.Si**  
NIP. 196702031994031013

# KARTU PENERUS DISPOSISI

IDEK : \_\_\_\_\_  
 NO : \_\_\_\_\_  
 TANGGAL PENYELESAIAN  
 15 - 03 - 2013

asal : Permohonan izin Mencari Kerja

di No. : 06/03/2013 / 787 / III - 42 S. 1 / PG / 2013  
 di : UNIVERSITAS SULTAN AGUNG TIRTAHARA

**ISTRUKSI / INFORMASI \***

not dia Kertanegara

5  
5

dit: Urubang Kefayuan

dan tidak ada kelengkapan  
 dan KOSMOSINMAS, dan  
 di fasilitas

**DITERUSKAN KEPADA**

1. YH; EP.KODIE PU
2. S2
- 3.
4. [Signature]
- 5.
- 6.

S2 15/3

tidak digunakan harap segera dikembalikan

1. Kepada bawahan "Instruksi" dan atau "Informasi"

2. Kepada atasan "Informasi" coret Instruksi

pada :  
 tanggal :

Bu... Linda Murni Kardi  
 Yth. Hrs  
[Signature] 25/3 2013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM 4 Ploso (0254) 280230 Ext. 228, Fax. (0254) 281243 Paksiatan Serang Banten  
url: <http://www.fkip-untirta.ac.id>, Email: [kemah@fkip-untirta.ac.id](mailto:kemah@fkip-untirta.ac.id)

Nomor : 29/UN.43.6.1/PG/2014

04 Maret 2014

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.

Dinas Sosial Kota Tangerang

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riang mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Atri Dwi Astuti

NIM : 6661091651

Semester : X

Mata Kuliah: Skripsi

Judul : Implementasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

Data :- Undang-undang tentang judul terkait diperlukan

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yuliani, S.IP, M.Si  
NIP. 197407052006042011



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara  
2. Ilmu Komunikasi  
3. Ilmu Pemerintahan

Jalan Raya Sekeloa Timur I Phase II/24 2001001, Tel. 081, Fax. 0274-201147, Pekanbaru, Riau, Indonesia  
URL: <http://www.uns-tirtayasa.ac.id>, Email: [uns@uns-tirtayasa.ac.id](mailto:uns@uns-tirtayasa.ac.id)

Nomor : 144 /UN.436.1/PG/2016

04 Maret 2016

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Cipta Karya Kota Tangerang  
di  
Tangerang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan (juga mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang beranda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Anni Dwi Anani  
NIM : 6661001631

Semester : XIV

Mata Kuliah: SKRIPSI

Judul : Evaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Interoang Kota Tangerang

Data : Data Mengenai Evaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat di Kecamatan Interoang Kota Tangerang

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan ijin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kelima Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara  
  
Liliyaningsih, S.Sos., M.Si  
NIP. 197601292003122001

DAFTAR HALOH Bimbingan

NO	HALU/TOL	URAIAN	TTD

Sering \_\_\_\_\_ 20  
 Kena Pukul \_\_\_\_\_

Ujungjaya, 1501, M.Si  
 NIP. 519031200112001

DAFTAR ISI

1. Karu ini banyu dibana setiap hal bimbingan dan diperlihatkan bantia pendalaman belajar
2. Syarat belajar belajar

1. ACC Belajar Dosen Pembimbing 1 & 2
2. Mengisi form pendaftaran ulang & persiapkan administrasi belajar
3. Mengisi form belajar pendalaman belajar dan tanda belajar
4. Surat belajar dari dan belajar
5. Melampirkan surat SMA
6. Tanda belajar belajar
7. Foto hitam putih 4x6 (3 biji), 3x4 (3 biji), foto berwarna 3x4 (1 biji)
8. Surat Cover Belajar 1 buah (hal pembimbing 1 & 2 serta dibaca)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Accha Devi Akuti  
 NPM : 6440091651  
 JUDUL SKRIPSI : Evaluasi Kinerja Berbasis Sistem Informasi Manajemen  
 Pembimbing I : Supriatna, M.Pd., Ph.D., M.Si  
 Pembimbing II : Zahara, S.Pd., M.Si

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

DAFTAR HASIL BANGUNAN

NO	TGL/TH	URAIAN	TTD
1	5/1/19	Inspeksi Struktur / Bangun Kecamatan Srenggeh	
2	15/4/2018	Fieldwork, interior Struct direct observation	
	15/1/2018	partuhki bnd 1 dan 3	
	26/1/18	Partuhki bagian bangunan Partuhki per bnfom	
		Ace lapang.	
		cmv	
	26/1/18	Mo-G Group	

DAFTAR HASIL BANGUNAN

NO	TGL/TH	URAIAN	TTD
	27/6/18	Partuhki Gud 3 -flet area dan tip -LSD -Tactical system	
	21/1/18	Ace lapang Graf abstrak dan mural mural	
	21/1/18	Ace sdang.	

## Daftar Riwayat Hidup



### IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap : Asti Dwi Astuti  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Mei 1990  
Alamat : Jl. Sriwijaya V No. 8, RT. 003 RW. 018  
Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang -  
Banten  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Warga Negara : Indonesia  
Nomor Telepon : 089654600017  
Email : [astriaci28@gmail.com](mailto:astriaci28@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Al Istoqomah  
(1998-2002)
2. SMP Nusantara 1  
(2002-2005)
3. SMK Islamic Village  
(2005-2008)
4. S1 Administrasi Negara FISIP UNTIRTA  
(2009-2016)

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Bendahara Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP UNTIRTA  
(2011-2012)
2. Ketua Pelaksana Pelatihan Parlemen Remaja UNTIRTA  
(2011-2012)
3. Ketua Fraksi 2009 ANE Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP  
UNTIRTA (2010-2011)

4. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa FISIP UNTIRTA  
(2009-2010)

Serang, 22 Agustus 2016

Astri Dwi Astuti